



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

**PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA
TAHUN 2025**



www.pt-malukuutara.go.id

Jl. Bhayangkara, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan,
Maluku Utara 97852

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat dan hidayahNya, kami mempersembahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025, sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 16516/SEK/OTI.6/XII/2025, tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

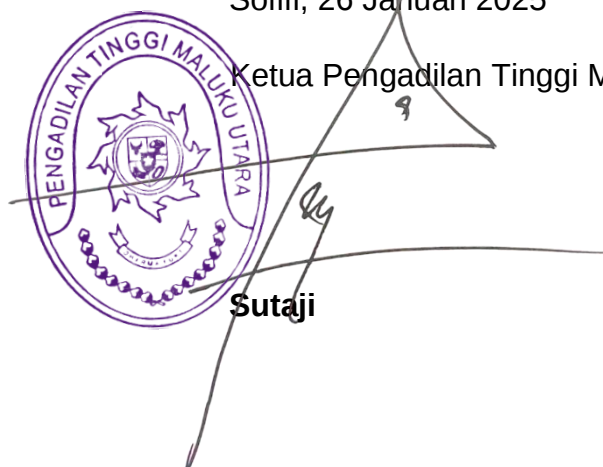
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kami dalam menjalankan amanah konstitusi serta memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah Bumi Moloku Kie Raha. Sepanjang tahun ini, Pengadilan Tinggi Maluku Utara terus berkomitmen untuk mengakselerasi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung melalui penguatan integritas, profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran hakim, pejabat struktural, fungsional, serta staf yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Harapannya, laporan ini dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi Mahkamah Agung RI serta para pemangku kepentingan lainnya.

Atas segala kekurangannya, kritikan dan saran yang sifatnya membangun, sangat kami harapkan.

Sofifi, 26 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



Sutaji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. VISI DAN MISI	3
C. MOTO	4
D. DASAR HUKUM	4
E. RUANG LINGKUP	5
F. WAKTU PELAKSANAAN	5
BAB II KEADAAN PERKARA	7
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM	7
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
B. PENYELESAIAN PERKARA	9
1. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	9
2. Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	12
3. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan RJ	13
4. Jumlah Perkara yang Berhasil melalui Dimediasi	13
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Dimediasi	13
6. Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court	14
7. Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	14

8. Layanan Perkara Pidanan yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	15
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	15
1. Posbakum	15
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	16
3. Perkara Prodeo	17
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN	18
A. Mutasi	29
B. Promosi	40
C. Pensiun	43
D. Diklat	44
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	49
A. Pengelolaan Keuangan	49
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	52
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	69
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	76
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	76
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	77
C. Inovasi Pelayanan Publik	94
BAB VI PENGAWASAN.....	147
A. Internal	147
B. Evaluasi	153
BAB VII PENUTUP.....	155
A. Kesimpulan	155
B. Rekomendasi	156

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	7
Tabel 2.2. Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	8
Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	8
Tabel 2.4. Perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	9
Tabel 2.5. Jumlah Perkara Banding yang diputus pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	10
Tabel 2.6. Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	12
Tabel 2.7. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restorative Justice pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	13
Tabel 2.8. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	13
Tabel 2.9. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	13
Tabel 2.10. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court	14
Tabel 2.11 Perkara Pidana yang Menggunakan E-Berpadu	14
Tabel 2.12 Perkara Pidana yang Diajukan Menggunakan E-Berpadu	15
Tabel 2.13. Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Tingkat Pertama pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	16
Tabel 2.14. Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	16
Tabel 2.15. Perkara Prodeo Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	17
Tabel 3.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	18
Tabel 3.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA Tahun 2025	20
Tabel 3.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Soasio Kelas II Tahun 2025	23
Tabel 3.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Tahun 2025	24

Tabel 3.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II Tahun 2025	26
Tabel 3.6 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sanana Kelas II Tahun 2025	27
Tabel 3.7 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2025	28
Tabel 3.8 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara	30
Tabel 3.9 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA	31
Tabel 3.10 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Soasio Kelas II	32
Tabel 3.11 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II	33
Tabel 3.12 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Labuha Kelas II	34
Tabel 3.13 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II	35
Tabel 3.14 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II	36
Tabel 3.15 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara	37
Tabel 3.16 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA	37
Tabel 3.17 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Soasio Kelas II	38
Tabel 3.18 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II	38
Tabel 3.19 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Labuha Kelas II	39
Tabel 3.20 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II	39
Tabel 3.21 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II	39
Tabel 3.22 Promosi Kenaikan Pangkat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	41
Tabel 3.23 Promosi Menduduki Jabatan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	42
Tabel 3.24 Usul Pensiun pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	43
Tabel 3.25 Diklat Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	44
Tabel 4.1 Realisasi DIPA 01	50
Tabel 4.2 Realisasi Belanja Pegawai	50
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Barang	50
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Modal	51
Tabel 4.5 Realisasi DIPA 03	51
Tabel 4.6 Nilai Kinerja Satuan Kerja DIPA 01	51
Tabel 4.7 Nilai Kinerja Satuan Kerja DIPA 03	52

Tabel 4.8 Keadaan Tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara	53
Tabel 4.9 Keadaan Tanah Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara	53
Tabel 4.10 Kendaraan Dinas yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	54
Tabel 4.11 Kendaraan Dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	55
Tabel 4.12 Rumah Negara yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara	56
Tabel 4.13 Rumah Negara yang dimiliki Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara	57
Tabel 4.14 Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	58
Tabel 4.15 Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	59
Tabel 4.16 Penilaian (Indeks Pengelolaan Aset) Satker di Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025	68
Tabel 4.17 Perangkat Keras yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara	69
Tabel 5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadilan	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Lokasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara	2
Gambar 1.2. Peta Wilayah Maluku Utara Beserta Lokasi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	3
Gambar 5.1. Aplikasi PTSP Pengadilan Tinggi Maluku Utara	79
Gambar 5.2. Briefing Petugas PTSP Pengadilan Tinggi Maluku Utara	79
Gambar 5.3. Monitor Informasi	96
Gambar 5.4. Kursi roda bagi penyandang disabilitas	97
Gambar 5.5. Kursi tamu bagi penyandang disabilitas	97
Gambar 5.6. Tongkat bagi penyandang disabilitas dan payung	97
Gambar 5.7. Alat bantu pendengaran Tunarungu	98
Gambar 5.8. Alat Peraga Tunanetra	98
Gambar 5.9. Mesin antrian	98
Gambar 5.10. Monitor Touch screen untuk aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat	99
Gambar 5.11. Kotak Gratifikasi	99
Gambar 5.12. Kotak Pengaduan dan Saran	99
Gambar 5.13. Layanan media baca buku, koran dan majalah	100
Gambar 5.14. Ruang tamu terbuka	101
Gambar 5.15. Bingkisan kompensasi atas keterlambatan layanan	101
Gambar 5.15. Layanan Charge HP	102
Gambar 5.16. Layanan air minum	102
Gambar 5.17. Pamflet dan Brosur pelayanan	103
Gambar 5.18. Aplikasi Antrian PTSP	106
Gambar 5.19. Aplikasi Panggilan Sidang dan Informasi	107
Gambar 5.20. Kotak Gratifikasi	107
Gambar 5.21. Electronic Banner System	108
Gambar 5.22. Aplikasi Survei	109
Gambar 5.23. <i>Aplikasi Permohonan Layanan Informasi</i>	110
Gambar 5.24. Aplikasi Pengembalian Sisa Panjar	111

Gambar 5.25. Sistem Pelayanan Dua Puluh Menit (Simpel)	112
Gambar 5.26. Virtual Assistant e-KAPITA	114
Gambar 5.27 Aplikasi e-Court dan e-Berpadu	115
Gambar 5.28. Aplikasi Eraterang	115
Gambar 5.29 Aplikasi SIPP	116
Gambar 5.30. Aplikasi PTSP+	116
Gambar 5.31. Aplikasi SIWAS	116
Gambar 5.32. Website Pengadilan	117
Gambar 5.33. Media Sosial	117
Gambar 5.34. Kaca Mata Baca	118
Gambar 5.35. Antrian PTSP	119
Gambar 5.36 Antrian Prioritas	119
Gambar 5.37. Monitor Informasi	120
Gambar 5.38. Monitor EDC	121
Gambar 5.39. Kompensasi Layanan	121
Gambar 5.40. e-Visual	122
Gambar 5.41. Jalur dan Fasilitas Disabilitas	122
Gambar 5.42. Jalur dan Fasilitas Disabilitas	123
Gambar 5.43. Pelayanan Tamu	123
Gambar 5.44. Pelayanan Pengaduan	124
Gambar 5.45. Aplikasi SIMO-AMPUH	124
Gambar 5.46. Aplikasi SIMO-ZI	125
Gambar 5.47. Aplikasi PangSid	126
Gambar 5.48. Layanan LINDA	126
Gambar 5.49. Loker Pengunjung	127
Gambar 5.50. Pojok Rapi	127
Gambar 5.51. Pintu Khusus Penuntu Umum dan Tahanan	128
Gambar 5.52. Fasilitas Informasi Hakim dan Pegawai	129
Gambar 5.53. Kursi Roda untuk disabilitas pada Pengadilan Negeri Sanana	129
Gambar 5.54. Guiding blocks sebagai alat bantu penunjuk arah bagi tuna netra	130

Gambar 5.55. Ruang tamu terbuka dan kursi pengunjung	130
Gambar 5.56. Fasilitas Genset	130
Gambar 5.57. Ruang Pengunjung	131
Gambar 5.58. Fasilitas Taman Bermain Anak untuk sidang anak	131
Gambar 5.59. Lemari Kompensasi dan charger HP	131
Gambar 5.60. Pojok Baca	132
Gambar 5.61. Kulkas Untuk Penyediaan Minuman buat pengujung	132
Gambar 5.62. Tab survei untuk pengunjung dan nomor antrian pengunjung	133
Gambar 5.63. Barcode Survei Pelayanan Pengadilan untuk pengunjung	133
Gambar 5.64. Alarm Pemadam Kebakaran	134
Gambar 5.65. Fasilitas bagi penyandang disabilitas	134
Gambar 5.66. Fasilitas Kesehatan bagi masyarakat yang sedang sakit	134
Gambar 5.67. Monalisa (Monitoring & Analisa Pimpinan)	136
Gambar 5.68. Panel admin Haisua	137
Gambar 5.69. Pengingat sidang Notifia	138
Gambar 5.70. Panel Admin APASANA	138
Gambar 5.71. Halaman Beranda depan APASANA	139
Gambar 5.72. Permintaan Barang per Bagian dengan SIPB	140
Gambar 5.73. Ruang PTSP Pengadilan Negeri Bobong	141
Gambar 5.74. Ruang Tamu Terbuka Pengadilan Negeri Bobong	141
Gambar 5.75. Toilet Disabilitas	142
Gambar 5.76. Komputer Pelayanan	143
Gambar 5.77. Kursi Roda	144
Gambar 5.78. Kursi ruang tunggu khusus Difabel	144
Gambar 5.79. Toilet Difabel	144
Gambar 5.80. Maklumat Pelayanan	145
Gambar 5.81. Bingkisan kompensasi atas keterlambatan layanan	145
Gambar 5.82. Bingkisan kompensasi atas keterlambatan layanan	145
Gambar 5.83. CCTV	146
Gambar 5.84. Waktu Pelayanan	146

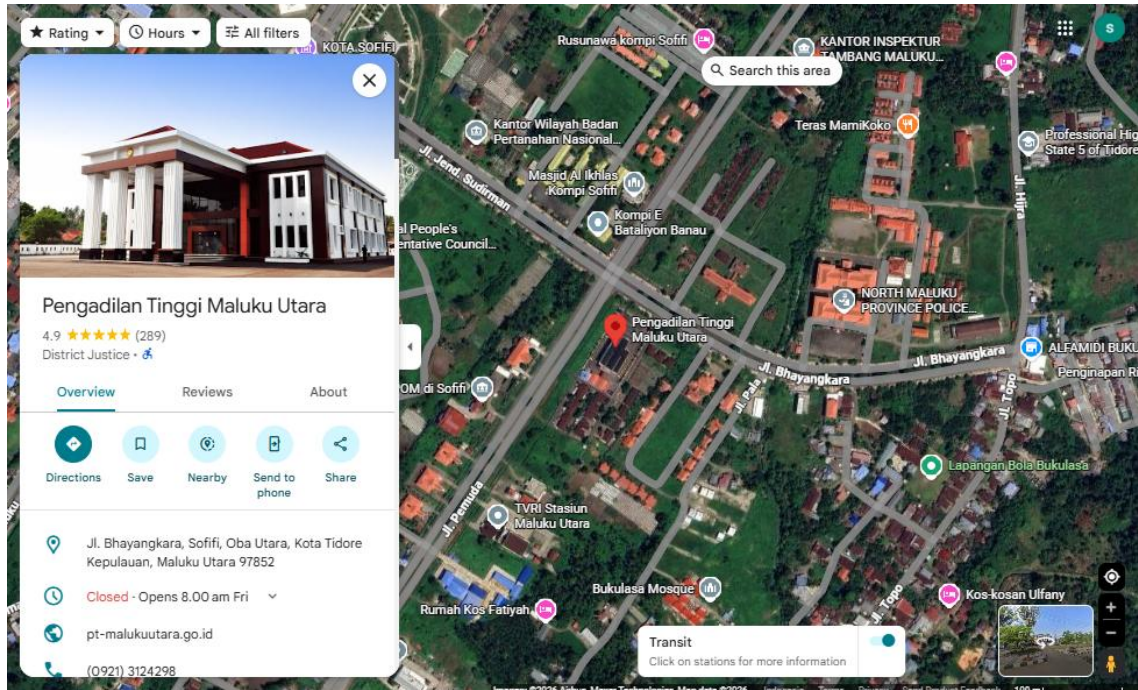
BAB I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 6 (enam) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Maluku Utara. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Maluku Utara selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Dengan terbentuknya Provinsi Maluku Utara pada 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.6 Tahun 2003 dan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, akhirnya diresmikan berdirinya Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada 5 Maret 2005 yang berkedudukan sementara di Ternate menempati gedung Pemerintah Daerah Kota Ternate yang dipinjam pakaikan, mengingat kondisi gedung di Sofifi yang tidak memadai. Selanjutnya sesuai pasal 9, ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 1999, jo pasal 1 Undang-undang 11 tahun 2004, menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, akhirnya dibangun gedung baru Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi dan terhitung tanggal 20 Desember 2018

Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpindah kantor di Ibukota Provinsi Maluku Utara di Sofifi, dengan alamat Jl. Bhayangkara, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

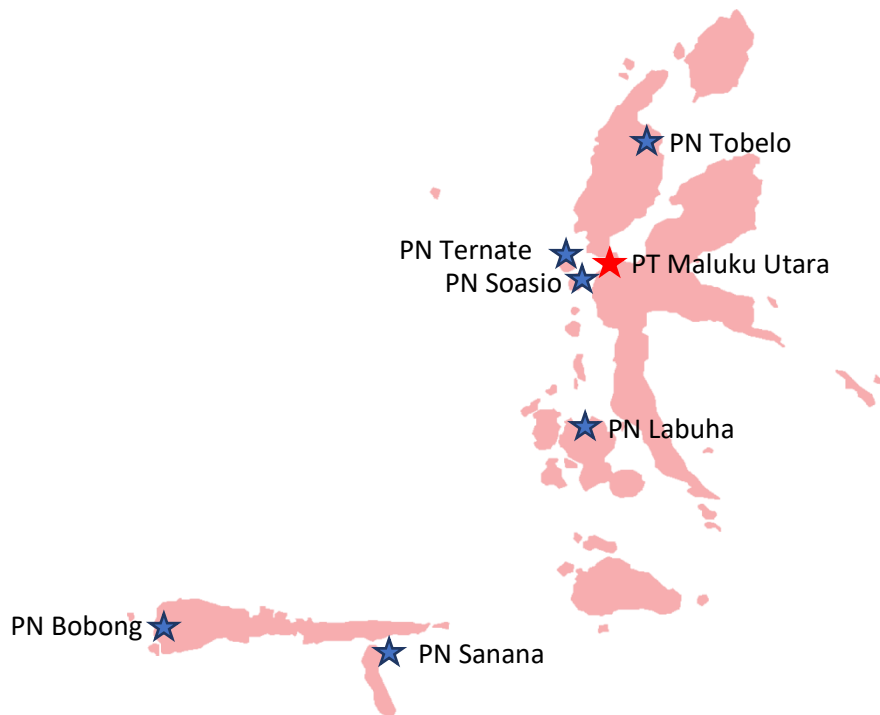


(sumber: Google Maps)

Gambar 1.1. Peta Lokasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Pengadilan Tinggi Maluku Utara membawahi 6 (enam) Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya yakni Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA, Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II, Pengadilan Negeri Soasio Kelas II, Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, Pengadilan Negeri Sanana Kelas II dan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri baru, maka kedepannya akan ada penambahan 1 (satu) Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yaitu Pengadilan Negeri Halmahera Barat (Jailolo).



Gambar 1.2. Peta Wilayah Maluku Utara Beserta Lokasi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah ***Terwujudnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara Yang Agung***, dan Misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara antara lain, sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

C. MOTO

Moto Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah ***“Bekerja Cerdas, Ikhlas, Tuntas dan Berkualitas dalam mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung dan Modern bertaraf International.”*** Dengan semboyannya : **KIE RAHA.**

K : Komitmen

I : Inovatif

E : Edukatif

R : Responsif

A : Akuntabel

H : Humanis

A : Agamis

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah, sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan, baik para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 151A/KMA/SK/II/2011, Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 16516/SEK/OTI.6/XII/2025, tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

E. RUANG LINGKUP

Dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini, mencakup pelaksanaan kegiatan administrasi teknis kepaniteraan, administrasi umum kesekretariatan, dan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, serta rekapitulasi seluruh kegiatan Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan laporan mulai dilaksanakan sejak awal bulan Januari 2025, dengan mengumpulkan data pada masing-masing bagian di

lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Laporan dari Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Salinan elektronik dokumen (*softcopy*) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri se-wilayah diterima oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari tahun 2025. Pada minggu keempat Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengkompilasi semua Laporan yang ada, dan mengirim *softcopy*nya kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melalui tautan <https://bit.ly/LAPKEG2025>, sebelum batas waktu yang ditetapkan.

BAB II. KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 dikelola dengan baik. Data perkara dilaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Sisa/ Masuk	Jenis Perkara							Ket
			Pid.B	Pid.S/C	Pra	Pid.	Pid.	Pid. Tipikor	Jumlah	
						Anak	Lalu Lintas			
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ternate	Sisa 2024	34	0	1	0	0	9	44	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2025	178	19	2	11	6251	42	252	
2	Soasio	Sisa 2024	26	0	0	0	0	0	26	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2025	168	50	6	5	7	0	229	
3	Tobelo	Sisa 2024	4	3	0	0	0	0	7	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2025	113	39	2	9	0	0	154	
4	Labuha	Sisa 2024	4	0	0	0	0	0	4	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2025	53	3	1	0	1126	0	57	
5	Sanana	Sisa 2024	2	0	0	1	0	0	3	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2025	50	16	4	16	285	0	86	
6	Bobong	Sisa 2024	0	0	0	0	0	0	0	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2025	2	9	0	0	174	0	11	
TOTAL 2025			634	139	16	42	7843	51	873	

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Sisa/ Masuk	Jenis Perkara				
			Pdt.G	Pdt.GS	Pdt.P	Pdt.PHI	Jumlah
			1	2	3	4	5
1	Ternate	Sisa 2024	15	0	1	0	16
		Masuk 2025	102	15	194	22	333
2	Soasio	Sisa 2024	7	0	0	0	7
		Masuk 2025	43	4	59	0	106
3	Tobelo	Sisa 2024	27	0	0	0	27
		Masuk 2025	185	13	89	0	287
4	Labuha	Sisa 2024	8	0	0	0	8
		Masuk 2025	51	8	17	0	76
5	Sanana	Sisa 2024	0	0	0	0	0
		Masuk 2025	5	8	105	0	118
6	Bobong	Sisa 2024	0	0	0	0	0
		Masuk 2025	9	0	4	0	13
TOTAL 2025			452	48	469	22	991

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara	Jenis Perkara		
			Masuk	Putus	Sisa
1	Ternate	Tipikor	16	15	1
		Pidana	17	17	0
		Perdata	20	18	2
2	Soasio	Pidana	19	18	1
		Perdata	3	3	0
3	Tobelo	Pidana	11	9	2
		Perdata	17	14	3
4	Labuha	Pidana	11	11	0
		Perdata	9	9	0
5	Sanana	Pidana	7	6	1
		Perdata	2	1	1
6	Bobong	Pidana	2	2	0
		Perdata	2	2	0
TOTAL			136	125	11

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Perkara yang Diputus Tepat Waktu Pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Jumlah perkara tahun 2025 yang diputus pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara	Masuk	Putus	Sisa
1	Ternate	Pidana/Tipikor	252	250	2
		Perdata/PHI	333	294	39
2	Soasio	Pidana	229	218	11
		Perdata	106	91	15
3	Tobelo	Pidana	132	127	5
		Perdata	287	275	12
4	Labuha	Pidana	59	58	5
		Perdata	77	69	16
5	Sanana	Pidana	86	80	6
		Perdata	118	117	1
6	Bobong	Pidana	11	10	1
		Perdata	13	12	1
TOTAL			1703	1601	114

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat capaian sasaran kerja dengan indikator kinerja masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Ternate: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 585 perkara dan jumlah perkara putus 544 perkara maka capaian kinerja adalah 93%.
2. Pengadilan Negeri Soasio: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 335 perkara dan jumlah perkara putus 309 perkara maka capaian kinerja adalah 92%.

3. Pengadilan Negeri Tobelo: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 419 perkara dan jumlah perkara putus 402 perkara maka capaian kinerja adalah 96%.
4. Pengadilan Negeri Labuha: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 136 perkara dan jumlah perkara putus 127 perkara maka capaian kinerja adalah 93%.
5. Pengadilan Negeri Sanana: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 204 perkara dan jumlah perkara putus 197 perkara maka capaian kinerja adalah 97%.
6. Pengadilan Negeri Bobong: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 24 perkara dan jumlah perkara putus 22 perkara maka capaian kinerja adalah 92%.

Jumlah perkara yang diputus pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Jumlah Perkara Banding yang diputus pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara	Jenis Perkara		
			Masuk	Putus	Sisa
1	Ternate	Tipikor	16	15	1
		Pidana	17	17	0
		Perdata	20	18	2
2	Soasio	Pidana	19	18	1
		Perdata	3	3	0
3	Tobelo	Pidana	11	9	2
		Perdata	17	14	3
4	Labuha	Pidana	11	11	0
		Perdata	9	9	0
5	Sanana	Pidana	7	6	1
		Perdata	2	1	1
6	Bobong	Pidana	2	2	0
		Perdata	2	2	0
TOTAL			136	125	11

Perkara sisa Tahun 2025 sebanyak 11 berkas yaitu perkara masuk bulan pada bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- Perdata : 6 berkas perkara
- Pidana : 4 berkas Perkara
- Tipikor : 1 berkas Perkara

Perkara masuk Tahun 2025 sebanyak 136 berkas dengan rincian sebagai berikut :

- Perdata : 53 berkas perkara
- Pidana : 65 berkas perkara
- Tipikor : 16 berkas perkara

Jumlah perkara putus Tahun 2025 sebanyak 125 berkas dengan rincian sebagai berikut:

- Perdata : 47 berkas
- Pidana : 61 berkas
- Tipikor : 15 berkas

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 semuanya diputus tepat waktu, adapun sisa perkara yang ada merupakan perkara yang masuk di akhir tahun yang belum melewati batas waktu penyelesaian perkara yang telah ditetapkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menekankan bahwa Batas Waktu Maksimal Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata untuk Tingkat Pertama adalah 5 (lima) Bulan. Penyelesaian perkara yang dimaksud di sini adalah pengadministrasian perkara dari

pendaftaran hingga selesai minutasasi. Dengan demikian Jumlah Perkara Pidana maupun Perdata yang diputus tepat waktu dipersentasekan sebesar 100%.

2. Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara	Tingkat Upaya Hukum			
			Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Grasi
1	Ternate	PID	16	8	6	0
		PDT	19	11	7	0
2	Soasio	PID	21	5	0	0
		PDT	5	2	1	0
3	Tobelo	PID	11	3	0	0
		PDT	16	9	2	0
4	Labuha	PID	13	8	0	0
		PDT	9	5	0	0
5	Sanana	PID	5	2	0	0
		PDT	1	1	1	0
6	Bobong	PID	2	0	0	0
		PDT	2	1	0	0
TOTAL			120	55	17	0

3. Perkara yang diselesaikan dengan Restorative Justice

Tabel 2.7. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restorative Justice pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Nama Pengadilan	Pidana			Keterangan
		Jumlah Perkara RJ	Berhasil	Tidak Berhasil	
1	Pengadilan Negeri Ternate	14	1	13	
2	Pengadilan Negeri Soasio	1	1	0	
3	Pengadilan Negeri Tobelo	10	10	0	
4	Pengadilan Negeri Labuha	7	7	0	
5	Pengadilan Negeri Sanana	4	4	0	
6	Pengadilan Negeri Bobong	0	0	0	

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Tabel 2.8. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

No	Nama Pengadilan	Perdata			Keterangan
		Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	
1	Pengadilan Negeri Ternate	60	3	51	Tidak dapat dilaksanakan = 1 dan mediasi berjalan = 5
2	Pengadilan Negeri Soasio	26	3	23	Perdata
3	Pengadilan Negeri Tobelo	82	8	74	
4	Pengadilan Negeri Labuha	34	2	21	Tidak dapat dilaksanakan = 8 dan mediasi berjalan = 3
5	Pengadilan Negeri Sanana	13	2	11	Perdata
6	Pengadilan Negeri Bobong	9	1	8	Perdata

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Tabel 2.9. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No	Nama Pengadilan	Pidana			Keterangan
		Jumlah Perkara Diversi	Berhasil	Tidak Berhasil	
1	Pengadilan Negeri Ternate	2	1	1	
2	Pengadilan Negeri Soasio	0	0	0	

3	Pengadilan Negeri Tobelo	1	1	0	
4	Pengadilan Negeri Labuha	0	0	0	Tidak ada perkara pidana khusus anak yang masuk
5	Pengadilan Negeri Sanana	2	0	2	
6	Pengadilan Negeri Bobong	0	0	0	

6. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court

Tabel 2.10. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court

No	Nama Pengadilan	Perdata			Keterangan
		Jumlah Perkara Perdata	e-Court	Manual	
1	Pengadilan Negeri Ternate	318	318	0	
2	Pengadilan Negeri Soasio	106	106	0	
3	Pengadilan Negeri Tobelo	287	287	0	
4	Pengadilan Negeri Labuha	77	77	0	
5	Pengadilan Negeri Sanana	118	118	0	
6	Pengadilan Negeri Bobong	13	13	0	

7. Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Tabel 2.11 Perkara Pidana yang Menggunakan E-Berpadu

No	Nama Pengadilan	Pidana			Keterangan
		Jumlah Perkara Pidana	e-Berpadu	Manual	
1	Pengadilan Negeri Ternate	273	273	0	
2	Pengadilan Negeri Soasio	173	170	3	
3	Pengadilan Negeri Tobelo	131	131	0	
4	Pengadilan Negeri Labuha	59	54	5	
5	Pengadilan Negeri Sanana	86	66	20	
6	Pengadilan Negeri Bobong	10	10	0	

8. Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)

Tabel 2.12 Perkara Pidana yang Diajukan Menggunakan E-Berpadu

No	Nama Pengadilan	Pidana			Keterangan
		Jumlah Perkara Pidana	E-Berpadu	Manual	
1	Pengadilan Negeri Ternate	1314	1314	0	
2	Pengadilan Negeri Soasio	173	170	3	
3	Pengadilan Negeri Tobelo	131	131	0	
4	Pengadilan Negeri Labuha	59	54	5	
5	Pengadilan Negeri Sanana	86	66	20	
6	Pengadilan Negeri Bobong	11	10	1	

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2025, beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mendapatkan anggaran belanja jasa konsultan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.13. Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Tingkat Pertama pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Layanan	%	LBH yang ditunjuk
1	Ternate	44.000.000	43.920.000	130	100,00	Yayasan Bantuan Hukum Trust
2	Soasio	36.000.000	36.000.000	94	100,00	POSBKUMADIN Kota Tidore
3	Tobelo	44.000.000	43.899.834	84	99,77	Yayasan Pos Bantuan Hukum ADIN
4	Labuha	36.000.000	35.695.000	87	99,15	Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen (YLPAl)
5	Sanana	24.000.000	24.000.000	74	100,00	YLBH Walima Sula
6	Bobong	24.000.000	24.000.000	15	100,00	YLBH Sipakale

2. Sidang Keliling

Pelaksanaan Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 terangkum dalam table rincian sebagai berikut :

Tabel 2.14. Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Sidang	Persentase	Ket
1	Ternate	270.000.000	269.890.000	24	99,96%	
2	Soasio	249.900.000	248.880.000	7	99,59%	
3	Tobelo	250.000.000	249.590.000	13	99,84%	

4	Labuha	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Tidak ada anggaran sidang keliling
5	Sanana	200.000.000	199.630.000	13	99,82%	
6	Bobong	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Tidak ada anggaran untuk sidang keliling

3. Perkara Prodeo

Pada tahun anggaran 2025, tidak ada pengajuan perkara prodeo pada pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.15. Perkara Prodeo Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Pengadilan Negeri	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Ket
1	Ternate	1.465.000	541.000	36,92%	
2	Soasio	1.440.000	1.440.000	100,00	
3	Tobelo	0	0	0	
4	Labuha	0	0	0	
5	Sanana	720.000	340.000	47,22	
6	Bobong	720.000	0	0	

BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *good government*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pengelolaan sumber daya manusia (Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Komposisi sumber daya manusia yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	SUTAJI, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN	PEMBINA UTAMA (IV/e)	MAGISTER S2
2	SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	PEMBINA UTAMA (IV/e)	MAGISTER S2
3	AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	PEMBINA UTAMA (IV/e)	MAGISTER S2
4	GLENNY J. L. DE FRETES, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	PEMBINA UTAMA (IV/e)	MAGISTER S2
5	SUTARNO, S.H., M.HUM.	HAKIM TINGGI	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	MAGISTER S2
6	YUSRIANSYAH, S.H., M.HUM.	HAKIM TINGGI	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	MAGISTER S2
7	AGUS PANCARA, S.H., M.HUM.	HAKIM TINGGI	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	MAGISTER S2
8	MUSTAJAB, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	MAGISTER S2
9	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	HAKIM ADHOC TIPIKOR	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	MAGISTER S2
10	BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H., M.H.	HAKIM YUSTISIAL	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	MAGISTER S2
11	DR. TIRTA WINATA, S.H., M.H.	HAKIM ADHOC TIPIKOR	-	DOKTOR S3
12	BUDIONO, S.H., M.H.	HAKIM ADHOC TIPIKOR	-	MAGISTER S2

13	LA JAMAL, S.H.	PANITERA	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	STRATA S1
14	FATIMA ALBAAR, S.AG., M.H.	SEKRETARIS	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	MAGISTER S2
15	VERRA LOKOLLO, S.H.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	STRATA S1
16	TUTY INDAYANI, S.E.	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	PEMBINA (IV/a)	STRATA S1
17	YASIN UMAGAPI, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
18	NAHRA HUSEN, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
19	MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
20	SUMARTINI WARDIO	PANITERA PENGGANTI	PENATA (III/c)	SLTA/SEDERAJAT
21	ALIMUDIN BOLY, S.IP., M.H.	KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	MAGISTER S2
22	SULAIMAN TOMIA, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
23	FATAH MANAN	KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	PENATA TINGKAT I (III/d)	SLTA/SEDERAJAT
24	ULFA MAILANI, S.E.	KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
25	INDRAWATI HAJI AMIN IDRIS, S.SOS.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
26	YENI RAHMAWATI, S.T.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
27	MUHAMMAD AL AKHIRUDDIN HAMSAH, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
28	M. NASIR JAFAR, S.HI.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
29	SYAHRUDDIN, S.KOM.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
30	SAMSUDIN USMAN, S.HI.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
31	MONALISA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
32	BAYU INDRIANTO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
33	ROSYID HARDIKA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
34	HERLIAN DJUNAIDI, A.MD.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PENATA MUDA (III/a)	AHLI MADYA D3
35	ADITYA AZHAR PRATAMA, S.M.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
36	ALDO JULIAN HASTONO, S.T.	CPNS / PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
37	RIDONALDJO SAMODARA, S.KOM.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1

38	CEPI SUGIANTO, S.I.KOM.	CPNS / PENATA KEPROTOKOLAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
39	ADAM ADI PRADANY, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
40	AZMI IBRAHIM, A.MD.A.K.P.	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
41	EVAN MARYO SIANIPAR, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
42	ALDI NOVENDRA, A.MD.	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
43	JIMMI GIDION AVILLA SINAGA, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
44	SRI OKTIANINGSIH, A.MD.A.B.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
45	FADLI, S.I.P.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	IX	STRATA S1
46	PERIH HADI, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
47	SUGIMAN H SYAFRUDIN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
48	SAIFUL ALIMUDIN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
49	NURCHASANAH HAMZAH MARSAOLY	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
50	ASIS IDRIS	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
51	FADLI HANAFAI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
52	HUSEN TUHAREA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	V	SLTA/SEDERAJAT
53	ROSIHAN HAMZAH	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
54	ASHARI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
55	WA MARIAM	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	V	SLTA/SEDERAJAT
56	KADER RADJANG	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	V	SLTA/SEDERAJAT
57	RIDWAN KARIM	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT

Tabel 3.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	MAGISTER S2
2	ISMAIL WAEL, S.H., M.H.	HAKIM	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	MAGISTER S2
3	DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.	HAKIM	PEMBINA (IV/a)	MAGISTER S2

4	DENIHENDRA ST PANDUKO, S.H., M.H.	HAKIM	PEMBINA (IV/a)	MAGISTER S2
5	ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H.	HAKIM	PEMBINA (IV/a)	MAGISTER S2
6	KADAR NOH, S.H.	HAKIM	PEMBINA (IV/a)	STRATA S1
7	LUTFI TOMU, S.H.	HAKIM	PEMBINA (IV/a)	STRATA S1
8	SUHARDIN Z SAPAA, S.H.	HAKIM	PEMBINA (IV/a)	STRATA S1
9	ANDI MUH AMIN AR, S.H.	HAKIM	PEMBINA (IV/a)	MAGISTER S2
10	M. IQBAL BOPENG, S.H.	HAKIM ADHOC PHI	-	STRATA S1
11	R. MOH YAKOB WIDODO, S.H., M.HUM.	HAKIM ADHOC TIPIKOR	-	MAGISTER S2
12	JAYADI MUJENIH, S.H.	HAKIM ADHOC PHI	-	STRATA S1
13	TEGUH SUROSO, S.H., M.H.	HAKIM ADHOC TIPIKOR	-	MAGISTER S2
14	EDY SYAPRAN, S.H.	HAKIM ADHOC TIPIKOR	-	STRATA S1
15	FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.	PANITERA	PEMBINA (IV/a)	STRATA S1
16	PATMA, S.H., M.H.	SEKRETARIS	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	MAGISTER S2
17	HERLINA HERMANSYAH, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
18	JEFRI PRATAMA, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PERDATA	PENATA TINGKAT I (III/d)	MAGISTER S2
19	FAIZAL ALI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
20	ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.	PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
21	MELDA RENNY TANTI, S.H., M.H.	PANITERA MUDA KHUSUS PHI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
22	IBNU, S.T., M.M.	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	MAGISTER S2
23	DEWI ZUBAIDAH, S.T.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
24	BAKHTIAR, S.E.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
25	ZADRAK PALY, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
26	RUSLI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
27	YUVITALIA SYARI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
28	RATIH SOFIYANA DAENG BARANG, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
29	RUSTIANA MADIKOE, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA (III/c)	STRATA S1
30	ERNY HS MAILAHA, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA (III/c)	STRATA S1
31	JULAIHA ABD KADIR, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
32	FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
33	ENONG KAILUL	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	SLTA/SEDERAJAT
34	DAHLAN LAFUKU, A.MD.	JURUSITA	PENATA (III/c)	AHLI MADYA D3

35	EDISON DUWILA, S.H.	JURUSITA	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
36	ASMYATI YUSUF, S.H.	JURUSITA	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
37	SURIDA	JURUSITA	PENATA MUDA (III/a)	SLTA/SEDERAJAT
38	SAMSUDIN DANIEL	JURUSITA	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SLTA/SEDERAJAT
39	MAHRANI BALAKUM, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
40	NURASIA DARWIS, S.ST.	JURUSITA PENGGANTI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
41	SUSAN PUASA KHARIE	JURUSITA PENGGANTI	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SLTA/SEDERAJAT
42	MELIA ANDARI NADA	JURUSITA PENGGANTI	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SLTA/SEDERAJAT
43	SYAIFUL MANABUNG	JURUSITA PENGGANTI	PENGATUR (II/c)	SLTA/SEDERAJAT
44	LANNY ISMAIL, S.E.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
45	RAHMAWATI DAROTA, S.AK.	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
46	DIAN ASRIYANI, S.KOM.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
47	MUHAMMAD ADIB AFIQ, S.H., M.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	MAGISTER S2
48	MOCHAMAD DENI SAPUTRA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
49	GATRA B. SIHOMBING, S.H.	CPNS / ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
50	DEASY FRANTY ABDULKARIM, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
51	TEGUH PRASETIO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
52	NALDES SAMPE TONDOK, S.H.	CPNS / ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
53	ABI DAUD ALFARISI, S.EI.	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
54	ATAMMA AMALIYA, S.T.	CPNS / TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
55	WOLKI J. SILITONGA, A.MD.KOM.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
56	FREDO YUDHI PUTRA S., A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
57	NOVANDRI EDI HASIROLAN PANANGAN SIMANJUNTAK, A.MD.A.B.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
58	DENGGAN NAHASON ARITONANG, A.MD.A.B.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
59	CHIKAL UTAMI PUTERI, A.MD.AK.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
60	UCI WALLY, S.K.M.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
61	SUKARMAN WAIBOT, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
62	JULKIFLI MUKSIN, A.MD.KOM.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	VII	AHLI MADYA D3
63	ABDUL HARIS A MUSA, A.MD.KOM.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	VII	AHLI MADYA D3
64	FARMAN HASAN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
65	DARWIN R ADAM	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT

66	RAHMAN KALI HASAN LUBIS	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
67	ROSDIANA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
68	MAULANA SAMSUDIN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
69	SAFRIL AHMAD	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
70	FAHRIZAL ASHARI SYAHJUAN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
71	RAHMAT SADEK	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
72	RISMAWATI LANAE	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT

Tabel 3.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Soasio Kelas II Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	ASMA FANDUN, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN	PEMBINA (IV/a)	MAGISTER S2
2	CHRISTOPHER SURYA SALIM, S.H., M.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	MAGISTER S2
3	FARDI PRABOWO JATI, S.H., M.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	MAGISTER S2
4	MUHAMMAD ARDHYMAS LAZUARDI, S.H., M.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	MAGISTER S2
5	JOKHA GIDEON WIBAWA PURBA, S.H., M.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	MAGISTER S2
6	MARTOGI ROLAND PAHALA, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
7	PANDU DEWANATA, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
8	KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H., M.H.	PANITERA	PENATA TK. I (III/d)	MAGISTER S2
9	MA'RIFIN ARIF, S.KOM.	SEKRETARIS	PENATA TK. I (III/d)	STRATA S1
10	JONES VICO PAAYS, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PENATA TK. I (III/d)	STRATA S1
11	SISWADI, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	PENATA (III/c)	STRATA S1
12	MUHAMMAD HANGGA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENATA MUDA TK. I (III/b)	STRATA S1
13	RAODA BIN USMAN, S.T.	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	PENATA TK. I (III/d)	STRATA S1
14	NINING FARDIASIH M. SALEH, S.E.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PENATA TK. I (III/d)	STRATA S1
15	SUKIMAN, S.H.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENATA (III/c)	STRATA S1
16	SUHARTI KEMHAY, S.KOM., S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA TK. I (III/d)	STRATA S1
17	SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA TK. I (III/d)	STRATA S1
18	YUYUN RENHOAT, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA (III/c)	STRATA S1
19	MARLINA R. SALEH, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TK. I (III/b)	STRATA S1
20	NOVRY KURNIATI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
21	HAMID SALAM	JURUSITA	PENATA MUDA TK. I (III/b)	SLTA/SEDERAJAT

22	NURBAITY SUKRI	JURUSITA	PENATA MUDA (III/a)	SLTA/SEDERAJAT
23	NOFRIADI DARISE	JURUSITA	PENATA MUDA (III/a)	SLTA/SEDERAJAT
24	ROSMINA SALIM	JURUSITA	PENATA MUDA (III/a)	SLTA/SEDERAJAT
25	SITI SOFIATUN, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	PENATA MUDA TK. I (III/b)	STRATA S1
26	LISNAWATY, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
27	THADY ALFAIDZIN, S.IP.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA MUDA TK. I (III/b)	STRATA S1
28	RAHMI, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA MUDA TK. I (III/b)	STRATA S1
29	MAHENDRA YULFITRA PURNAMA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
30	RAHMAT MUHAMMAD, S.T.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
31	IQBAL SATRIA NUGRAHA, S.T.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
32	AGUS RIAN M.NUR, A.MD.	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
33	JOSUA W SIHOMBING, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
34	KOMANDO MILALA, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
35	KONRIEN NAINGGOLAN, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
36	MUHAMMAD TIRTO HAMID, S.KOM.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
37	SOFIYAN DJAMRUN, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
38	ZULKARNAEN, S.I.P.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
39	MUHIDIN NURU, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
40	REZA KIAY MARDJO, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
41	ASRIYANTO A. RAHMAN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
42	MALIK MANABUNG	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
43	SITI DUNAWATI GAFARUDIN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
44	JAINUDIN ABDULLAH	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
45	RAHMAT SALEH	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
46	IDHAM HAERUDDIN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	V	SLTA/SEDERAJAT
47	IDRIYANI TAIB	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
48	A. RAHMAN UMAR	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT

Tabel 3.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Tahun 2025

NO	N A M A	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	WAHYUDINSYAH PANJAITAN, S.H., M.HUM.	KETUA PENGADILAN	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	MAGISTER S2
2	SETYO RIYALDINO, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1

3	ARTUR PANDE SIMBOLON, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
4	JONATHAN HIERO TAMBUNAN, S.H., M.KN.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
5	ZAGARINO BIMA PRAKASA, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
6	ANGGI PERMANA, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
7	ADITIYA DENI PRASETYA, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
8	ASLAM, S.H.	PANITERA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
9	CHAIRUL DAHRI PAGULILI, S.KOM.	SEKRETARIS	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
10	MOHTAR SOUWAKIL, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PENATA (III/c)	STRATA S1
11	DEDY UMayA	PANITERA MUDA PERDATA	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	SLTA/SEDERAJAT
12	NURLIA A. JUSUF, S.E.	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
13	MUHAMMAD RIDWAN UMAGAP, S.H.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
14	RAHMA, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
15	SILVANI DORIS CLORIS SYARANAMUAL, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
16	HALIL SALIM, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
17	ABU DZAR ALGHIFARI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
18	KAMARUDDIN SOLISA, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
19	IMELDA ERUBUN, S.PI.	JURUSITA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
20	RIVAN KURNIAWAN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
21	DIKI ABIDIN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
22	FAUZI PERDANA, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
23	BIRO DINA MIKO, S.T.	CPNS / TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
24	EDDY RONY SIREGAR, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
25	DODY SITUMEANG, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
26	NAMPATI BASTANTA SEMBIRING, A.MD.A.B.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
27	KARMAN KADER, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
28	JASLIN ARIFIN, S.T.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
29	SANAWIVADA AK YAHYA, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
30	SALMA ABDULLAH, S.PI.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
31	REZA GALLANG HAMZAH, S.KOM.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
32	RISWAN JAFAR	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
33	SANDRA HATALAIBESSY	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
34	OBET MAYA JAWATE	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
35	RUSMAN SUBARJO RAJAK	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
36	SAHRIL ABUBAKAR	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT

Tabel 3.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1.	R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN	PEMBINA (IV/a)	MAGISTER S2
2.	FERDINAL, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PENGADILAN	PEMBINA (IV/a)	MAGISTER S2
3.	CATUR NOVIANTORIS YUSUF PUTRA, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
4.	BRIAN SAIRADO PURBA, S.H., M.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	MAGISTER S2
5.	GILANG TAUFIK HERNAWAN, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
6.	MUHAMMAD ANDY HAKIM, S.H., M.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	MAGISTER S2
7.	DENY GOMGOM RANOMUTUA SILALAH, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
8.	MUHAMMAD HAYKAL, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
9.	IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.KOM., S.H., M.H.	PANITERA	PEMBINA (IV/a)	MAGISTER S2
10.	YULIANTINI BURHAN, S.KOM.	SEKRETARIS	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
11.	MARTHINA BUNGIN, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
12.	ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
13.	DONYLISAN F. ROMKENY, S.H., M.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PENATA TINGKAT I (III/d)	MAGISTER S2
14.	IKSAN, A.MD.	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	PENATA (III/c)	AHLI MADYA D3
15.	ARMA HI. SAFI, S.IP.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENATA (III/c)	STRATA S1
16.	NURJAIMA MAULAGI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
17.	SOLEMAN LA ADI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
18.	MINSAR MANABUNG, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
19.	RAFLI SALDI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
20.	ARI IRWANTO, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
21.	MUHAMMAD I PONO	JURUSITA	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	SLTA/SEDERAJAT
22.	ALIFTYA, S.H.	JURUSITA	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
23.	CAROLINE ROSALINA LESSIL	JURUSITA	PENATA MUDA (III/a)	SLTA/SEDERAJAT
24.	ELEONORA SELIFE	JURUSITA PENGGANTI	PENGATUR (II/c)	SLTA/SEDERAJAT
25.	NOLA LEONORA LEUNUFNA	JURUSITA PENGGANTI	PENGATUR (II/c)	SLTA/SEDERAJAT
26.	AGUNG MUJTABA, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
27.	GOM BANUARAN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
28.	DHONY RACHMAWAN HUTOMO, S.T.	CPNS / TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
29.	HELY DJANGU	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGATUR (II/c)	SLTA/SEDERAJAT
30.	DANIEL PITUA SARAGIH, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
31.	JOSE YOSNANTA DAULAY, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
32.	JANUAR JORDAN SILABAN, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3

33.	YULISTINA YOTLELY	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGATUR (II/c)	SLTA/SEDERAJAT
34.	ISMAN HANAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGATUR (II/c)	SLTA/SEDERAJAT
35.	SUPRIYADI, S.PD.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
36.	EVITA KARETJI, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
37.	ARDYANTO BELIAN ALI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
38.	MARLENI HULUTANI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
39.	ERIKSON PALIAS	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
40.	MUHAMMAD LINGKUNGAN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT

Tabel 3.6 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sanana Kelas II Tahun 2025

NO.	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	DR. TITO ELIANDI, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	DOKTOR S3
2	MARIETZA ADITYA YURISTIA, S.H., M.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	MAGISTER S2
3	ILHAM AKBAR, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
4	DEA REFFA HANGGA WINATA, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
5	FURQON ASSIDDIQY, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
6	FAHRUDIN PORA, S.H.	PANITERA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
7	AMAL SYAH, S.H.	SEKRETARIS	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
8	SHINTA HAJI ALI, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
9	ISRAMAN AMANTO, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	PENATA (III/c)	STRATA S1
10	EKO WALDY, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
11	SOESANTO GAILEA, S.KOM.	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
12	HAIRIL ABDULLAH, A.MD.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENATA (III/c)	AHLI MADYA D3
13	NURLITA, A.MD.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	AHLI MADYA D3
14	MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
15	CHENLY MARTUA SIHOMBING, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1

16	SUPRIADI SUKRI	JURUSITA	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SLTA/SEDERAJAT
17	FIRMAN PRASASTI	JURUSITA PENGGANTI	PENATA MUDA (III/a)	SLTA/SEDERAJAT
18	RANO KAUNAR	JURUSITA PENGGANTI	PENGATUR (II/c)	SLTA/SEDERAJAT
19	FERI ARUMAJAYA, S.H., M.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	MAGISTER S2
20	MUHAMMAD RIZKY MUBAROQ, S.T.	CPNS / TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
21	PRABU GERRIANSYAH, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
22	NUR ARFA BUAMONA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGATUR (II/c)	SLTA/SEDERAJAT
23	IFAN SETIA SASTRA WARUWU, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
24	APRILIANI MUHAMAD, S.IP.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
25	YUNI KURNIAWATY RAMLI, S.S.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
26	UKEN UMALEKHOA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
27	ADRI MUHAMAD	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
28	AMIYUDIN FOKAAYA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
29	JULFA EMBISA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
30	ZULFIKRI YOISANGADJI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
31	RAFIUDIN DUWILA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT

Tabel 3.7 Komposisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Bobong Kelas II Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	Dr. SYAMSUNI, S.H., M.KN.	KETUA PENGADILAN	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	DOKTOR S3
2	ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
3	R MOHAMMAD DEWA BAGAS PERDANA, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
4	MUHAMMAD REDHA AZHARI, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
5	DEVIN HERNANDO, S.H.	HAKIM	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
6	SYAMSUDDIN, S.H.	PANITERA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
7	BUDYSTIRO MOHAMMAD TOFAN, S.H.	SEKRETARIS	PENATA (III/c)	STRATA S1

8	MUHAMMAD ICHSAN SADAR ALAM, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PENATA TINGKAT I (III/d)	STRATA S1
9	ARIF TENGA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	STRATA S1
10	ABDULAH MAMADOA, S.PD., M.PD.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	PEMBINA (IV/a)	MAGISTER S2
11	LA ODE HARJET ODE ISA, S.Si.	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	PENATA (III/c)	STRATA S1
12	IRA NOVIRA, A.MD.KOM.	PANITERA PENGGANTI	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	AHLI MADYA D3
13	BADARUDIN LA ODE, S.I.P.	JURUSITA	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
14	KARSONO, S.T.	CPNS / TEKNIISI SARANA DAN PRASARANA	PENATA MUDA (III/a)	STRATA S1
15	ARJUNA ARDINANTA SEMBIRING, A.MD.A.B.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
16	RICKY JUANDA NAINGGOLAN, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
17	AGUS MARTUA SIMBOLON, A.MD.	CPNS / DOKUMENTALIS HUKUM	PENGATUR (II/c)	AHLI MADYA D3
18	IRWAN KUMKELO, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
19	MARNI UMALEKHAY, S.T.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
20	FAHRI SANGAJI, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	IX	STRATA S1
21	SALMAN UMAWAITINA, A.MD.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	VII	AHLI MADYA D3
22	ZALDY, A.MD.KOM.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	VII	AHLI MADYA D3
23	SYAHDIN FATMONA, A.MD.KOM.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	VII	AHLI MADYA D3
24	M. TARIK	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
25	AQSA PRAYOGA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
26	NADIR A. HANAFI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT
27	AFANDY UMASANGAJI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	V	SLTA/SEDERAJAT

A. MUTASI

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Pada tahun 2025, mutasi pegawai yang masuk dalam Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri di bawahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	SUTAJI, S.H., M.H.	196302231988031001	Wakil Ketua PT Tanjung Karang	Ketua PT Maluku Utara
2	SUTARNO, S.H., M.HUM.	196507211996031001	Hakim PN Jakarta Barat	Hakim Tinggi PT Maluku Utara
3	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	196607301996031002	Hakim PN Jakarta Utara	Hakim Tinggi PT Maluku Utara
4	VERRA LOKOLLO, S.H.	197406092002122002	Sekretaris PN Ternate	Kabag Umum dan Keuangan PT Maluku Utara
5	BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H., M.H.	198810102017121002	Hakim PN Dobo	Hakim Yustisial PT Maluku Utara
6	ULFA MAILANI, S.E.	198202032006042004	Sekretaris PN Tobelo	Kasubag Keuangan dan Pelaporan PT Maluku Utara
7	ALDO JULIAN HASTONO, S.T.	199607042025061008	-	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi PT Maluku Utara
8	RIDONALDJO SAMODARA, S.KOM.	198206262014091001	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PN Bobong	Penata Layanan Operasional PT Maluku Utara
9	CEPI SUGIANTO, S.I.KOM.	200105192025061012	-	Penata Keprotokolanan PT Maluku Utara
10	EVAN MARYO SIANIPAR, A.MD.	199407082025061006	-	Dokumentalis Hukum PT Maluku Utara
11	JIMMI GIDION AVILLA SINAGA, A.MD.	199508042025061006	-	Dokumentalis Hukum PT Maluku Utara
12	PERIH HADI, S.H.	199103212025211035	PPNPN PN Soa Sio	Penata Layanan Operasional PT Maluku Utara
13	SUGIMAN H SYAFRUDIN	199112112025211048	PPNPN PN Ternate	Operator Layanan Operasional PT Maluku Utara
14	HUSEN TUHAREA	199502202025211037	PPNPN PN Tobelo	Pengadministrasi Perkantoran PT Maluku Utara
15	ASHARI	198606132025211055	PPNPN PN Soa Sio	Operator Layanan Operasional PT Maluku Utara
16	KADER RADJANG	198306122025211048	PPNPN PN Soa Sio	Pengadministrasi Perkantoran PT Maluku Utara
17	SAIFUL ALIMUDIN	198312102025211041	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Layanan Operasional PT Maluku Utara
18	NURCHASANAH HAMZAH MARSAOLY	197212082025212006	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Layanan Operasional PT Maluku Utara
19	ASIS IDRIS	197905052025211047	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Layanan Operasional PT Maluku Utara
20	FADLI HANAFAI	198606202025211044	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Layanan Operasional PT Maluku Utara
21	ROSIHAN HAMZAH	199908242025211017	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Layanan Operasional PT Maluku Utara
22	WA MARIAM	198701312025212021	PPNPN PT Maluku Utara	Pengadministrasi Perkantoran PT Maluku Utara
23	RIDWAN KARIM	197811282025211030	PPNPN PT Maluku Utara	Pengadministrasi Perkantoran PT Maluku Utara

Tabel 3.9 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	ISMAIL WAEL, S.H., M.H.	196911152005021001	Hakim PN Ambon	Hakim PN Ternate
2	DOMINGGUS ADRIAN P., S.H., M.H.	198408292009041005	Hakim PN Tondano	Hakim PN Ternate
3	LUTFI TOMU, S.H.	198012122009041008	Hakim PN Sorong	Hakim PN Ternate
4	SUHARDIN Z SAPAA, S.H.	198303212007041001	Hakim PN Kolaka	Hakim PN Ternate
5	ANDI MUH AMIN AR., S.H.	198502282009041008	Hakim PN Bulukumba	Hakim PN Ternate
6	TEGUH SUROSO, S.H., M.H.	-	-	Hakim AdHoc Tipikor PN Ternate
7	EDY SYAPRAN, S.H.	-	-	Hakim AdHoc Tipikor PN Ternate
8	PATMA, S.H., M.H.	197406092002122002	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PT Maluku Utara	Sekretaris PN Ternate
9	DEWI ZUBAIDAH, S.T.	198005022006042003	Kasubag Keuangan dan Pelaporan PT Maluku Utara	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Ternate
10	BAKHTIAR, S.E.	198209122009121004	Sekretaris PN Soa Sio	Kasubag Umum dan Keuangan PN Ternate
11	FAIZAL ALI, S.H.	198202152009121004	Panitera Muda Pidana PN Labuha	Panitera Muda Hukum PN Ternate
12	ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.	197906022009041003	Panitera Muda Perdata PN Soa Sio	Panitera Muda Khusus Tipikor PN Ternate
13	SUKARMAN WAIBOT, S.H.	199204262025211044	PPNPN	Penata Layanan Operasional
14	JULKIFLI MUKSIN, A.MD.KOM.	199803232025211025	PPNPN	Pengelola Layanan Operasional
15	ABDUL HARIS A MUSA, A.MD.KOM.	199405092025211035	PPNPN	Pengelola Layanan Operasional
16	FARMAN HASAN	199403032025211055	PPNPN	Operator Layanan Operasional
17	DARWIN R ADAM	197802082025211022	PPNPN	Operator Layanan Operasional
18	RAHMAN KALI HASAN LUBIS	197601242025211010	PPNPN	Operator Layanan Operasional
19	ROSDIANA	199001292025212037	PPNPN	Operator Layanan Operasional
20	MAULANA SAMSUDIN	199511212025211035	PPNPN	Operator Layanan Operasional
21	SAFRIL AHMAD	199204032025211040	PPNPN	Operator Layanan Operasional
22	FAHRIZAL ASHARI SYAHJUAN	199405242025211037	PPNPN	Operator Layanan Operasional
23	RAHMAT SADEK	199406152025211026	PPNPN	Operator Layanan Operasional
24	RISMAWATI LANAE	199406152025211026	PPNPN	Operator Layanan Operasional

Tabel 3.10 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Soasio Kelas II

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	CHRISTOPHER SURYA SALIM, S.H., M.H.	199802182022031006	Analisis Perkara Peradilan PN Cianjur	Hakim PN Soa Sio
2	FARDI PRABOWO JATI, S.H., M.H.	199508082022031007	Analisis Perkara Peradilan PN Sleman	Hakim PN Soa Sio
3	MUHAMMAD ARDHYMAS LAZUARDI, S.H., M.H.	199710062022031007	Analisis Perkara Peradilan PN Pontianak	Hakim PN Soa Sio
4	JOKHA GIDEON WIBAWA PUTRA, S.H., M.H.	198612082022031002	Analisis Perkara Peradilan PN Kabupaten Kediri	Hakim PN Soa Sio
5	MARTOGI ROLAND PAHALA, S.H.	199507272022031011	Analisis Perkara Peradilan PN Kepanjen	Hakim PN Soa Sio
6	PANDU DEWANATA, S.H.	199507102022031002	Analisis Perkara Peradilan PN Pontianak	Hakim PN Soa Sio
7	MA'RIFIN ARIF, S.KOM.	198307162009121007	Sekretaris PN Labuha	Sekretaris PN Soa Sio
8	KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H., M.H.	198204142011011011	Panitera PN Bobong	Panitera PN Soa Sio
9	MUHAMMAD HANGGA, S.H.	198312132014081001	Panitera Pengganti PN Labuha	Panitera Muda Hukum PN Soa Sio
10	NOFRIADI DARISE	198204212006041002	Jurusita PN Airmadidi	Jurusita PN Soa Sio
11	IQBAL SATRIA NUGRAHA, S.T.	199912162025061010	-	Teknisi Sarana dan Prasarana PN Soa Sio
12	KOMANDO MILALA, A.MD.	199407042025061003	-	Dokumentalis Hukum PN Soa Sio
13	KONRIEN NAINGGOLAN, A.MD.	199708242025061011	-	Dokumentalis Hukum PN Soa Sio
14	JOSUA W SIHOMBING, A.MD.	199705192025061011	-	Dokumentalis Hukum PN Soa Sio
15	MALIK MANABUNG	198510282025211034	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Layanan Operasional PN Soa Sio
16	IDHAM HAERUDDIN	198603092025211028	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Layanan Operasional PN Soa Sio
17	MUHAMMAD TIRTO HAMID, S.KOM.	199806282025211019	PPNPN PN Soa Sio	Penata Layanan Operasional PN Soa Sio
18	SOFIYAN DJAMRUN, S.H.	199210092025211038	PPNPN PN Soa Sio	Penata Layanan Operasional PN Soa Sio
19	ZULKARNAEN, S.I.P.	198902112025211045	PPNPN PN Soa Sio	Penata Layanan Operasional PN Soa Sio
20	MUHDIN NURU, S.H.	199505202025211037	PPNPN PN Soa Sio	Penata Layanan Operasional PN Soa Sio
21	REZA KIAY MARDJO, S.E.	198905052025211074	PPNPN PN Soa Sio	Penata Layanan Operasional PN Soa Sio
22	ASRIYANTO A. RAHMAN	198804282025211047	PPNPN PN Soa Sio	Operator Layanan Operasional PN Soa Sio
23	SITI DUNAWATI GAFARUDIN	198308212025212025	PPNPN PN Soa Sio	Operator Layanan Operasional PN Soa Sio
24	JAINUDIN ABDULLAH	198303162025211043	PPNPN PN Soa Sio	Operator Layanan Operasional PN Soa Sio

25	RAHMAT SALEH	199007182025211041	PPNPN PN Soa Sio	Operator Layanan Operasional PN Soa Sio
26	IDRIYANI TAIB	197501262025212011	PPNPN PN Soa Sio	Operator Layanan Operasional PN Soa Sio
27	A. RAHMAN UMAR	197411122025211015	PPNPN PN Soa Sio	Operator Layanan Operasional PN Soa Sio

Tabel 3.11 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	MUHAMMAD ANDY HAKIM, S.H., M.H.	199609052022031007	Analisis Perkara Peradilan PN Salatiga	Hakim PN Tobelo
2	DENY GOMGOM RANOMUTUA SILALAH, S.H.	199604242022031009	Analisis Perkara Peradilan PN Tangerang	Hakim PN Tobelo
3	BRIAN SAIRADO PURBA, S.H., M.H.	199605062022031004	Analisis Perkara Peradilan PN Purwakarta	Hakim PN Tobelo
4	GILANG TAUFIK HERNAWAN, S.H.	199610292022031005	Analisis Perkara Peradilan PN Salatiga	Hakim PN Tobelo
5	CATUR NOVIANTORIS YUSUF PUTRA, S.H.	199711022022031006	Analisis Perkara Peradilan PN Serang	Hakim PN Tobelo
6	MUHAMMAD HAYKAL, S.H.	199912042022031004	Analisis Perkara Peradilan PN Gresik	Hakim PN Tobelo
7	IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.KOM., S.H., M.H.	198108122009041003	Panitera Muda Khusus Tipikor PN Ternate	Panitera PN Tobelo
8	YULIANTINI BURHAN, S.KOM.	198005022006042003	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Ternate	Sekretaris PN Tobelo
9	ARMAN HI. SAFI, S.IP.	198304162014091001	Penata Layanan Operasional PN Labuha	Kasubag Umum dan Keuangan PN Tobelo
10	DHONY RACHMAWAN HUTOMO, S.T.	199403012025061011	-	Teknisi Sarana dan Prasarana PN Tobelo
11	JOSE YONANTA DAULAY, A.MD.	199508072025061008	-	Dokumentalis Hukum PN Tobelo
12	JANUAR JORDAN SILABAN, A.MD.	199801012025061006	-	Dokumentalis Hukum PN Tobelo
13	DANIEL PITUA SARAGIH, A.MD.	200207292025061009	-	Dokumentalis Hukum PN Tobelo
14	SUPRIYADI, S.PD.	198911282025211041	PPNPN PN Tobelo	Penata Layanan Operasional PN Tobelo
15	EVITA KARETJI, S.H.	198911282025211041	PPNPN PN Tobelo	Penata Layanan Operasional PN Tobelo
16	ARDYANTO BELIAN ALI	199811052025211015	PPNPN PN Tobelo	Operator Layanan Operasional PN Tobelo
17	MARLENI HULUTANI	197703272025212017	PPNPN PN Tobelo	Operator Layanan Operasional PN Tobelo
18	ERIKSON PALIAS	200003102025212017	PPNPN PN Tobelo	Operator Layanan Operasional PN Tobelo
19	MUHAMMAD LINGKUNGAN	199609082025211018	PPNPN PN Tobelo	Operator Layanan Operasional PN Tobelo

Tabel 3.12 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Labuha Kelas II

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	SETYO RIYALDINO, S.H.	199503072022031007	Analisis Perkara Peradilan PN Kraksaan	Hakim PN Labuha
2	ARTUR PANDE SIMBOLON, S.H.	199503312022031004	Analisis Perkara Peradilan PN Pontianak	Hakim PN Labuha
3	JONATHAN HIERO TAMBUNAN, S.H., M.Kn.	199707152022031005	Analisis Perkara Peradilan PN Pontianak	Hakim PN Labuha
4	ZAGARINO BIMA PRAKASA, S.H.	199803282022031010	Analisis Perkara Peradilan PN Blitar	Hakim PN Labuha
5	ANGGI PERMANA, S.H.	199507172022031007	Analisis Perkara Peradilan PN Garut	Hakim PN Labuha
6	ADITIYA DENI PRASETYA, S.H.	199310032022031005	Analisis Perkara Peradilan PN Mungkid	Hakim PN Labuha
7	ASLAM, S.H.	198602112009121003	Panitera Muda Hukum PN Ternate	Panitera PN Labuha
8	CHAIRUL DAHRI PAGULILI, S.KOM.	198209122009121004	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PN Ternate	Sekretaris PN Labuha
9	BIRO DINA MIKO, S.T.	199007022025061003	-	Teknisi Sarana dan Prasarana PN Labuha
10	EDDY RONY SIREGAR, A.MD.	199502232025061005	-	Dokumentalis Hukum PN Labuha
11	DODY SITUMEANG, A.MD.	199804072025061014	-	Dokumentalis Hukum PN Labuha
12	NAMPATI BASTANTA SEMBIRING, A.MD.A.B.	199808122025061008	-	Dokumentalis Hukum PN Labuha
13	KARMAN KADER, S.H.	199201052025211050	PPNPN PN Labuha	Penata Layanan Operasional PN Labuha
14	JASLIN ARIFIN, S.T.	199510212025211029	PPNPN PN Labuha	Penata Layanan Operasional PN Labuha
15	SANAWIVADA AK YAHYA, S.H.	199409172025212037	PPNPN PN Labuha	Penata Layanan Operasional PN Labuha
16	SALMA ABDULLAH, S.PI.	199012142025212041	PPNPN PN Labuha	Penata Layanan Operasional PN Labuha
17	REZA GALLANG HAMZAH, S.KOM.	199106262025211040	PPNPN PN Labuha	Penata Layanan Operasional PN Labuha
18	RISWAN JAFAR	199604232025211033	PPNPN PN Labuha	Operator Layanan Operasional PN Labuha
19	SANDRA HATALAIBESSY	199711082025212024	PPNPN PN Labuha	Operator Layanan Operasional PN Labuha
20	OBET MAYA JAWATE	198112122025211035	PPNPN PN Labuha	Operator Layanan Operasional PN Labuha
21	RUSMAN SUBARJO RAJAK	198904022025211053	PPNPN PN Labuha	Operator Layanan Operasional PN Labuha
22	SAHRIL ABUBAKAR	198712142025211049	PPNPN PN Labuha	Operator Layanan Operasional PN Labuha

Tabel 3.13 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II

NO.	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1.	MARIETZA ADITYA YURISTIA, S.H., M.H.	199501062022031009	Analisis Perkara Peradilan PN Klaten	Hakim PN Sanana
2.	ILHAM AKBAR, S.H.	199805032022031009	Analisis Perkara Peradilan PN Tegal	Hakim PN Sanana
3.	DEA REFFA HANGGA WINATA, S.H.	199201182022031003	Analisis Perkara Peradilan PN Salatiga	Hakim PN Sanana
4.	FURQON ASSIDDIQY, S.H.	199503152022031004	Analisis Perkara Peradilan PN Kraksaan	Hakim PN Sanana
5.	EKO WALDY, S.H.	198609112009121005	Panitera Muda Perdata PN Bobong	Panitera Muda Hukum PN Sanana
6.	ILHAM AKBAR, S.H.	199805032022031009	Analisis Perkara Peradilan PN Tegal	Hakim PN Sanana
7.	MUHAMMAD RIZKY MUBAROQ, S.T.	199510312025061006	-	Teknisi Sarana dan Prasarana PN Sanana
8.	PRABU GERRIANSYAH, A.MD.	199503222025061005	-	Dokumentalis Hukum PN Sanana
9.	IFAN SETIA SASTRA WARUWU, A.MD.	199809132025061007	-	Dokumentalis Hukum PN Sanana
10	APRILIANI MUHAMAD, S.I.P.	199204172025212055	PPNPN PN Sanana	Penata Layanan Operasional PN Sanana
11	YUNI KURNIAWATY RAMLI, S.S.	199606072025212041	PPNPN PN Sanana	Penata Layanan Operasional PN Sanana
12	UKEN UMALEKHOA	199304092025211048	PPNPN PN Sanana	Operator Layanan Operasional PN Sanana
13	ADRI MUHAMAD	198110202025211043	PPNPN PN Sanana	Operator Layanan Operasional PN Sanana
14	AMIYUDIN FOKAAYA	199508032025211034	PPNPN PN Sanana	Operator Layanan Operasional PN Sanana
15	JULFA EMBISA	198403042025211033	PPNPN PN Sanana	Operator Layanan Operasional PN Sanana
16	ZULFIKRI YOISANGADJI	199701132025211032	PPNPN PN Sanana	Operator Layanan Operasional PN Sanana
17	RAFIUDIN DUWILA	199501182025211031	PPNPN PN Sanana	Operator Layanan Operasional PN Sanana

Tabel 3.14 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II

N O	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1.	MUHAMMAD REDHA AZHARI, S.H.	199205242022031004	Analisis Perkara Peradilan PN Banjarmasin	Hakim PN Bobong
2.	DEVIN HERNANDO, S.H.	199701012022031007	Analisis Perkara Peradilan PN Garut	Hakim PN Bobong
3.	R. MOHAMMAD DEWA BAGAS PERDANA, S.H.	199706012022031006	Analisis Perkara Peradilan PN Cirebon	Hakim PN Bobong
4.	SYAMSUDDIN, S.H.	197907072011011005	Panitera Muda Pidana PN Sengkang	Panitera PN Bobong
5	KARSONO, S.T.	199602272025061005	-	Teknisi Sarana dan Prasarana PN Bobong
6	AGUS MARTUA SIMBOLON, A.MD.	199308052025061005	-	Dokumentalis Hukum PN Bobong
7	RICKY JUANDA NAINGGOLAN, A.MD.	199603102025061007	-	Dokumentalis Hukum PN Bobong
8	ARJUNA ARDINANTA SEMBIRING, A.MD.A.B.	199711102025061007	-	Dokumentalis Hukum PN Bobong
9	NADIR A. HANAFI	198906212025211039	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Layanan Operasional PN Bobong
10	IRWAN KUMKELO, S.H.	199109092025211066	PPNPN PN Bobong	Penata Layanan Operasional PN Bobong
11	MARNI UMALEKHAY, S.T.	199003092025212048	PPNPN PN Bobong	Penata Layanan Operasional PN Bobong
12	FAHRI SANGAJI, S.H.	199309252025211036	PPNPN PN Bobong	Penata Layanan Operasional PN Bobong
13	SALMAN UMAWAITINA, A.MD.	199212192025211028	PPNPN PN Bobong	Pengelola Layanan Operasional PN Bobong
14	ZALDY, A.MD.KOM.	198402122025211042	PPNPN PN Bobong	Pengelola Layanan Operasional PN Bobong
15	SYAHDIN FATMONA, A.MD.KOM.	198907052025211051	PPNPN PN Bobong	Pengelola Layanan Operasional PN Bobong
16	M. TARIK	199807152025211022	PPNPN PN Bobong	Operator Layanan Operasional PN Bobong
17	AQSA PRAYOGA	199802102025211023	PPNPN PN Bobong	Operator Layanan Operasional PN Bobong
18	AFANDY UMASANGAJI	198611162025211044	PPNPN PN Bobong	Operator Layanan Operasional PN Bobong

Sedangkan untuk mutasi Pegawai keluar Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H.	196006021986121001	Ketua PT Maluku Utara	Ketua PT Kepulauan Riau
2	SUDIRA, S.H., M.H.	196408141992121001	Hakim Tinggi PT Maluku Utara	Hakim Tinggi PT Pontianak
3	PATMA, S.H., M.H.	197307131994032004	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PT Maluku Utara	Sekretaris PN Ternate
4	FERRY NITA, S.H.	196904011988032001	Panitera Muda Khusus Tipikor PT Maluku Utara	Panitera Pengganti PT Kepulauan Riau
5	DEWI ZUBAIDAH, S.T.	198612212009042004	Kasubag Keuangan dan Pelapora PT Maluku Utara	Kasubag Umum dan Keuangan PN Ternate
6	MALIK MANABUNG	198510282025211034	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Penata Layanan Operasional PN Soa Sio
7	IDHAM HAERUDDIN	198603092025211028	PPNPN PT Maluku Utara	Pengadministrasi Perkantoran PN Soa Sio
8	NADIR A. HANAFI	198906212025211039	PPNPN PT Maluku Utara	Operator Layanan Operasional PN Bobong

Tabel 3.16 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.	197103111994031002	Wakil Ketua PN Ternate	Ketua PN Gorontalo
2	BUDI SETIAWAN, S.H.	197712022003121001	Hakim PN Ternate	Hakim PN Jakarta Selatan
3	IRWAN HAMID, S.H., M.H.	198104252007041001	Hakim PN Ternate	Hakim PN Jakarta Timur
4	IRIANY SIPAYUNG, S.H.	196605291991032003	Panitera PN Ternate	Panitera Muda Hukum PT Manado
5	VERRA LOKOLLO, S.H.	197406092002122002	Sekretaris PN Ternate	Kabag Umum dan Keuangan PT Maluku Utara
6	SAMHADI, S.H., M.H.	-	Hakim AdHoc PN Ternate	Hakim AdHoc PHI PN Surabaya
7	YULIANTINI BURHAN, S.KOM.	198005022006042003	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Ternate	Sekretaris PN Tobelo
8	CHAIRUL DAHRI PAGULILI, S.KOM.	198209122009121004	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PN Ternate	Sekretaris PN Labuha
9	ABD HALIK BUAMONA, S.H.	197909062008051001	Panitera Pengganti PN Ternate	Panitera Pengganti PN Bogor
10	FERAWATI, A.Md.	198109292009042003	Panitera Pengganti PN Ternate	Panitera Pengganti PN Cibinong

Tabel 3.17 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Soasio Kelas II

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	RUDI WIBOWO, S.H., M.H.	197907092005021002	Ketua PN Soa Sio	Hakim PN Malang
2	KEMAL SYAFRUDIN, S.H.	199410152017121003	Hakim PN Soa Sio	Hakim PN Metro
3	MADE RIYALDI, S.H., M.Kn.	199010082017121002	Hakim PN Soa Sio	Hakim PN Tanjung Selor
4	HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H.	199305252017121004	Hakim PN Soa Sio	Hakim PN Kotamobagu
5	UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H.	198603292017121001	Hakim PN Soa Sio	Hakim PN Singaraja
6	ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H.	199402032017122003	Hakim PN Soa Sio	Hakim PN Tanjung
7	ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H.	199408302017122002	Hakim PN Soa Sio	Hakim PN Praya
8	BAKHTIAR, S.E.	198309092006041002	Sekretaris PN Soa Sio	Kasubag Umum dan Keuangan PN Ternate
9	MUHAMMAD ABDUH ABAS, S.H.	197807272002121004	Panitera PN Soa Sio	Panitera PN Singaraja
10	ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.	197906022009041003	Panitera Muda Perdata PN Soa Sio	Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi PN Ternate
11	PERIH HADI, S.H.	199103212025211035	PPNPN PN Soa Sio	Penata Layanan Operasional PT Maluku Utara
12	SUGIMAN H SYAFRUDIN	199112112025211048	PPNPN PN Ternate	Operator Layanan Operasional PT Maluku Utara
13	ASHARI	198606132025211055	PPNPN PN Soa Sio	Operator Layanan Operasional PT Maluku Utara
14	KADER RADJANG	198306122025211048	PPNPN PN Soa Sio	Pengadministrasi Perkantoran PT Maluku Utara

Tabel 3.18 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1.	HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, S.H., M.H.	199003192017121002	Hakim PN Tobelo	Hakim PN Sampit
2.	HENDRA WAHYUDI, S.H.	198905232017121002	Hakim PN Tobelo	Hakim PN Kota Agung
3.	MOHAMMAD SALIM HAFIDI, S.H.	199406262017121004	Hakim PN Tobelo	Hakim PN Menpawah
4.	AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI, S.H.	199511162017121002	Hakim PN Tobelo	Hakim PN Sorong
5.	ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.	197004051992031002	Panitera PN Tobelo	Panitera PN Kolaka
6.	ULFA MAILANI, S.E.	198202032006042004	Sekretaris PN Tobelo	Kasubag Keuangan dan Pelaporan PT Maluku Utara
7.	HUSEN TUHAREA	199502202025211037	PPNPN PN Tobelo	Pengadministrasi Perkantoran PT Maluku Utara

Tabel 3.19 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Labuha Kelas II

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	TITO SANTANO SINAGA, S.H.	198612112017121003	Hakim PN Labuha	Hakim PN Tondano
2	GALANG ADHE SUKMA, S.H.	199502202018021001	Hakim PN Labuha	Hakim PN Trenggalek
3	MANGULUANG, S.H., M.Kn.	199011072017121005	Hakim PN Labuha	Hakim PN Selong
4	KARTIKA WATI, S.H.	199304202017122001	Hakim PN Labuha	Hakim PN Praya
5	MA'ARIFIN ARIF, S.KOM.	198307162009121007	Sekretaris PN Labuha	Sekretaris PN Soa Sio
6	M. SYAHRUL RATUELA, S.H.	198104182009041008	Panitera PN Labuha	Panitera PN Ponorogo
7	FAIZAL ALI, S.H.	198202152009121004	Panitera Muda Pidana PN Labuha	Panitera Muda Hukum PN Ternate
8	MUHAMMAD HANGGA, S.H.	198312132014081001	Panitera Pengganti PN Labuha	Panitera Muda Hukum PN Soa Sio
9	ARMAN HI. SAFI, S.IP.	198304162014091001	Penata Layanan Operasional PN Labuha	Kasubag Umum dan Keuangan PN Tobelo

Tabel 3.20 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1.	IQBAL S. SYAHRONI, S.H., M.KN.	198804182017121004	Hakim PN Sanana	Hakim PN Baturaja
2.	AUFARRIZA MUHAMMAD, S.H., M.H.	199312012017121002	Hakim PN Sanana	Hakim PN Banjarbaru
3.	M. FADLLULLAH, S.H.	198803072017121001	Hakim PN Sanana	Hakim PN Bitung
4	FEBRIAN RAMADHAN, S.H.	199402112017121003	Hakim PN Sanana	Hakim PN Tanjung Selor
5	EDGAR P. HANIBAL, S.H.	199411052017121005	Hakim PN Sanana	Hakim PN Baturaja

Tabel 3.21 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	WILLY MARSAOR, S.H.	198903272017121003	Hakim PN Bobong	Hakim PN Metro
2	HERMAN, S.H.	199105102017121007	Hakim PN Bobong	Hakim PN Bitung
3	PANUSUNAN, S.H.	199502122017121005	Hakim PN Bobong	Hakim PN Poso
4	FIKRAN WARNANGAN, S.H.	19941252017121007	Hakim PN Bobong	Hakim PN Tondano
5	KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H., M.H.	198204142011011011	Panitera PN Bobong	Panitera PN Soa Sio
6	EKO WALDY, S.H.	198609112009121005	Panitera Muda Perdata PN Bobong	Panitera Muda Hukum PN Sanana
7	NURASIH DWI WULANDARI, S.H.	199605042020122017	Panitera Pengganti PN Bobong	Panitera Pengganti PN Tondano

B. PROMOSI

Promosi adalah kenaikan jabatan pegawai ke posisi lebih tinggi dengan tanggung jawab lebih besar sebagai penghargaan kinerja, sementara mutasi adalah perpindahan posisi, bisa horizontal (setara) atau vertikal (naik/turun) karena kebutuhan organisasi, pengembangan kompetensi, atau alasan administratif, seringkali dengan perubahan lokasi atau unit kerja; keduanya adalah alat manajemen SDM untuk pengembangan talenta dan efisiensi organisasi, namun harus didasarkan pada data dan sistem merit agar adil dan efektif, seperti diatur dalam UU ASN untuk PNS.

Dasar hukum pelaksanaan promosi/mutasi diatur terpisah antara Hakim, Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Pegawai Kesekretariatan. Untuk promosi/ mutasi hakim diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan. Pola promosi/mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013, sedangkan untuk Pegawai Kesekretariatan diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/II/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

1. Pengusulan promosi kenaikan pangkat untuk Tahun 2025 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, sebagai berikut :

*Tabel 3.22 Promosi Kenaikan Pangkat dalam Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025*

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG			
		LAMA	TMT	BARU	TMT
1	SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 April 2021	Pembina Utama (IV/e)	1 April 2025
2	AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 April 2021	Pembina Utama (IV/e)	1 April 2025
3	SUDIRA, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 April 2021	Pembina Utama (IV/e)	1 April 2025
4	PATMA, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	1 Oktober 2021	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 Oktober 2025
5	ALIMUDIN BOLY, S.IP., M.H.	Penata (III/c)	1 Oktober 2020	Penata Tingkat I (III/d)	1 Oktober 2025
6	MUHAMMAD AL AKHIRUDDIN HAMSAH, S.H.	Penata (III/c)	1 April 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 April 2025
7	ADITYA AZHAR PRATAMA, S.M.	Pengatur (II/c)	1 Maret 2022	Penata Muda (III/a)	1 Juni 2025
8	RUDI WIBOWO, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	1 April 2021	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 April 2025
9	SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.	Penata (III/c)	1 April 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 April 2025
10	YUYUN RENHOAT, S.H.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2021	Penata (III/c)	1 April 2025
11	LISNAWATY, S.H.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1 April 2021	Penata Muda (III/a)	1 April 2025
12	SITI SOFIATUN, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 April 2021	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2025
13	MOHTAR SOUWAKIL, S.H.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 Oktober 2021	Penata (III/c)	1 Oktober 2025
14	NURLIA A. JUSUF, S.E.	Penata (III/c)	1 Oktober 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 Oktober 2025
15	IMELDA ERUBUN, S.PI.	Penata (III/c)	1 Oktober 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 Oktober 2021
16	SILVANI DORIS CLORIS SYARANAMUAL, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 April 2021	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2025
17	SHINTA HAJI ALI, S.H.	Penata (III/c)	1 April 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 April 2025
18	SOESANTO GAILEA, S.KOM.	Penata (III/c)	1 April 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 April 2025
19	HAIRIL ABDULLAH, A.MD.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2021	Penata (III/c)	1 April 2025
20	RANO KAUNAR	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1 April 2021	Pengatur (II/c)	1 April 2025
21	NURJAIMA MAULAGI, S.H.	Penata (III/c)	1 April 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 April 2025
22	SOLEMAN LA ADI, S.H.	Penata (III/c)	1 April 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 April 2025
23	IKSAN, A.MD.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2021	Penata (III/c)	1 April 2025

24	NOBERT HANGEWA, S.H.	Penata (III/c)	1 Juni 2024	Penata Tingkat I (III/d)	1 November 2025
25	MUHAMMAD ICHSAN SADAR ALAM, S.H.	Penata (III/c)	1 April 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 April 2025
26	YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 Oktober 2021	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Oktober 2025
27	PATMA, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	1 Oktober 2021	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 Oktober 2025
28	JEFRI PRATAMA, S.H., M.H.	Penata (III/c)	1 Oktober 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 Oktober 2025
29	MAHRANI BALAKUM, S.H.	Penata (III/c)	1 Oktober 2021	Penata Tingkat I (III/d)	1 Oktober 2025
30	FERAWATI, A.MD.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2021	Penata (III/c)	1 April 2025
31	DAHLAN LAFUKU, A.MD.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2021	Penata (III/c)	1 April 2025
32	PUJI ASTUTY, A.MD.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2021	Penata (III/c)	1 April 2025
33	SURIDA	Pengatur Tingkat I (II/d)	1 April 2021	Penata Muda (III/a)	1 Juni 2025

2. Pengusulan promosi menduduki jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara keseluruhan sebagai berikut :

Tabel 3.23 Promosi Menduduki Jabatan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	ASMA FANDUN, S.H., M.H.	197802132006042002	Wakil Ketua PN Soasio	Ketua PN Soa Sio
2	MUHAMMAD ABDUH ABAS, S.H.	197807272002121004	Panitera PN Soasio	Panitera PN Singaraja
3	ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.	197906022009041003	Panitera Muda Perdata PN Soa Sio	Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi PN Ternate
4	M. SYAHRUL RATUELA, S.H.	198104182009041008	Panitera PN Labuha	Panitera PN Ponorogo
5	FAIZAL ALI, S.H.	198202152009121004	Panitera Muda Pidana PN Labuha	Panitera Muda Hukum PN Ternate
6	MUHAMMAD HANGGA, S.H.	198312132014081001	Panitera Pengganti PN Labuha	Panitera Muda Hukum PN Soa Sio
7	ARMAN HI. SAFI, S.IP.	198304162014091001	Penata Layanan Operasional PN Labuha	Kasubag Umum dan Keuangan PN Tobelo
8	NURLITA, A.MD.	198607232011012006	Pengolah Data dan Informasi PN Sanana	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

9	MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS, S.H.	199308082020121006	Analisis Perkara Peradilan PN Sanana	Panitera Pengganti PN Sanana
10	CHENLY MARTUA SIHOMBING, S.H.	199003252022031003	Analisis Perkara Peradilan PN Sanana	Panitera Pengganti PN Sanana
11	IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.KOM., S.H., M.H.	198108122009041003	Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi PN Ternate	Panitera PN Tobelo
12	YULIANTINI BURHAN, S.KOM.	198005022006042003	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Ternate	Sekretaris PN Tobelo
15	ARMAN HI. SAFI, S.IP.	198304162014091001	Penata Layanan Operasional PN Labuha	Kasubag Umum dan Keuangan PN Tobelo
16	TEGUH SUROSO, S.H., M.H.	-	-	Hakim AdHoc Tipikor PN Ternate
17	EDY SYAPRAN, S.H.	-	-	Hakim AdHoc Tipikor PN Ternate
18	FAIZAL ALI, S.H.	198202152009121004	Panitera Muda Pidana PN Labuha	Panitera Muda Hukum PN Ternate
19	ALWI UMAR H. ALTING, S.H.	197906022009041003	Panitera Muda Perdata PN Soa Sio	Panitera Muda Khusus Tipikor PN Ternate

C. Pensiun

Pada tahun 2025 telah dikirimkan usulan pensiun sebanyak 2 (dua) orang Pegawai, Pegawai diusulkan kenaikan pangkat pengabdian sekaligus pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. Adapun nama Pegawai yang diusulkan pensiun tersebut antara lain :

Tabel 3.24 Usul Pensiun pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

N O	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS USULAN PENSUN	TMT
1	SUMARTINI WARDIO / 196312311983032010	Penata (III/c)	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Pemberhentian Dengan Hormat dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Dengan Golongan III/d	1 Januari 2026
2	NOBERT HANGEWA, S.H. / 196511301993031004	Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata PN Tobelo	Pemberhentian Dengan Hormat dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Dengan Golongan III/d	1 November 2025

D. DIKLAT

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Secara keseluruhan data Pegawai Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.25 Diklat Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Tahun 2025*

[illegible]

		24. MUHAMMAD RIZKY MUBAROQ, S.T. 25. PRABU GERRIANSYAH, A.MD. 26. IFAN SETIA SASTRA WARUWU, A.MD. 27. KARSONO, S.T. 28. ARJUNA ARDINANTA SEMBIRING, A.MD.A.B. 29. RICKY JUANDA NAINGGOLAN, A.MD. 30. AGUS MARTUA SIMBOLON, A.MD.	PENGADILAN NEGERI SANANA PENGADILAN NEGERI BOBONG	
2	BIMBINGAN TEKNIS PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA TA. 2025	1. SUMARTINI WARDIO 2. NAHRA HUSEN, S.H. 3. YASIN UMAGAPI, S.H. 4. BAYU INDRIANTO, S.H. 5. JEFRI PRATAMA, S.H., M.H. 6. ASLAM, S.H. 7. HERLINA HERMANSYAH, S.H. 8. IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.KOM., S.H., M.H. 9. M. ABDUH ABAS, S.H. 10. JONES VICO PAAYS, S.H. 11. ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H. 12. ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H. 13. MARTHINA BUNGIN, S.H. 14. NOBERT HANGEWA, S.H. 15. M. SYAHRUL RATUELA, S.H. 16. FAIZAL ALI, S.H. 17. MOHTAR SOUWAKIL, S.H. 18. FAHRUDIN PORA, S.H. 19. ISRAMAN AMANTO, S.H. 20. RANO KAUNAR 21. EKO WALDY, S.H. 22. M. ICHSAN SADAR ALAM, S.H. 23. KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H., M.H.	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA PENGADILAN NEGERI TERNATE PENGADILAN NEGERI SOA SIO PENGADILAN NEGERI TOBELO PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI SANANA PENGADILAN NEGERI BOBONG	24 JUNI 2025 s.d. 26 JUNI 2025
3	PELATIHAN SERTIFIKASI SPPA TERPADU SELURUH INDONESIA TA. 2025	1. GILANG TAUFIK HERMAWAN, S.H.	PENGADILAN NEGERI TOBELO	2 SEPTEMBER 2025 s.d. 27 SEPTEMBER 2025
4	PELATIHAN SINGKAT PENDALAMAN SUBSTANSI DAN KEBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (UU NO. 1 TAHUN 2023) BAGI HAKIM PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING DAN PERTAMA GEL. 5 TA. 2025	1. AISA HI MAHMUD, S.H., M.H. 2. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. 3. SUDIRA, S.H., M.H. 4. GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H. 5. MUSTAJAB, S.H., M.H. 6. YUSRIANSYAH, S.H., M.HUM. 7. BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. 8. YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H. 9. KADAR NOH, S.H. 10. BUDI SETIAWAN, S.H. 11. ASMA FANDUN, S.H., M.H. 12. MUHAMMAD ARDHYMAS LAZUARDI, S.H.	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA PENGADILAN NEGERI TERNATE PENGADILAN NEGERI SOA SIO	30 OKTOBER 2025 s.d. 5 NOVEMBER 2025

[illegible]

BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana/uang dalam sebuah instansi pada kurun waktu tertentu.

Bahwa dalam tahapan pengelolaan keuangan sesuai siklus anggaran diawali dari perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan anggaran tahun 2025 masing masing satuan kerja telah melaksanakan anggaran sesuai skala prioritas kebutuhannya.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada umumnya mengelola 2 (dua) DIPA yakni DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- DIPA (01) kode satker 664522 sebesar Rp.14,233,154,000,-
- DIPA (03) kode satker 664523 sebesar Rp.234,560,000,-

Alokasi anggaran untuk 7 (tujuh) satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- DIPA (01) sebesar Rp.62,381,976,000,-
- DIPA (03) sebesar Rp.1,742,265,000,-

Adapun realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Realisasi DIPA 01

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)				
No	Satker	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	14,233,154,000	14,190,279,587	99,70
2	PN. Ternate	10,641,492,000	10,565,106,252	99,28
3	PN. Soasio	6,543,472,000	6,399,119,217	97,79
4	PN. Tobelo	5,626,236,000	5,583,040,783	99,23
5	PN. Labuha	5,682,628,000	5,560,745,218	97,86
6	PN. Sanana	11,873,153,000	10,944,175,401	92,18
7	PN. Bobong	7,781,841,000	7,535,390,558	96,83

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Pegawai

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)				
No	Satker	Belanja Pegawai		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	11,419,566,000	11,376,727,474	99,62
2	PN. Ternate	8,238,874,000	8,162,853,170	99,08
3	PN. Soasio	4,735,424,000	4,599,326,988	97,13
4	PN. Tobelo	4,147,728,000	4,143,902,586	99,91
5	PN. Labuha	3,620,182,000	3,499,039,300	96,65
6	PN. Sanana	3,813,085,000	3,222,507,321	89,51
7	PN. Bobong	3,098,423,000	2,871,215,262	92,67

Tabel 4.3 Realisasi Belanja Barang

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)				
No	Satker	Belanja Barang		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	2,660,588,000	2,660,556,512	100
2	PN. Ternate	2,218,218,000	2,217,854,582	99,98
3	PN. Soasio	1,808,048,000	1,799,792,229	99,54
4	PN. Tobelo	1,478,508,000	1,438,398,035	97,29
5	PN. Labuha	2,031,446,000	2,030,733,588	99,98
6	PN. Sanana	1,907,258,000	1,574,140,881	91,22
7	PN. Bobong	1,516,768,000	1,498,512,738	98,80

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Modal

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)				
No	Satker	Belanja Modal		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	153,000,000	152,995,601	100
2	PN. Ternate	184,400,000	184,398,500	100
3	PN. Soasio	-	-	-
4	PN. Tobelo	-	-	-
5	PN. Labuha	31,000,000	30,972,330	99.91
6	PN. Sanana	6,152,810,000	6,147,387,199	99.91
7	PN. Bobong	3,166,650,000	3,165,662,558	99,97

Adapun realisasi DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Realisasi DIPA 03

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)				
No	Satker	Belanja Barang		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	234,560,000	234,549,630	100
2	PN. Ternate	475,985,000	472,980,000	99,37
3	PN. Soasio	329,114,000	322,030,850	97,85
4	PN. Tobelo	307,880,000	289,477,834	94,02
5	PN. Labuha	62,913,000	61,580,000	97,88
6	PN. Sanana	255,220,000	233,586,500	91,52
7	PN. Bobong	76,593,000	47,087,000	61,48

Tabel 4.6 Nilai Kinerja Satuan Kerja DIPA 01

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)									
No	Satker	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Capaian Output	Nilai Akhir
1	PT. Maluku Utara	100	92,82	100	94,00	100	99,73	100	98,90
2	PN. Ternate	100	94,14	100	100	100	100	100	99,12
3	PN. Soasio	100	83,95	100	100	100	100	76,67	91,76
4	PN. Tobelo	100	85,61	100	100	100	100	100	97,84
5	PN. Labuha	100	84,71	100	100	100	100	100	97,71
6	PN. Sanana	100	63,83	98,00	100	100	100	30,00	76,67
7	PN. Bobong	100	75,12	90,30	100	100	95,33	65,00	85,11

Tabel 4.7 Nilai Kinerja Satuan Kerja DIPA 03

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)									
No	Satker	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Capaian Output	Nilai Akhir
1	PT. Maluku Utara	100	73,95	100	-	-	99,87	100	95,10
2	PN. Ternate	100	89,32	87,81	-	-	99,99	98,57	94,50
3	PN. Soasio	100	55,48	100	-	-	99,42	97,82	90,90
4	PN. Tobelo	100	65,83	86,35	-	100	99,90	95,89	90,12
5	PN. Labuha	100	72,90	89,38	-	-	99,04	100	92,14
6	PN. Sanana	100	49,03	100	-	-	98,00	80,17	84,00
7	PN. Bobong	100	54,94	76,74	-	-	90,28	38,75	65,38

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Tanah

Pengelolaan tanah pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk pula dengan perbuatan hukum yang terkait dengan Sumber Daya Alam itu. Tujuan lain dari diselenggarakannya program pengelolaan pertanahan adalah untuk mewujudkan keteraturan terkait dengan penyelenggaraan dan administrasi yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesinambungan pembangunan Pengelolaan Tanah pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, memiliki tanah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Keadaan Tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	Uraian	Luas (m2)	Lokasi
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	20,413	Jl. Bhayangkara, Sofifi Kec. Oba Utara Tidore Kepulauan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,019	Jl. Bhayangkara, Sofifi Kec. Oba Utara Tidore Kepulauan
3	Tanah Kantor Pemerintah	10.000	Darame Jl. Jalan Muhajirin Baru Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	10.000	Jl. Jalan Muhajirin Baru Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai

Adapun keadaan tanah pada Pengadilan Negeri sewilayah Maluku Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Keadaan Tanah Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	Uraian	Luas (m2)	Lokasi
I	Pengadilan Negeri Ternate		
1	Nuku, Kab. Halmahera Barat	1204 m2	Balai Sidang Jailolo
2	Kel. Tabona, Kota Ternate	6117 m2	Tanah Tipikor
3	Jl. Gelora Kie Raha, Kota Ternate	1712 m2	Bangunan Gedung Kantor
4	Salahudin, Kota Ternate	554 m2	RD. Hakim
5	Salahudin, Kota Ternate	190 m2	RD. Hakim
6	Kompi Bantuan, Kota Ternate	554 m2	RD. Hakim
7	Kolontjutju, Kota Ternate	500 m2	RD. Hakim
8	Batu Anteru, Kota Ternate	200 m2	RD. Panitera
9	Jl. Gelora Kie Raha, Kota Ternate	372 m2	RD. Ketua
10	Salahudin, Kota Ternate	234 m2	RD. Wakil
11	SLTP 05, Kota Ternate	213 m2	RD. Hakim
II	Pengadilan Negeri Tobelo		
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	370	Jln. Bhayangkara Desa Gamsungi., Kec. Tobelo
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	276	Jln Huboto Desa Gosoma, Kec. Tobelo
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	480	Jln. Bhayangkara Desa Gamsungi, Kec. Tobelo
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1304	Jln Kuburan Cina Desa Gosoma, Kec. Tobelo
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	441	Jln Kuburan Cina Desa Gosoma, Kec. Tobelo
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2493	Jln. Siswa Desa Gamsungi, Kec. Tobelo
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1514	Jln. MTQ Desa Darame, Kec. Morotai Selatan
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2380	Jln. Kenari Desa Bere Bere, Kec. Morotai Utara
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3000	Jln. Sangaji Boeng Kec. Kao
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1476	Jln. Yasin Gamsungi Desa Soasio Kec. Galela
III	Pengadilan Negeri Soa Sio		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,809	Jl. A. Yani, Soasio Tidore Kepulauan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,591	Jl. Nurweda, Weda Halmahera Tengah
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,002	Lolobata, Wasile, Halmahera Timur
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,611	Maba, Halmahera Timur
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,501	Jl. Yolendiu, Patani Halmahera Tengah

6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	336	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	406	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	850	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	373	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	406	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	402	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	435	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	731	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	451	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
IV	Pengadilan Negeri labuha		
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	500	Jl. Usman Syah, Labuha
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	288	Jl. Pasar Lama, Labuha
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	200	Jl. Usman Syah, Labuha
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1,625	Jl.Kota Popoh, Labuha
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1,490	Jl. Flamboyan. Labuha
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,130	Jl. Molunjunga, Labuha
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,589	Jl. Emomalamo, Sanana
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	13,530	Jl. Karet Putih, Labuha
V	Pengadilan Negeri Sanana		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.589	Jl. Emolamo,Fogi, Sanana
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.649	Jl. Soeharto, Fatcei, Sanana
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.370	Jl. Desa Pohea, Pohea, Sanana
VI	Pengadilan Negeri Bobong		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10,480	Jalan Talo Nomor 2, Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Kode Pos 97794

2. Kendaraan Dinas

2.1 Kendaraan Dinas Tingkat Banding

Tabel 4.10 Kendaraan Dinas yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Uraian	Tahun	Kondisi			Ket
		Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda Empat					
	Toyota Hi Ace	2020	√			Sewa
	Toyota Pajero	2023	√			Sewa
	Toyota Camry	2023	√			Sewa
	Toyota Baleno	2005	√			Pinjam pakai
	Toyota Altis	2006	√			
	Toyota Fortuner	2017	√			Pinjam pakai
	Toyota Vios	2009	√			

	Toyota Kijang Innova	2005	√			Pinjam pakai
	Toyota Kijang Innova	2010	√			
	Toyota Kijang Innova	2007	√			
	Toyota Avansa	2011	√			
II	Jenis Kendaraan Roda Dua					
	Honda Supra Fit	2005		√		
	Honda Supra Fit	2005		√		
	Honda Supra Fit	2005		√		
	Honda Supra Fit	2007		√		
	Honda Supra Fit	2007		√		
	Suzuki Thunder	2008		√		
	Suzuki Thunder	2008		√		
	Yamaha Mio Soul	2011	√			

2.2 Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri

Tabel 4.11 Kendaraan Dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PN. Ternate					
1.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Toyota Vios	2006	√			
2	Toyota Kijang	2007	√			
3	Toyota Rush	2011	√			
4	Toyota Vios	2006	√			
1.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Honda Supra X	2006	√			
2	Honda Supra Fit	2008	√			
3	Honda Supra Fit	2002		√		
4	Honda Supra Fit	2002	√			
5	Yamaha Soul	2011	√			
6	Honda Supra Fit	2006	√			
7	Honda Supra Fit	2001		√		
8	Honda Supra Fit	2005	√			
9	Honda Revo	2008	√			
10	Honda Supra Fit	2005	√			
2	PN. Soasio					
2.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Daihatsu Xenia	2011	√			
2	Innova Venturer	2020	√			
2.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Yamaha RX King	2003	√			
2	Suzuki Shogun	2008	√			
3	Suzuki Shogun	2008	√			
3	PN. Labuha					
3.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Minibus Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 AT	2025	√			
2	Minibus Toyota Inova	2009	√			
3	Daihatsu Xenia	2011	√			
4	Toyota Kijang Standar	2008			√	
3.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Honda Supra Fit	2005			√	

2	Honda Supra Fit	2005			√	
3	Honda Supra Fit	2005	√			
4	Honda Legenda	2004			√	
5	Honda Supra NF 125	2007	√			
6	Honda Supra NF 125 TR	2008	√			
7	Honda Supra NF 125 TR	2008			√	
8	Honda Blade	2011	√			
9	Honda Blade	2011	√			
4	PN. Tobelo					
4.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Suzuki Ertiga	2014	√			
5	PN. Sanana					
5.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Toyota Rush	2021	√			
5.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Honda Vario	2021	√			
2	Honda Vario	2021	√			
6	PN. Bobong					
6.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Toyota Rush	2019	√			
2	Mitsubishi Expander	2022	√			Sewa
3	Toyota Hilux	2019		√		Pinjam pakai
6.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Sepeda Motor Honda Revo	2019	√			
2	Sepeda Motor Honda Trakter	2019	√			
3	Sepeda Motor Honda Revo	2019		√		Pinjam Pakai
4	Sepeda Motor Yamaha Trakker	2019		√		Pinjam Pakai

3. Keadaan Rumah Negara

3.1 Rumah Negara pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Tabel 4.12 Rumah Negara yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim	7	√			
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			
6	Rumah Dinas Pejabat Es III dan IV	9	√			

3.2 Rumah Negara pada Pengadilan Negeri

*Tabel 4.13 Rumah Negara yang dimiliki Pengadilan Negeri sewilayah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara*

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	PN. Ternate	10	√			
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim	7	√			
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5	Rumah Dinas Sekretaris					Tdk ada
II	PN. Soasio	11				
1	Rumah Dinas Ketua	1		√		
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		√		
3	Rumah Dinas Hakim	8		√		
4	Rumah Dinas Panitera	1		√		
5	Rumah Dinas Sekretaris					Tdk ada
III	PN. Labuha	12				
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim	6			√	
4	Rumah Dinas Panitera	1			√	
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			
6	Rumah Dinas Pegawai	2		√		
IV	PN. Tobelo	8				
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim	4	√			
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			
V	PN. Sanana	-				
1	Rumah Dinas Ketua	-				
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-				
3	Rumah Dinas Hakim	-				
4	Rumah Dinas Panitera	-				
5	Rumah Dinas Sekretaris	-				
VI	PN. Bobong	-				
1	Rumah Dinas Ketua	-				
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-				
3	Rumah Dinas Hakim	-				
4	Rumah Dinas Panitera	-				
5	Rumah Dinas Sekretaris	-				

4. Sarana dan Prasarana

4.1 Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Tabel 4.14 Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
I	Sarana & Prasarana Gedung		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	5	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Sidang Umum	2	
	Ruang Kepaniteraan	4	
	Ruang Kesekretariatan	6	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Arsip Perkara	1	
	Ruang Arsip Umum	1	
	Ruang Dharmayukti Karini	1	
	Ruang Rapat	1	
	Ruang Gudang	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Ajudan	4	
	Ruang Pantry	1	
	Ruang Tamu Terbuka	1	
	Mushola	1	
	Toilet/WC	5	
	Rumah Genset	1	
	Pos Satpam	2	
	Ruang PTSP	1	
	Ruang Command Center	1	
II.	Sarana & Prasarana Fasilitas Kantor		
	Crimping Tolls	1	
	Mesin Pompa Air	1	
	Scanner (Universal Tester)	1	
	Lemari Kayu	24	
	Brandkas	1	
	CCTV	16	
	Papan Visual/Papan Nama	7	
	Mesin Absensi	-	
	Alat Pemotong Kertas	1	
	Meja Kerja Kayu	75	
	Kursi Besi/Metal	172	10 rusak berat
	Kursi Kayu	19	
	Sice	27	
	Bangku Panjang Kayu	4	
	Meja Rapat	7	1 Rusak Berat
	Partisi	1	
	Vacum Cleaner (Untuk Mobil)	5	
	Lemari Es	12	
	AC Sentral	-	
	A.C Split	46	
	Televisi	12	2 Rusak Berat
	Amplifier	2	
	Equalizer	1	
	Loudspeaker	39	
	Microphone	5	
	Mic Wireless	8	

Lambang Garuda Pancasila	4	
Tiang Bendera	4	
Mimbar/Podium	2	
Palu Sidang	11	
Karpert	30	
Vertikal Blind	1	
Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	
Scanner Coir, Presst	4	
Digital Keyboard Technics	1	
Camera Wall Box	2	2 Rusak Berat
Digital Video Effect	1	
Camera Digital	1	
Handy Talky	19	7 Rusak Berat
Facsimile	1	1 Rusak Berat
Switcher Anthena Lainnya	11	
Komputer Jaringan Lainnya	13	
PC Unit	18	1 rusak berat
Laptop	31	
Printer	20	
Server	2	
Router	1	
Rak Server	1	
Acces Point	2	
Pesawat Telephone	24	
PABX	3	
Tabung Pemadam Kebakaran		
Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	20	

4.2 Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Negeri

Tabel 4.15 Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
PENGADILAN NEGERI TERNATE			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Hakim	3	
	Ruang Panitera Pengganti	-	
	Ruang Panitera Muda Perdata	-	
	Ruang Panitera Muda Pidana	-	
	Ruang Panitera Muda Hukum	-	
	Ruang Kesekretariatan	3	
	Ruang Kepaniteraan	5	
	Ruang Sidang Umum	3	
	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Tunggu Saksi Anak	1	
	Ruang Bapas	-	
	Ruang Mediasi/Diversi	1	
	Ruang Lobby	3	
	Ruang Arsip	1	
	Ruang Arsip Eksekusi	-	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Rapat ICPE (Media Center)	1	
	Ruang Posbakum/Tunggu Advokat	1	

	Ruang Tunggu Jaksa	1	
	Ruang Tahanan	3	
	Ruang Tunggu Pengunjung Tahanan	1	
	Gudang	-	
	Kamar Mandi	15	
	Pantry	1	
	Ruang Laktasi	1	
	Mushollah	2	
	Ruang Sekretariat Dharmayukti Cabang Ternate	1	
	Ruang Rapat	1	
II.	Sarana & Prasarana Fasilitas Kantor		
	Lemari penyimpanan	4	
	Mesin foto copy	1	
	Lemari Besi / Metal	12	
	Lemari Kayu	49	
	Rak Besi	29	
	Filing Kabinet Besi	22	
	Filing Kabinet Kayu	7	Rusak Berat
	Brandkas	4	-
	Tabung Pemadam Api	3	-
	Camera Control Television System	2	Rusak Berat 1 Paket
	Papan visual	50	-
	White board	2	Rusak Berat 2 unit
	Alat Pemotong kertas	2	Rusak berat 1 unit
	Hand Metal detector	2	Rusak Berat 2 unit
	Pintu Elektrik	1	-
	Perkakas Kantor lainnya	6	-
	Alat kantor lainnya	6	-
	Meja kerja kayu	106	-
	Kursi besi/metal	131	-
	Kursi Kayu	81	-
	Sice	11	Rusak Berat 5 Unit
	Bangku panjang kayu	55	Rusak berat 12 Unit
	Meja rapat	3	Rusak berat 1 unit
	Meja Komputer	9	Rusak berat 9 unit
	Meja Receptionis	2	-
	AC Central	4	-
	AC Split	55	Rusak berat 26 unit
	Televisi	10	-
	Sound System	3	Rusak Berat 1 Unit
	Lambang Garuda Pancasila	5	-
	Tiang Bendera	12	Rusak Berat 2 Unit
	Dispenser	32	Rusak Berat 8 Unit
	Palu Sidang	8	Rusak Berat 3 Unit
	Lambang Instansi	1	-
	Vertikal Blind	1	-
	Bendera Negara	10	-
	Uninterruptible Power Supply	20	Rusak Berat 12 Unit
	Camera Digital	2	Rusak Berat 1 Unit
	LCD Monitor	3	-
	Facsimile	2	-
	Finger Printer	1	-
	Genset	1	-
	Kursi dorong	1	-
	PC Unit	53	-
	Laptop	33	-
	Printer	42	-
	Scanner	9	-
	Server	2	-
	Kursi Roda	2	-
	Panic Button System, Alarm Indicator	1	-

	Tempat Tidur Besi	1	-
	Kursi Fiber Glas/Plastik	20	Rusak Berat 20 Unit
	Partisi	11	-
	Nakas	8	-
	Meubelair Lainnya	2	Rusak Berat 2 Unit
	Jam Elektronik	4	-
	Kipas Angin	5	Rusak Berat 2 Unit
	Loudspeaker	6	-
	Wireless	1	-
	Microphone	16	-
	Handy Cam	1	Rusak Berat 1 Unit
	Karpet	14	Rusak Berat 14 Unit
	Bracket Standing Peralatan	2	-
	Audio Mixing Console	1	-
	Audio Visual	1	-
	Microphone/Wireless MIC	2	-
	Microphone/Boom Stand	2	-
	Mixer Sound Sistem	1	-
	Camera Conference	4	-
	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	1	-
	Telephone (PABX)	20	Rusak Berat 20 Unit
	Handy Talky (HT)	1	-
	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	1	-
	Network Monitoring System	1	-
	Switching Matrix and Server	1	-
	Walker Polding	6	-
	Personal Computer	6	-
	Internet	1	-
	Note Book	1	Rusak Berat 1 Unit
	Serial Printer	2	-
	Hub	1	-
	Wireless Access Point	1	-
	Automatic Terminal Information Service (ATIS)	1	-
	Aid Hearing	2	-
	Alat Musik Modern/Band	1	-
	Buku Lainnya	19	-
	Monografi	11	-
	Uninterrupted Power Supply	1	-
PENGADILAN NEGERI SOASIO			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Sidang Umum	2	
	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1	
	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1	
	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1	
	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI, & Pelaporan	1	
	Ruang Umum & Keuangan	1	
	Ruang Sub Bagian Kepegawaian & Ortala	1	
	Ruang Pantry	2	
	Mushola	1	
	Toilet/WC	12	
	Rumah Genset	1	
	Pos Penjagaan	2	
	Ruang PTSP	1	
	Ruang Command Center	1	
	Ruang Sidang Anak	1	

	Ruang Jaksa	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Ruang Laktasi	1	
	Ruang Bapas	1	
	Ruang Tahanan	2	
	Ruang Lobi	1	
	Ruang Kasir	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Arsip Perkara	1	
	Ruang Gudang	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Ajudan	1	
II.	Sarana dan Prasarana Gedung		
	Komputer	31	Baik
	Laptop	23	Baik
	Infokus	1	Rusak Berat
	Mesin Fotocopy	1	Sewa/ Baik
	A.C. Split	14	Baik/ 4 Rusak Berat
	A.C. Sentral	4	Baik
	Genset	1	Baik
	Camera Digital	2	1 Rusak Berat
	Sound System	2	Baik
	Printer	22	6 Rusak Berat
	Vacum Cleaner	1	Rusak Berat
	Mesin Finger Print	1	Baik
	Kursi Besi Metal	82	22 Rusak Berat
	Kursi Zeis	20	5 Rusak Berat
	Kursi Kayu	32	23 Rusak Berat
	Meja Kerja Kayu	63	13 Rusak Berat
	Meja Rapat / Meja Mediasi	1	Baik
	Meja Resepsionis	1	Baik
	Hand Metal Detector	1	Baik
	Handycam	1	Rusak Berat
	Scanner Coir Pres	2	Rusak Ringan
	Filling Cabinet	2	Rusak Ringan
	CCTV	4	Baik
	Lemari Kayu	25	5 Rusak Berat
	Server	2	Baik
	Access Point	1	Baik
	Rak Server	2	Baik
	Webcam	1	Rusak Berat
	Televisi	1	Rusak Berat
	Apar	4	Baik
	Brandkas	1	Baik
	Papan Nama Pejabat Pengadilan	1	Baik
	Papan Informasi	1	Baik
	Lambang Garuda	5	Baik
	Lambang Instansi	1	Baik
	Tiang Bendera	1	Baik
	Palu Sidang	3	Baik
	Kas Toga & Jas	7	Baik
	Power Supply	8	Baik
	LCD Monitor	3	Baik
	Kursi Roda	1	Baik
	Tongkat Distabilitas	1	Baik
	Mixer Sound System	1	Baik
	Alat Pengeras Suara/ Mic	8	Baik
	Buku Lainnya	20	Baik
	Scanner	2	Baik
	Camera Conference	2	Baik
	Telephone	2	Baik

PENGADILAN NEGERI TOBELO			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Sidang Umum	3	
	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Tahanan	2	
	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana & Hukum	1	
	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1	
	Ruang Kasir	1	
	Ruang Panitera Pengganti	1	
	Ruang Jurusita	1	
	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI, & Pelaporan	1	
	Ruang Sub Bagian Kepegawaian & Ortala	1	
	Ruang Sub Bagian Umum & Keuangan	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang PTSP	1	
	Ruang Tamu Terbuka	1	
	Ruang Mediasi	1	
	Ruang Jaksa Penuntut Umum	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Ruang Tunggu Anak	1	
	Ruang ATK	1	
	Ruang Laktasi	1	
	Ruang Musholla	1	
	Ruang Arsip	1	
	Ruang Rapat Umum	1	
	Ruang Rapat Pimpinan	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Kamar Mandi/WC	8	
	Bangunan Pos Satpam	1	
	Gudang	1	
II.	Sarana & Prasarana Fasilitas Kantor		
	Lemari Kayu	51	
	Lemari Kayu	51	
	Rak Besi	6	
	Rak Kayu	27	
	Filling Kabinet	5	
	Brandkas	3	
	Tabung Pemadan Api	1	
	CCTV	10	
	Papan Visual	7	
	Whiteboard	5	
	Mesin Absensi (fingerprint)	3	
	Hand Metal Detector	1	
	Infocus	2	
	Meja Kerja Kayu	129	
	Kursi Besi/Metal	120	
	Kursi Kayu	80	
	Sice	9	
	Bangku Panjang Metal	10	
	Bangku Panjang Kayu	34	
	Meja Rapat	2	
	Meja Komputer	2	
	Meja Resepsionis	30	
	Partisi	2	
	Mebeulair Lainnya	2	

	AC Split	25	
	Kipas Angin	10	
	Tape Recorder	1	
	Loudspeaker	2	
	Soundsystem	3	
	Megaphone	1	
	Microphone Table Stand	17	
	Lambang Garuda	3	
	Tiang Bendera	6	
	Tangga Alumunium	1	
	Dispenser	2	
	Mimbar	1	
	Lambang Intansi	1	
	Vertikal Blind	1	
	Audio Amplifier	2	
	UPS	7	
	Power Amplifier	1	
	Camera Electronic	1	
	LCD Monitor	2	
	Telephone	1	
	Genset	1	
	Komputer Lainnya	14	
	PC Unit	40	
	Laptop	27	
	Console Unit	6	
	Scanner	5	
	CPU	7	
	Monitor	7	
	Printer	18	
	Keyboard	6	
	Meja Komputer	13	
	Sever	3	
	Router	1	
	Rak Server	2	
	Monografi	9	
	Software Komputer	1	
PENGADILAN NEGERI LABUHA			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Rapat Internal	1	
	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
	Ruang ICPE	1	
	Ruang Arsip Perkara	1	
	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
	Ruang Sub Bagian PTIP	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
	Ruang Media Center / Teleconference	1	
	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Ruang Sub Bagian Kortala	1	
	Ruang Kesehatan	1	
	Ruang Mediasi	1	
	Ruang Ramah Anak	1	
	Ruang Jaksa	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Ruang Sidang Umum	2	

	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Tunggu/Lobby/PTSP	1	
	Toilet	13	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Laktasi	1	
II.	Sarana dan Sarana Fasilitas Kantor		
	Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	3	
	Lemari Kayu	26	
	Rak Besi	1	
	Rak Kayu	5	
	Filling Cabinet Besi	4	
	Brangkas	2	
	CCTV	2	
	Papan Visul/ Papan Nama	3	
	Mesin Absensi	2	
	Hand Metal Detector	1	
	LCD Projector	1	
	Layar LCD Projector	1	
	Mesin Antrian	1	
	Meja Kerja Kayu	59	
	Kursi Besi/ Metal	177	
	Kursi Kayu	27	
	Sice	5	
	Bangku Panjang Kayu	33	
	Meja Rapat	2	
	Lemari Es	1	
	AC Split	25	
	Televisi	8	
	Tape Recorder	1	
	Amplifier	1	
	Loudspeker	8	
	Soud System	2	
	Microphone	7	
	Microphone Conference	1	
	Unit Power Supply	14	
	Lambang Garuda Pancasila	3	
	Tiang Bendera	2	
	Dispenser	11	
	Palu Sidang	2	
	Lambang Instansi	2	
	Karpet	1	
	Audio Mixing Console	1	
	Pesawat Telephone	3	
	Facsimile	2	
	Genset	1	
	Kursi Dorong	5	
	PC Unit	33	
	Laptop	16	
	Printer	14	
	Scanner	13	
	Server	2	
	Rak Server	2	
PENGADILAN NEGERI SANANA			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Sidang Umum	1	

	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Pidana	1	
	Ruang Perdata	1	
	Ruang Hukum	1	
	Ruang Panitera Pengganti	1	
	Ruang Umum dan Keuangan	1	
	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
	Ruang PTIP	1	
	Ruang Tamu Terbuka	1	
	Ruang Mediasi	1	
	Ruang PTSP	1	
	Ruang Tunggu	1	
	Ruang Tunggu Anak	1	
	Ruang Poliklinik dan Laktasi	1	
	Ruang Teleconference, Bapas	1	
	Ruang Arsip	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Rapat	0	
	Ruang Kejaksaan	0	
	Ruang Pengacara	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Mushola	1	
	Pos Satpam	1	
II.	Sarana dan Sarana Fasilitas Kantor		
	Lemari Besi/Metal	15	
	Rak Besi	1	
	Bracket Standing Peralatan	2	
	Mesin Absensi	1	
	Meja Kerja Kayu	33	
	Kursi Besi/Metal	68	
	A.C Split	11	
	Wireless	3	
	Kabel	2	
	UPS	7	
	LCD Monitor	4	
	P.C Unit	24	
	Laptop	18	
	Serial Printer	9	
	Server	1	
	Router	1	
	Switch	6	
	Microphone	7	
	Speaker	2	
	Amplifier	2	
	Digital Keyboard Technic	1	
	Loudspeaker	1	
	Webcam	1	
	LCD Projector/Infocus	1	
	Kamera Digital	1	
PENGADILAN NEGERI BOBONG			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Hakim	5	
	Ruang Arsip Pidana	1	
	Ruang Arsip Perdata	1	
	Ruang Rapat Pimpinan	1	
	Ruang Teleconference	1	

	Ruang Perencanaan TI dan Pelaporan	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Jurusita	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang ZI	1	
	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
	Ruang Umum dan Keuangan	1	
	Ruang Bendahara	1	
	Ruang Gudang ATK	1	
	Ruang Sidang Utama	1	
	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Sidang 1	1	
	Ruang Sidang 2	1	
	Ruang Mediasi	1	
	Ruang Kaukus	1	
	Ruang Diversi	1	
	Ruang Kesehatan	1	
	Ruang Jaksa	1	
	Ruang Barang Bukti	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Ruang Konferensi Pers	1	
	Ruang Tahanan Anak	1	
	Gudang	1	
	Ruang PTSP	1	
	Kamar Mandi/Toilet Difabel	1	
	Kamar Mandi/Toilet Pengunjung Sidang	4	
	Kamar Mandi/Toilet Pegawai	4	
	Parkiran Khusus Pejabat	-	Tidak Ada
	Parkiran Khusus Pengunjung	-	Tidak Ada
	Ruang Tamu Terbuka	-	Tidak Ada
	Pos Jaga	2	
	Rumah Genset dan Pompa Air	1	
II.	Sarana dan Sarana Fasilitas Kantor		
	Personal Komputer	20	
	Laptop/Notebook	14	
	Printer	9	
	Scanner	2	
	Server	2	
	A.C Cassete	16	
	A.C Split	31	
	Meja Kerja Kayu	50	
	Kursi Besi Metal	130	
	Lemari Kayu	15	
	Lemari Besi Metal	18	
	CCTV	23	
	Synologi	1	
	Televisi	11	
	Sofa	4	
	Kursi Pengunjung/Bangku Panjang	16	
	Kursi Disabilitas	1	
	Brandkas	2	
	Router	2	
	UPS	8	
	Mesin Absensi/Finger Print	1	
	LCD Projector/Infocus	-	
	Camera zoom	1	

5. Indeks Pengelolaan Aset

5.1 Penilaian IPA (Indeks Pengelolaan Aset) pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Maluku Utara nomor 1798/SEK.PT.W28-U/PL1.2.7/XI/2025 tentang Pembentukan Tim Penilaian IPA pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Maka dari itu tim yang telah dipilih telah melaksanakan penilaian pada 7 (tujuh) Satuan Kerja dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.16 Penilaian (Indeks Pengelolaan Aset) Satker di Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025

No	Nama Satker	Parameter							Nilai IPA
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	0.80	0.15	0.75	0.40	0.40	0.30	0.40	3.200
2	Pengadilan Negeri Labuha	0.80	0.375	0.75	0.40	0.40	0.40	0.40	3.525
3	Pengadilan Negeri Bobong	0.80	0.45	0.725	0.20	0.40	0.40	0.40	3.375
4	Pengadilan Negeri Ternate	0.80	0.375	0.75	0.40	0.10	0.40	0.40	3.225
5	Pengadilan Negeri Tobelo	0.80	0.60	0.725	0.20	0.10	0.40	0.40	3.225
6	Pengadilan Negeri Soa Sio	0.80	0.375	0.75	0.40	0.20	0.40	0.20	3.125
7	Pengadilan Negeri Sanana	0.80	0.45	0.725	0.20	0.40	0.40	0.10	3.075

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Dengan kata lain, teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari *hardware* dan *software* untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas.

Perangkat Keras (*hardware*) yang tersedia untuk pengembangan IT di Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai berikut :

Tabel 4.17 Perangkat Keras yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	MERK/TYPE	KET
1	Server	2	HP dan Fujitsu	2 Unit Rusak
2	Rak Server	2		
3	Crimping Tolls	1	Scneider Digilink	
4	Scanner (Universal Tester)	2	Gold Tool, TCT-2690 Pro	
5	CCTV	16	Avtech 103, 105	
6	LCD Projector/Infocus	1	Sony	
7	UPS	5	Prolink	
8	Scanner Coir, Presst	4	Fujitzu	
9	Digital Video Effect	1	DVS 7216-F2	
10	Switcher Antena Lainnya	11	Rujie, TP-Link TL SG108	
11	Komputer Jaringan Lainnya	2		
12	PC Unit	18		
13	Laptop	31	Asus, Lenovo, HP	
14	Serial Printer / Scanner	18	Epson	
15	Printer	2	Epson, Canon	
16	Router	1	Mikrotik	
17	Access Point	8	Rujie	

Sedangkan Perangkat lunak (*software*) berupa sistem informasi yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara antara lain sebagai berikut :

- Sistem Operasi Komputer : Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, dan Google Chrome
- Office : Microsoft Office 2007, 2010, 2016
- PDF Reader : Adobe Reader, PDF Nitro
- Kompresi : Winrar dan Winzip
- Antivirus : Kaspersky, Smadav
- Aplikasi : SIPP, SIKEP, KOMDANAS, SAKTI, Persediaan, SIMAK-BMN, SIMAN, SAIBA, SAS, GPP, SIMAN, E- Rekon, SIMARI, PTSP, SIAP BEN, SIAI, SIBAPER, E-BIMA, SISUPER

Secara umum pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri meliputi aplikasi e-court merupakan implementasi dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini terdiri dari 3 (tiga) fitur utama yaitu: Pendaftaran Perkara (e-filing), Pembayaran Panjar Perkara (e-payment) dan Penyampaian Pemberitahuan/Panggilan Secara Elektronik (e-summons).

Salah satu yang sangat penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Pelayanan Publik, seperti kita ketahui, bahwa masyarakat/para pencari keadilan sudah lama menganggap bahwa aparat pemerintah (Pengadilan) melayani publik secara tidak maksimal. Oleh karenanya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu hal penting yang harus dilaksanakan oleh semua instansi terutama di Pengadilan yang tengah melaksanakan Reformasi Birokrasi juga menyadari betapa pentingnya pelayanan publik ini. Tentunya

dalam hal ini perlu adanya Dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat/pencari keadilan.

Perangkat Keras Pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara :

1. Pengadilan Negeri Ternate

- Server SIPP : 1 Unit
- Server Backup SIPP : 1 Unit
- Mikrotik Router Board : 1 Unit
- Acces point : 5 unit
- Hub/Switch : 1 unit
- Bandwith Internet : 19 Mbps
- Jariangan LAN : 15 Client
- Jaringan W-LAN : 28 Client
- UPS Server : 1 unit
- PC/Laptop Client : 76 unit

Perangkat Lunak pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP sebagai berikut: Sistem Operasi Linux CentOS 7.7, Aplikasi SIPP Versi 3.3.0-1, Database Mysql (MariaDB), Apache, PHP, FileZilla, PuTTY, SQLyog.

2. Pengadilan Negeri Tobelo

a. Perangkat keras yang masih berfungsi

- Personal komputer (PC) : 19 Unit
- Server : 2 Unit
- Notebook (laptop) : 11 Unit

- Monitor tampilan : 2 Unit
- Printer : 1 Unit
- Scanner : 2 Unit
- CCTV : 1 Unit

b. Perangkat lunak

- Sistem Operasi Komputer : Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome
- Office : Microsoft Office 2007, 2010, dan 2016
- PDF Reader : Adobe Reader, Pdf Nitro
- Kompresi : Winrar, Winzip
- Antivirus : Kaspersky, Smadaf
- Aplikasi : SIPP, MIS, PTSP+, eraterang, e-Court, SIKEP, Komdanas, aplikasi RKAKL, Keuangan (SAS, SAIBA, SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan)

3. Pengadilan Negeri Bobong

Perangkat Keras terdiri atas: Server, UPS, Router, Personal Komputer 13 unit, Laptop sebanyak 5 unit, dan perangkat lunak terdiri atas:

- Administrasi Perkara : SIPP/CTS Versi 4.0.1

- Administrasi Keuangan : GPP, SAKPA, SPM, PP 39,
PINPPSPM, Silabi, AFS,
KOMDANAS, SIMARI
- Administrasi Kepegawaian/SDM : SAPK, SIKEP, KOMDANAS
- Administrasi Aset : Persediaan, SIMAK BMN
- Administrasi Perencanaan Anggaran : Aplikasi RKA-K/L

4. Pengadilan Negeri Sanana

Perangkat Keras (hardware) yang tersedia untuk pengisian data SIPP adalah sebagai berikut: Server Centos 2 unit, Laptop 10 unit, PC 14 Unit, Printer 9 unit, UPS 10 unit. Adapun jaringan yang digunakan meliputi:

- LAN (Local Area Network)
- Jaringan Internet Speedy dengan kapasitas 10 Mbps

Perangkat lunak pendukung Teknologi Informasi untuk mendukung penyelesaian pekerjaan di pengadilan sebagai berikut :

- Administrasi Perkara : SIPP / CTS Versi 4.0.1
- Administrasi Keuangan : GPP, SAKPA, SPM, PP39,
PINPPSPM, Silabi, AFS,
KOMDANAS
- Administrasi Kepegawaian/SDM : SIKEP, KOMDANAS
- Administrasi Aset : Persediaan, SIMAK BMN
- Administrasi Perencanaan Anggaran : Aplikasi RKA-K/L

5. Pengadilan Negeri Labuha

a. Perangkat Keras

- 1) Server
- 2) Personal Komputer (PC)
- 3) Notebook/Laptop

b. Perangkat Lunak

1) Sistem Operasi Komputer

- Windows : 26 Unit
- Linux : 1 Unit

2) Aplikasi umum yang terpasang dan digunakan

- Web Browser : Mozilla, internet explorer, Google Chrome
- PDF Reader : Nitro pdf, adobe reader 9
- Office : Open Office, Microsoft Office
- Kompresi : Win rar
- Antivirus : Smadav, McAfee, Avast, Kaspersky

3) Aplikasi Khusus yang terpasang dan digunakan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan di pengadilan :

- Administrasi Perkara : SIPP / CTS, MIS, e-Court
- Administrasi Pelayanan : Aplikasi PTSP
- Administrasi Survey : Aplikasi eSurvey
- Administrasi Keuangan : GPP, SAKTI, KOMDANAS, SAKPA, SPM, SILABI, SIMPONI, PP 39, PINPPSPM, Silabi, AFS

- Administrasi Kepegawaian/ : SAPK, SIKEP, KOMDANAS,
SDM SIMARI
- Administrasi Aset : Persediaan, SIMAK BMN
- Administrasi Perencanaan : SAKTI
Anggaran

6. Pengadilan Negeri Soasio

a. Perangkat keras

- Server SIPP : 1 Unit
- Server Backup SIPP : 1 Unit
- Mikrotik Router Board : 1 unit
- Modem : 1 unit
- Acces point : 1 unit
- Hub/Switch : 1 unit
- PC/Lap Top Client : 34 unit

b. Perangkat Lunak pendukung Teknologi Informasi sebagai berikut :

- Administrasi Perkara : SIPP / CTS Versi 4.0.1
- Administrasi Keuangan : GPP, SAKPA, SPM, PP 39,
PINPPSPM, Silabi, AFS,
KOMDANAS
- Administrasi Kepegawaian/SDM : SAPK, SIKEP, KOMDANAS
- Administrasi Aset : Persediaan, SIMAK BMN
- Administrasi Perencanaan : Aplikasi SAKTI
Anggaran

BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pembenahan dan perbaikan demi peningkatan sistim kerja yang efisien, efektifitas serta produktifitas pada Sumber Daya Manusia Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki standart pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen moderen yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima, sehingga dapat melakukan perbaikan yang cepat dengan melakukan perubahan dan pembaharuan pola pikir, serta inovasi-inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pengguna dan pencari keadilan.

Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. SK/KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan SK Ketua Mahkamah Agung RI No. SK/KMA 026 Tahun 2012 Tentang Standart Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima terus ditingkatkan, terutama pada pelayanan yang masih ada keluhan dari masyarakat antara lain informasi di Pengadilan yang belum transparansi, maka dituntut untuk menyediakan sarana pelayanan yang lebih maksimal kepada publik.

Tabel 5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadilan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Pengadilan					
Tahun 2025					
No	Nama Pengadilan	SKM			
		TW 1	TW2	TW 3	TW4
1	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	3,79%	3,91%	3,87%	3,80%
2	Pengadilan Negeri Ternate	4,00%	4,00%	3,99%	3,92%
3	Pengadilan Negeri Soasio	3,98%	3,97%	3,93%	4,00%
4	Pengadilan Negeri Tobelo	3,90%	3,92%	3,86%	3,99%
5	Pengadilan Negeri Labuha	3,90%	3,93%	3,96%	3,90%
6	Pengadilan Negeri Sanana	3,97%	4,00%	4,00%	3,99%
7	Pengadilan Negeri Bobong	3,99%	3,96%	3,99%	3,99%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa layanan yang diberikan terhadap pengunjung Pengadilan se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah sangat baik, dengan persentase tertinggi adalah 4,00%.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dimana pelayanan prima terus ditingkatkan, terutama pada pelayanan yang masih ada keluhan dari masyarakat antara lain informasi di Pengadilan yang dianggap belum transparansi, maka dituntut untuk menyediakan sarana pelayanan yang lebih maksimal kepada publik.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkewajiban untuk selalu meningkatkan

pelayanan agar dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang sederhana, transparansi, akuntabel, cepat, efisien efektif dan berkeadilan.

Idealnya sebuah badan pengadilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sesuai dengan visi Mahkamah Agung yakni Terwujudnya badan peradilan yang agung. Selain itu salah satu agenda reformasi birokrasi di pengadilan adalah peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diperlukan langkah-langkah yang berani dan strategis yakni diterapkannya sistem pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang transparan dan akuntabel yang didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025, Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan agar lebih cepat, mudah, transparansi, terukur dan terjangkau.

Adapun laporan terkait jenis layanan PTSP untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PTSP Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Jenis layanan di tingkat banding, terdiri dari :

- a) Meja Pelayanan Kesekretariatan
 - Penerimaan surat masuk : 1.213 Surat
 - Surat Keluar : 1.945 Surat

PTSP WA YouTube PTSP MA Badikum Web PT Admin-Web Tipe 1 SIMARI AMPUH eKinerja SIKEP SIPP SIPAPU Biaya Mutasi Gemini

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

REGISTER SURAT MASUK

Tambah Pencarian Detil Cetak Register

Tampilkan 10 entri Cari:

NO	TANGGAL REGISTER	NOMOR AGENDA	NOMOR SURAT	SIFAT SURAT	PERIHAL	PENGIRIM	STATUS
121	Jumat, 02 Januari 2026	1/2026	03/OU/I/2026	Biasa	SURAT KETERANGAN SAKIT AN MUSTAJAB	dr. Rizal Hamdhan Aziz	Dilaksanakan
122	Rabu, 31 Desember 2025	1213/2025	B/246 /XII/OPS.1.2.4./2025	Biasa	UNDANGAN	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU UTARA	Disposisi
123	Selasa, 30 Desember 2025	1212/2025	S288/KPT. W10- U/KP4.1.3/XII/2025	Biasa	PERMOHONAN PINDA TUGAS PEGAWAI KESekretariatan a.n. AZMI IBRAHIM A.MD.A.K.P.	MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	Dilaksanakan
124	Keluar, 30 Desember 2025	1211/2025	12647/0110. A.WD. A. 3/01/2025	Biasa	KEBERSEKUT	MAKAM ALAM	Dilaksanakan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

232	Rabu, 31 Desember 2025	1945/KPT.W28- U/KP5.3/XII/2025	Kepegawaian (Cuti & Izin Bepergian)	DAN WILAYAH BIKROASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	PT MALLUKU UTARA	Pengiriman	Detil
233	Selasa, 30 Desember 2025	1944/PAN.PT.W28- U/HK2/XII/2025	Hukum (Laporan Perkara Bulanan) -Panitera	PENGIRIMAN LAPORAN LAPTAH	PT MALLUKU UTARA	Pengiriman	Detil
234	Senin, 29 Desember 2025	1943/SEKPT.W28- U/ST.KP7.1/12/2025	Kepegawaian (Surat Tugas) - Sekretaris	SURAT TUGAS AN YENI RAHMAWATI	PT MALLUKU UTARA	Pengiriman	Detil
235	Rabu, 24 Desember 2025	1942/KPT.W28- U/KP5.4.3/12/2025	Kepegawaian (Evaluasi Kinerja Pegawai)	PENGIRIMAN BERKAS DOKUMEN KEPEGAWAAN AN. SUTAJI, S.H., M.H	SEKERTARIS PT NUSA TENGGARA BARAT	Pengiriman	Detil
236	Rabu, 24 Desember 2025	1941/SEKPT.W28- U/ST.KP7.1/XII/2025	Kepegawaian (Surat Tugas) - Sekretaris	Surat Tugas	PT MALLUKU UTARA	Pengiriman	Detil
237	Selasa, 23 Desember 2025	1940/KPT.W28- U/KP5.3/12/2025	Kepegawaian (Cuti & Izin Bepergian)	FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI AN AZMI IBRAHIM	PT MALLUKU UTARA	Pengiriman	Detil
238	Selasa, 23	1939/KPT.W28-	Kepegawaian	FORMULIR PERMINTAAN DAN	PT MALLUKU UTARA	Pengiriman	Detil

Gambar 5.1. Aplikasi PTSP Pengadilan Tinggi Maluku Utara

- b) Meja Pelayanan Kepaniteraan : NIHIL
- c) Meja Pelayanan Informasi dan pengaduan : 20 Layanan



Gambar 5.2. Briefing Petugas PTSP Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai berikut: (1). Pelayanan Bagian Kepaniteraan; (2). Pelayanan Informasi dan Pengaduan; (3). Pelayanan Bagian Kesekretariatan dan Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian sebagai berikut :

1) Petugas Bagian Kepaniteraan

Menerima berkas perkara banding, laporan banding, terdakwa ditahan, permohonan penahanan dan perpanjangan penahanan.

2) Bagian Informasi dan Pengaduan

Informasi: Menerima permohonan informasi dari masyarakat.

Pengaduan: Menerima pengaduan dari masyarakat.

3) Petugas Bagian Kesekretariatan

Melakukan pelayanan penerimaan surat masuk, memproses dan mengolah serta mendistribusikan kepada bagian yang dituju dan juga memproses surat keluar.

2. PTSP Pengadilan Negeri Ternate

Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA Tahun adalah:

a) Meja Pelayanan Umum

- Penerimaan surat masuk
- Surat Keluar

b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Tipikor

- Penerimaan pelimpahan perkara
- Pendaftaran permohonan praperadilan

- Penerimaan permohonan upaya hukum
- Penerimaan memori / kontra memori
- Penerimaan permohonan izin penyitaan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
- Penerimaan permohonan izin besuk

c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara
- Pendaftaran permohonan upaya hukum
- Penerimaan memori / kontra memori
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar
- Pendaftaran permohonan Eksekusi
- Pendaftaran Permohonan Konsinyasi
- Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum

d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum

- Pendaftaran Surat Kuasa
- Permohonan Surat Kuasa Insidentil
- Permintaan Salinan Putusan
- Permintaan surat keterangan melalui eraterang
- Permohonan surat keterangan
- Legalisir surat
- Permohonan Penelitian

e) Meja Pelayanan Kepaniteraan PHI

- Pendaftaran perkara
- Pendaftaran permohonan upaya hukum
- Penerimaan memori / kontra memori
- Penerimaan pendaftaran perjanjian bersama

- Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum

f) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

- Penerimaan pelimpahan perkara
- Pendaftaran permohonan praperadilan
- Penerimaan permohonan upaya hukum
- Penerimaan memori / kontra memori
- Penerimaan permohonan izin penyitaan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
- Penerimaan permohonan izin besuk

Aplikasi yang digunakan antara lain :

- Eraterang;
- Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+);
- Aplikasi e-Court;
- Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);
- Aplikasi Survei;

3. PTSP Pengadilan Negeri Soasio

Jenis-Jenis Layanan Peradilan Yang Pelaksanannya Dilakukan

Secara Terpadu, meliputi :

1) Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara gugatan;
- Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
- Pendaftaran verset atas putusan verstek;
- Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
- Pendaftaran perkara permohonan;

- Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
- Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- Pendaftaran permohonan eksekusi;
- Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;

2) Kepaniteraan Pidana

- Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- Pendaftaran permohonan praperadilan;
- Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti;
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
- Penerimaan permohonan izin besok;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

3) Kepaniteraan Hukum

- Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
- Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
- Permohonan pendaftaran penolakan waris;
- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
- Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
- Permohonan legalisasi surat;
- Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
- Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;

4) Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Penerimaan surat masuk dan Disposisi secara elektronik;
- Pengiriman surat keluar, berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Pengisian Buku Tamu.

Aplikasi yang digunakan antara lain :

- Eraterang;
- Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+);
- Aplikasi e-Court;
- Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);
- Aplikasi Survei;
- Aplikasi PANGSID (Panggilan Sidang)

4. PTSP Pengadilan Negeri Tobelo

Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing meja pelayanan

PTSP Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II adalah:

a) Meja Pelayanan Umum

- Penerimaan surat masuk
- Surat Keluar

b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata dan E-Court

- Pendaftaran perkara
- Pendaftaran permohonan upaya hukum
- Penerimaan memori / kontra memori
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar
- Pendaftaran permohonan Eksekusi

- Pendaftaran Permohonan Konsinyasi
- Permohonan pencabutan perkara dan upaya hukum

c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum

- Pendaftaran Surat Kuasa
- Permohonan Surat Kuasa Insidentil
- Permintaan Salinan Putusan
- Permintaan surat keterangan melalui eraterang
- Permohonan surat keterangan
- Legalisir surat
- Permohonan Penelitian

d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

- Penerimaan pelimpahan perkara
- Pendaftaran permohonan praperadilan
- Penerimaan permohonan upaya hukum
- Penerimaan memori / kontra memori
- Penerimaan permohonan izin penyitaan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
- Penerimaan permohonan izin besuk

Aplikasi yang digunakan antara lain :

- Eraterang;
- Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+);
- Aplikasi e-Court;
- Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);

- Aplikasi Survei;

5. PTSP Pengadilan Negeri Labuha

Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing meja pelayanan

PTSP Pengadilan Negeri Labuha Kelas II adalah :

a) Meja Pelayanan Umum

- Penerimaan surat masuk
- Surat Keluar

b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara
- Pendaftaran permohonan upaya hukum
- Penerimaan memori / kontra memori
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar
- Pendaftaran permohonan Eksekusi
- Pendaftaran Permohonan Konsinyasi
- Permohonan pencabutan perkara dan upaya hukum

c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum

- Pendaftaran Surat Kuasa
- Permohonan Surat Kuasa Insidentil
- Permintaan Salinan Putusan
- Permintaan surat keterangan melalui eraterang
- Permohonan surat keterangan
- Legalisir surat
- Permohonan Penelitian

d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

- Penerimaan pelimpahan perkara
- Pendaftaran permohonan praperadilan
- Penerimaan permohonan upaya hukum
- Penerimaan memori / kontra memori
- Penerimaan permohonan izin penyitaan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
- Penerimaan permohonan izin besuk

Jenis-Jenis Layanan Peradilan Yang Pelaksanannya Dilakukan

Secara Terpadu meliputi :

a) Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara gugatan;
- Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
- Pendaftaran verset atas putusan verstek;
- Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
- Pendaftaran perkara permohonan;
- Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;

- Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- Pendaftaran permohonan eksekusi;
- Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;

b) Kepaniteraan Pidana

- Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- Pendaftaran permohonan praperadilan;
- Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti;
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
- Penerimaan permohonan izin besuk;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

c) **Kepaniteraan Hukum**

- Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
- Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
- Permohonan pendaftaran penolakan waris;
- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
- Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
- Permohonan legalisasi surat;
- Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
- Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;

d) **Sub Bagian Umum dan Keuangan**

- Penerimaan surat masuk dan Disposisi secara elektronik;
- Pengiriman surat keluar, berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Pengisian Buku Tamu.

Aplikasi yang digunakan antara lain :

- Eraterang;

- Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+);
- Aplikasi e-Court;
- Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);
- Aplikasi Survei;

Dalam hal penerapan Reward and punishment, setiap bulan dilaksanakan evaluasi terhadap seluruh petugas PTSP, yang kemudian dinilai oleh Tim penilai internal untuk selanjutnya diberikan penghargaan kepada Petugas PTSP terbaik dan pembinaan terhadap Petugas PTSP yang nilainya masih dibawah rata-rata. Selain itu, sebagai bentuk komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.

6. PTSP Pengadilan Negeri Sanana

Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Negeri Sanana Kelas II adalah :

- a) Meja Pelayanan Umum, melayani :
 - Penerimaan surat masuk
 - Surat Keluar
- b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata, melayani :
 - Pendaftaran perkara
 - Pendaftaran permohonan upaya hukum
 - Penerimaan memori / kontra memori
 - Permohonan dan pengambilan sisa panjar
 - Pendaftaran permohonan Eksekusi
 - Pendaftaran Permohonan Konsinyasi
 - Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum

c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum, melayani :

- Pendaftaran Surat Kuasa
- Permohonan Surat Kuasa Insidentil
- Permintaan Salinan Putusan
- Permintaan surat keterangan melalui eraterang
- Permohonan surat keterangan
- Legalisir surat
- Permohonan Penelitian

d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana, melayani :

- Penerimaan pelimpahan perkara
- Pendaftaran permohonan praperadilan
- Penerimaan permohonan upaya hukum
- Penerimaan memori / kontra memori
- Penerimaan permohonan izin penyitaan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
- Penerimaan permohonan izin besuk

Aplikasi yang digunakan antara lain :

- Eraterang;
- Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+);
- Aplikasi e-Court;
- Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);
- Aplikasi Survei;

7. PTSP Pengadilan Negeri Bobong

Meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Bobong Kelas II adalah:

- a) Meja Pelayanan Umum
 - Penerimaan surat masuk
 - Surat Keluar
- b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata
 - Pendaftaran perkara
 - Pendaftaran permohonan upaya hukum
 - Penerimaan memori / kontra memori
 - Permohonan dan pengambilan sisa panjar
 - Pendaftaran permohonan Eksekusi
 - Pendaftaran Permohonan Konsinyasi
 - Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum
- c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum :
 - Pendaftaran Surat Kuasa
 - Permohonan Surat Kuasa Insidentil
 - Permintaan Salinan Putusan
 - Permintaan surat keterangan melalui eraterang
 - Permohonan surat keterangan
 - Legalisir surat
 - Permohonan Penelitian
- d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :
 - Penerimaan pelimpahan perkara
 - Pendaftaran permohonan praperadilan
 - Penerimaan permohonan upaya hukum
 - Penerimaan memori / kontra memori

- Penerimaan permohonan izin penyitaan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
- Penerimaan permohonan izin besuk

Aplikasi yang digunakan antara lain :

- Eraterang;
- Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+);
- Aplikasi e-Court;
- Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);
- Aplikasi Survei;

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara terus melakukan pembenahan dan perbaikan demi peningkatan sistim kerja yang efisien, efektifitas serta produktifitas pada SDM aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki standart pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima, sehingga dapat melakukan perbaikan yang cepat dengan melakukan perubahan dan pembaharuan pola pikir, serta inovasi-inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pengguna dan pencari keadilan.

1. Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Penyelenggaraan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabel yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Penyelenggaraan

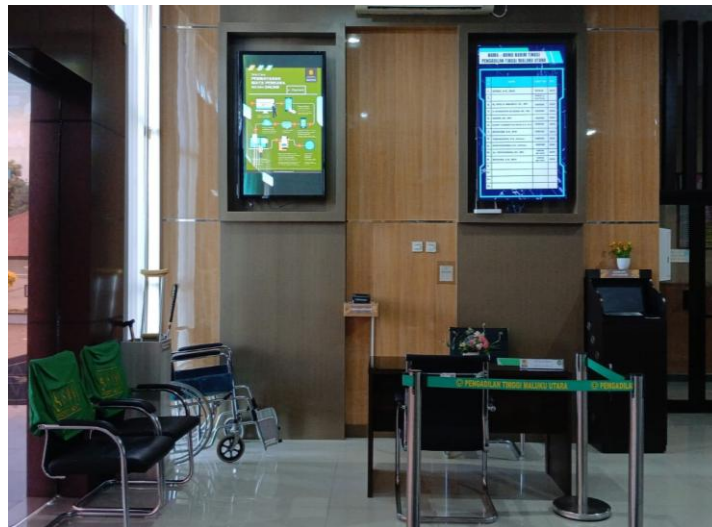
pelayanan publik merupakan hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum guna mendapatkan berbagai informasi yang dicari, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya suatu inovasi mengenai pelayanan publik sebagai solusi untuk mengefektifkan peneyelenggaraan pelayan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Adapun dalam hal Inovasi pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyediakan fasilitas layanan, antara lain sebagai berikut :

- a) Menyediakan layanan monitor/layar informasi sebagai sarana informasi penanganan dan penyelesaian perkara yang dapat diakses oleh pencari keadilan maupun kepada masyarakat secara umum;
- b) Menyediakan kursi roda dan tongkat sebagai alat bantu bagi tamu disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- c) Menyediakan sarana jalur disabilitas, kursi tunggu khusus disabilitas, antrian khusus disabilitas, dan parkir khusus disabilitas dan ibu hamil;
- d) Menyediakan bingkisan sebagai kompensasi atas keterlambatan layanan;
- e) Menyediakan air minum dan media baca berupa koran dan majalah di ruang tamu terbuka;
- f) Aplikasi survei kepuasan masyarakat, lewat PC dan lewat website Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- g) Menyediakan pamflet-pamflet/brosur pelayanan dalam hal pelayanan informasi kepada masyarakat;

- h) Memfasilitasi WIFI gratis bagi pengunjung, kotak anti gratifikasi, dan kotak pengaduan dan saran;
- i) Memfasilitasi layanan charging HP dan mini coffee untuk pengunjung;

Dengan menerapkan standar pelayanan publik yang baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.



Gambar 5.3. Monitor Informasi



Gambar 5.4. Kursi roda bagi penyandang disabilitas



Gambar 5.5. Kursi tamu bagi penyandang disabilitas



Gambar 5.6. Tongkat bagi penyandang disabilitas dan payung



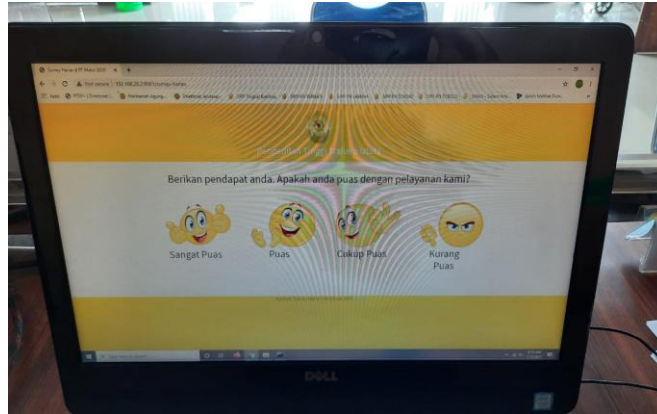
Gambar 5.7. Alat bantu pendengaran Tunarungu



Gambar 5.8. Alat Peraga Tunanetra



Gambar 5.9. Mesin antrian



Gambar 5.10. Monitor Touch screen untuk aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat



Gambar 5.11. Kotak Gratifikasi



Gambar 5.12. Kotak Pengaduan dan Saran



Gambar 5.13. Layanan media baca buku, koran dan majalah



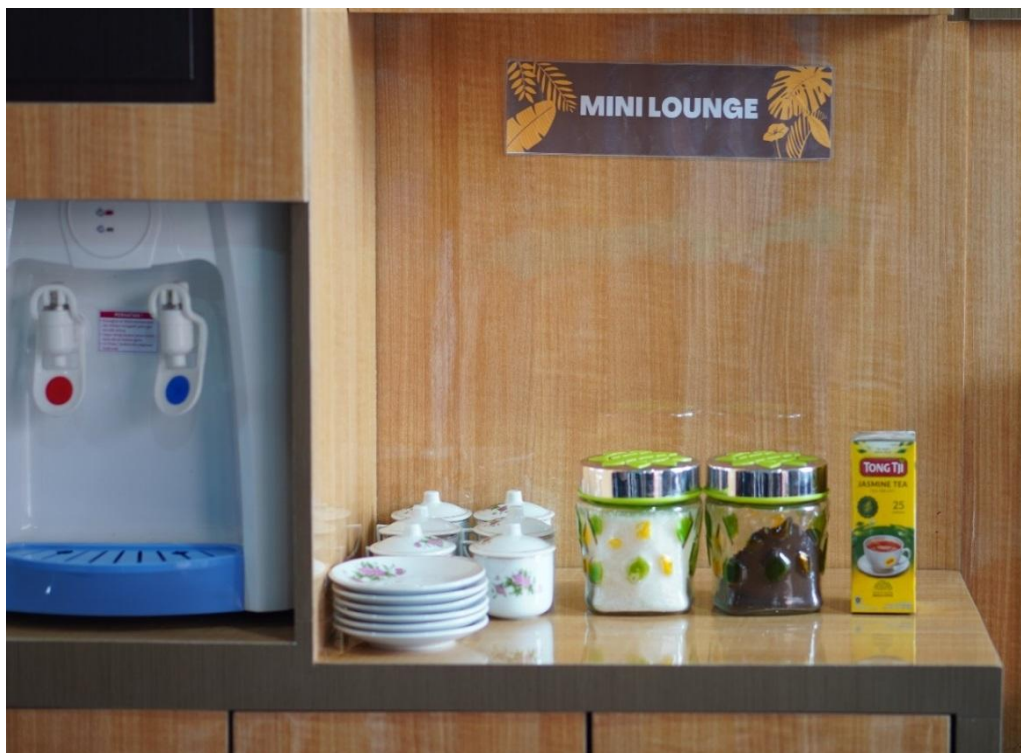
Gambar 5.14. Ruang tamu terbuka



Gambar 5.15. Bingkisan kompensasi atas keterlambatan layanan



Gambar 5.15. Layanan Charge HP



Gambar 5.16. Layanan air minum



Gambar 5.17. Pamflet dan Brosur pelayanan

Selain fasilitas inovasi layanan tersebut di atas, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadikan pelayanan publik sebagai unggulan kinerjanya, maka dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, tepat waktu dan disiplin, diciptakan beberapa inovasi mandiri dan menerapkan berbagai inovasi tersebut, mulai dari Aplikasi E-PTSP dan aplikasi-aplikasi lain yang menyangkut *core business* pada Kepaniteraan maupun pada kinerja pendukung di kesekretariatan, yaitu sebagai berikut :

1. SIPP : Aplikasi mengenai administrasi perkara secara elektronik yang pengisiannya dilakukan secara tepat waktu sesuai SOP dan aturan yang berlaku.
2. E Berpadu : Aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin penyitaan, penggeledahan, secara elektronik.
3. SISUPER : Aplikasi mengenai survey pelayanan elektronik untuk SKM, SAPK dan survey harian.

4. SIKEP : Aplikasi mengenai pengelolaan data Kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung.
5. E BIMA : Suatu sistem untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Mahkamah Agung.
6. SAKTI : Aplikasi yang berbasis android untuk mendukung implementasi pengelolaan Keuangan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
7. SIMAN BMN : Aplikasi mengenai pengelolaan BMN.
8. Aplikasi Surat PTSP : Aplikasi Disposisi Surat Masuk dan Monitoring Surat Keluar.
9. Buku Tamu Online : Aplikasi Buku Tamu Online.
10. SIPAPU : Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.
11. Komdanas : Komunikasi Data Nasional MA.
12. LLK : Laporan Lembar Kerja Harian secara elektronik.
13. E-Court : Elektronik Pengadilan.
14. SIWAS : Sistem Informasi Pengawasan dari BAWAS MA.
15. LAPOR : Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat dari Kementerian Setneg.
17. Aplikasi AMPUH : Sistem Informasi Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh.

Di samping itu, pelaksanaan transparansi kinerja pelayanan publik yang bersifat inovatif juga telah dilaksanakan secara transparansi melalui media social, yakni Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram dan Website Pengadilan Tinggi Maluku utara, yang diperbaharui secara rutin.

2. Pengadilan Negeri Ternate

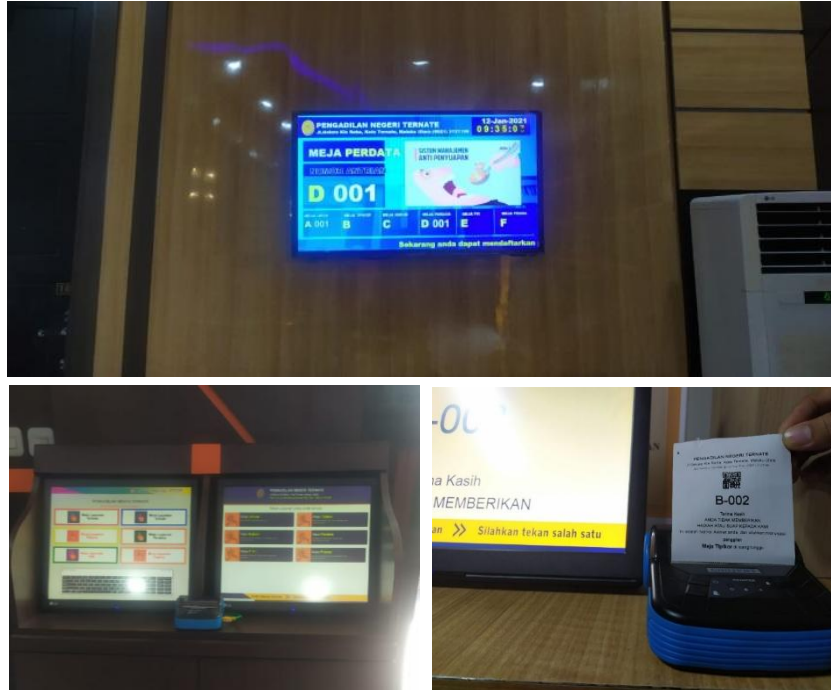
Pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ternate bertujuan untuk memuaskan keinginan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KMPAN) No 62 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik setidaknya mengandung sendi-sendi:

1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
2. Kejelasan yang mencakup;
3. Rincian biaya atau tarif pelayanan publik;
4. Prosedur/ tatacara umum, baik teknis maupun administrasi
5. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
6. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;
7. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas;
8. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

Dalam memberikan Pelayanan Publik yang maksimal kepada Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Ternate juga melakukan

beberapa inovasi-inovasi sebagai wujud pengabdianannya, beberapa Inovasi yang telah dilakukan antara lain:

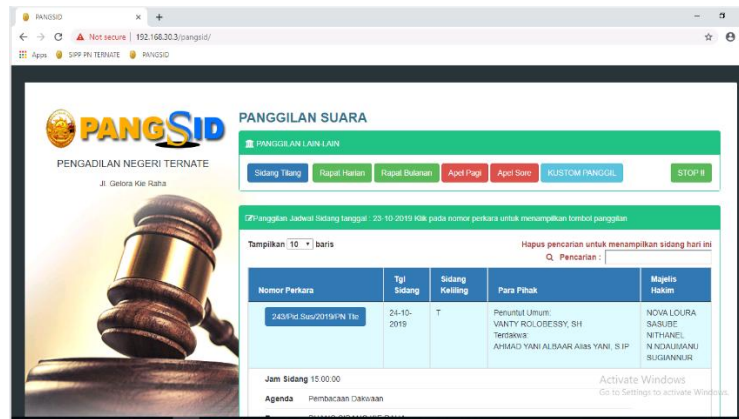
1) Aplikasi Antrian PTSP



Gambar 5.18. Aplikasi Antrian PTSP

Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini proses pelayanan lebih teratur, para pengguna layanan pengadilan tidak lagi berebutan untuk mendapatkan pelayanan, karena para pengguna diwajibkan mengambil nomor antrian dan duduk di kursi tunggu dan ketika tiba saat untuk giliran untuk dilayani maka sistem akan otomatis memanggil nomor antrian tersebut.

2) Aplikasi Panggilan Sidang dan Informasi



Gambar 5.19. Aplikasi Panggilan Sidang dan Informasi

Aplikasi Panggilan Sidang dan Informasi (Pangsid), fungsi dari aplikasi ini adalah ketika para pihak sudah lengkap dan siap untuk sidang maka tidak lagi dipanggil secara manual akan tetapi panggilan otomatis dari aplikasi pangsid tersebut, dan juga untuk panggilan rutin seperti apel serta panggilan lainnya bisa kostum panggil dari aplikasi ini.

3) Kotak Gratifikasi



Gambar 5.20. Kotak Gratifikasi

Kotak Gratifikasi merupakan salah bentuk implementasi penerapan Sistem manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

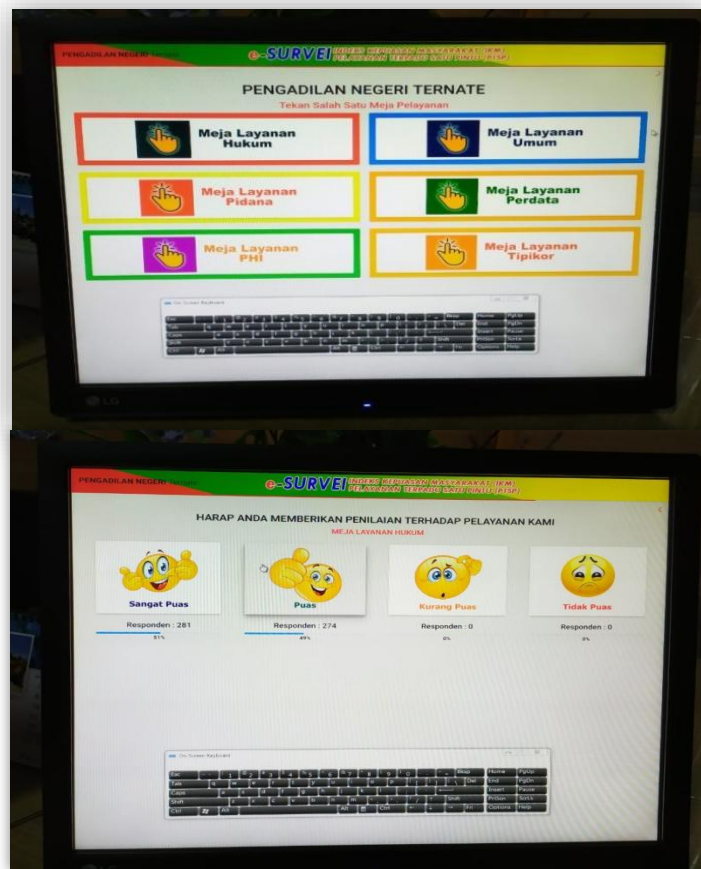
4) Electronic Banner System (BESTEM)



Gambar 5.21. Electronic Banner System

Dengan terbatasnya area publik untuk menampilkan informasi-informasi dalam bentuk banner maka Inovasi banner elektronik sebagai pengganti banner manual yang dapat menampung banyak banner sekaligus dalam satu media tanpa memakan banyak ruang dan biaya yang harus dikeluarkan setiap pencetakan banner secara manual.

5) Aplikasi Survei Kepuasan bagi pengguna PTSP



Gambar 5.22. Aplikasi Survei

Aplikasi ini hadir sebagai pengganti kuisioner yang biasanya dalam bentuk kertas dan sangat menyulitkan dalam proses pengisian dan rekapan, dengan aplikasi ini dapat mengurangi penggunaan kertas dan sangat mudah dalam proses rekapan.

6) Aplikasi Permohonan Layanan Informasi



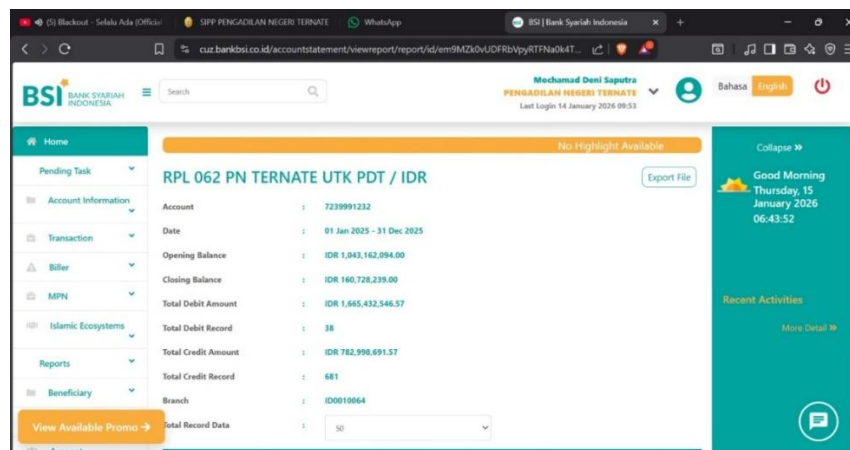
Gambar 5.23. Aplikasi Permohonan Layanan Informasi

Aplikasi pelayanan permohonan informasi publik secara online mempermudah masyarakat sebagai pencari keadilan maupun pengguna layanan pengadilan memiliki opsi pilihan untuk mendapatkan layanan informasi publik. Masyarakat hanya cukup mengakses link atau website yang telah ditetapkan yang kemudian mengisi serta melampirkan berkas-berkas yang disyaratkan dan menunggu permohonan tersebut untuk di tindak lanjuti. Apabila terdapat kekurangan dalam dokumen persyaratan maka akan dihubungi untuk diberikan kesempatan untuk melengkapi tetapi apabila permohonan tersebut berdasarkan uji konsekuensi informasi termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan atau tidak terdapat kepentingan yang diterima maka permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan memberikan penjelasan penolakan.

7) Petunjuk Permohonan Izin Besuk Tahanan

Adanya penyesuaian dan peningkatan fasilitas untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya pengguna layanan izin besuk, melalui video tata cara penginputan izin besuk pada e-berpadu diharapkan mampu memudahkan pencari keadilan khususnya pengguna layanan izin besuk dalam memperoleh dan mengakses layanan pengadilan secara adil.

8) Pengembalian Sisa Panjar Biaya melalui Cashless Management System (CMS)



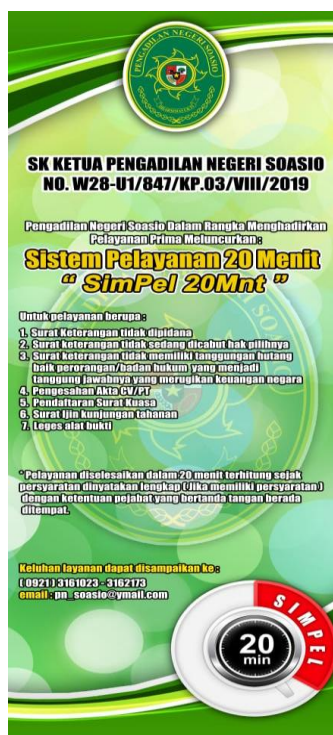
Gambar 5.24. Aplikasi Pengembalian Sisa Panjar

Pengembalian sisa panjar biaya perkara melalui CMS (Cash Management System) adalah mekanisme pengembalian uang sisa biaya sidang secara non-tunai melalui transfer bank langsung ke rekening pihak berperkara. Proses ini dilakukan oleh kasir pengadilan dengan sistem verifikasi berjenjang (Maker, Checker, dan Approver) untuk memastikan keamanan dan akurasi transaksi, sehingga menciptakan birokrasi yang transparan, bebas pungutan liar, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat karena tidak perlu lagi mengantre atau datang langsung ke kantor pengadilan untuk mengambil sisa biaya secara tunai.

3. Pengadilan Negeri Soasio

Adapun Inovasi pada Pengadilan Negeri Soasio Kelas II termuat dalam daftar sebagai berikut :

1) Sistem Pelayanan Dua Puluh Menit (Simpel)



Gambar 5.25. Sistem Pelayanan Dua Puluh Menit (Simpel)

Sistem Pelayanan Dua Puluh Menit (Simpel) merupakan kebijakan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Kelas II yang pada pokoknya lamanya waktu proses penyelesaian pelayanan pembuatan surat keterangan dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) menit (jika permohonan atau persyaratan surat keterangan telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor: W28-U1/847/KP.03/VIII/2020, pelayanan yang diberikan dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tidak Dipidana;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang baik atas nama perorangan/badan hukum menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- Pengesahan akta CV/PT;
- Pendaftaran Surat Kuasa;
- Leges Alat Bukti.

2) Aplikasi E-Kapita PN Soasio

Merupakan sebuah engine (mesin) yang bekerja layaknya HUMAS yang terintegrasi dengan sebuah sistem yang akan memberikan segala kebutuhan informasi bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Soasio secara Virtual. e-KAPITA merupakan singkatan dari Elektronik Komunikasi Data Dan Pengaduan. KAPITA sendiri memiliki makna Pemimpin atau yang membawa perubahan sehingga diharapkan e-KAPITA dapat membawa perubahan di PN SOASIO khususnya perubahan dalam kemudahan dalam mengakses informasi elektronik di Pengadilan Negeri Soasio. Adapun yang dapat dilayani oleh e-Kapita adalah informasi seputar Status Perkara, Biaya Perkara, Denda Tilang, Surat Keterangan, serta Pengaduan & Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat & Survey Persepsi Anti

Korupsi.



Gambar 5.26. Virtual Assistant e-KAPITA

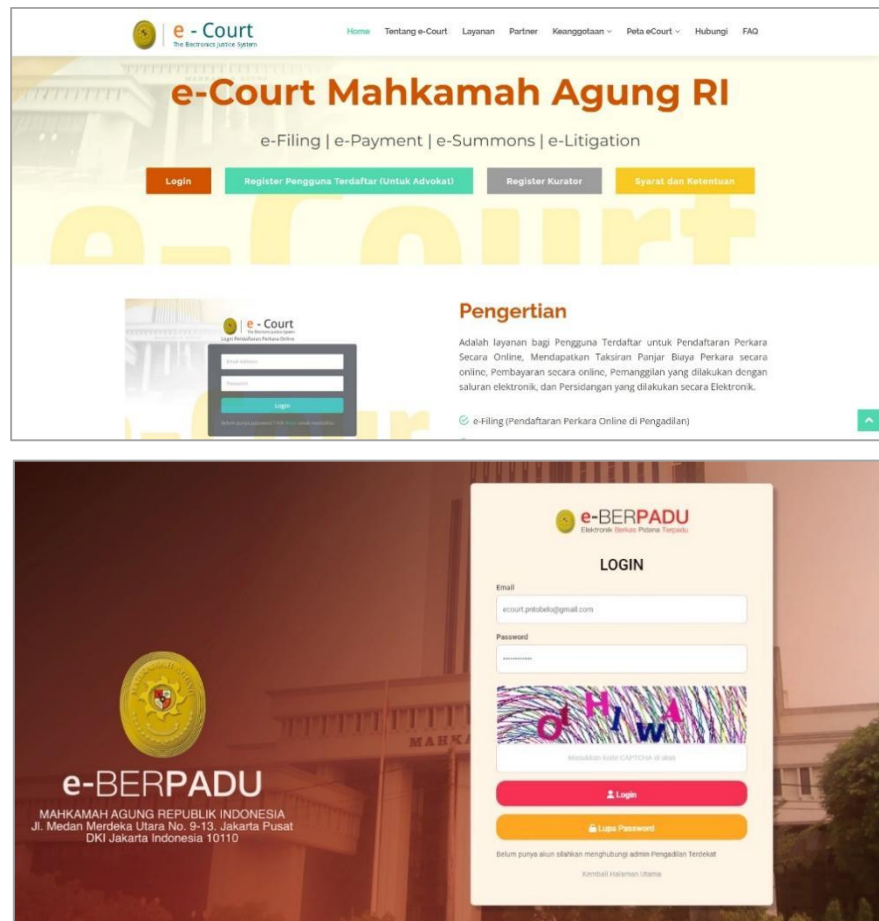
4. Pengadilan Negeri Tobelo

Pelaksanaan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Tobelo dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik pada Pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun fasilitas pelayanan publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tobelo yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Ruang Sidang, yang terdiri dari 3 (tiga) ruang sidang biasa dan 1 (satu ruang sidang anak);
- b. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Ruang Mediasi;
- d. Ruang Tamu Terbuka;
- e. Ruang Tunggu Sidang;
- f. Ruang Tunggu Anak,
- g. Ruang Tunggu Jaksa;
- h. Ruang Tahanan;
- i. Parkir Pegawai dan Pengunjung;
- j. Smoking Area;
- k. Kursi roda dan jalur difabel (penyandang cacat);
- l. Titik Kumpul Bencana.

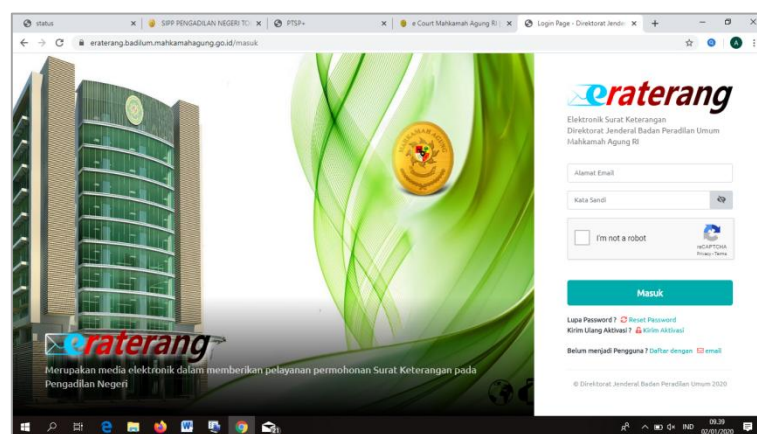
Fasilitas lainnya yang tidak kalah penting dalam pelayanan publik antara lain berbentuk aplikasi :

1) Aplikasi e-Court dan e-Berpadu Mahkamah Agung RI;



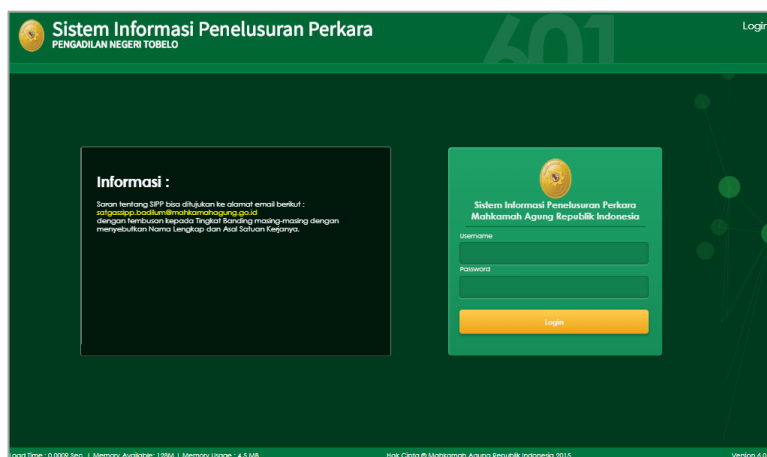
Gambar 5.27 Aplikasi e-Court dan e-Berpadu

2) Aplikasi eraterang Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;



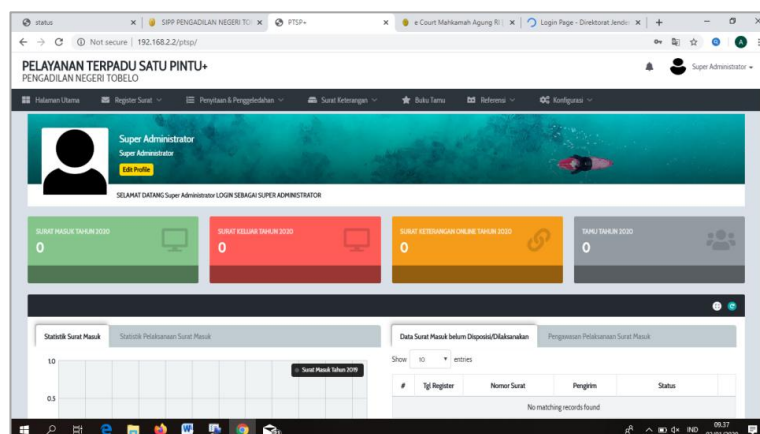
Gambar 5.28. Aplikasi Eraterang

3) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);



Gambar 5.29 Aplikasi SIPP

4) Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+);



Gambar 5.30. Aplikasi PTSP+

5) Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);



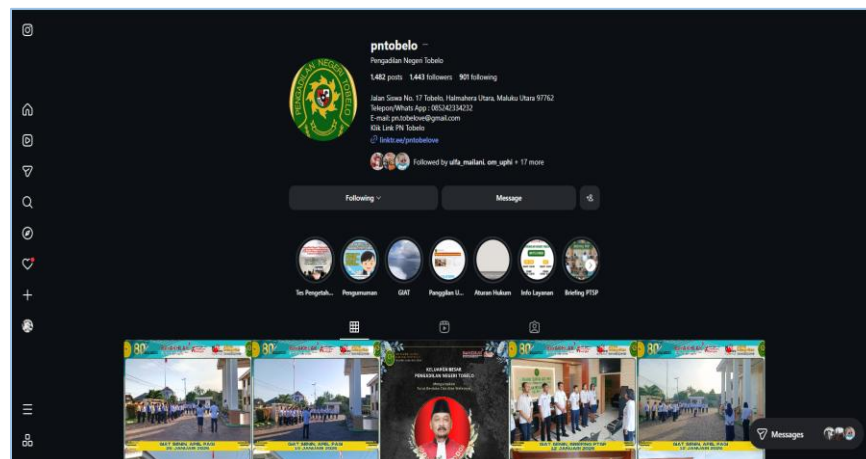
Gambar 5.31. Aplikasi SIWAS

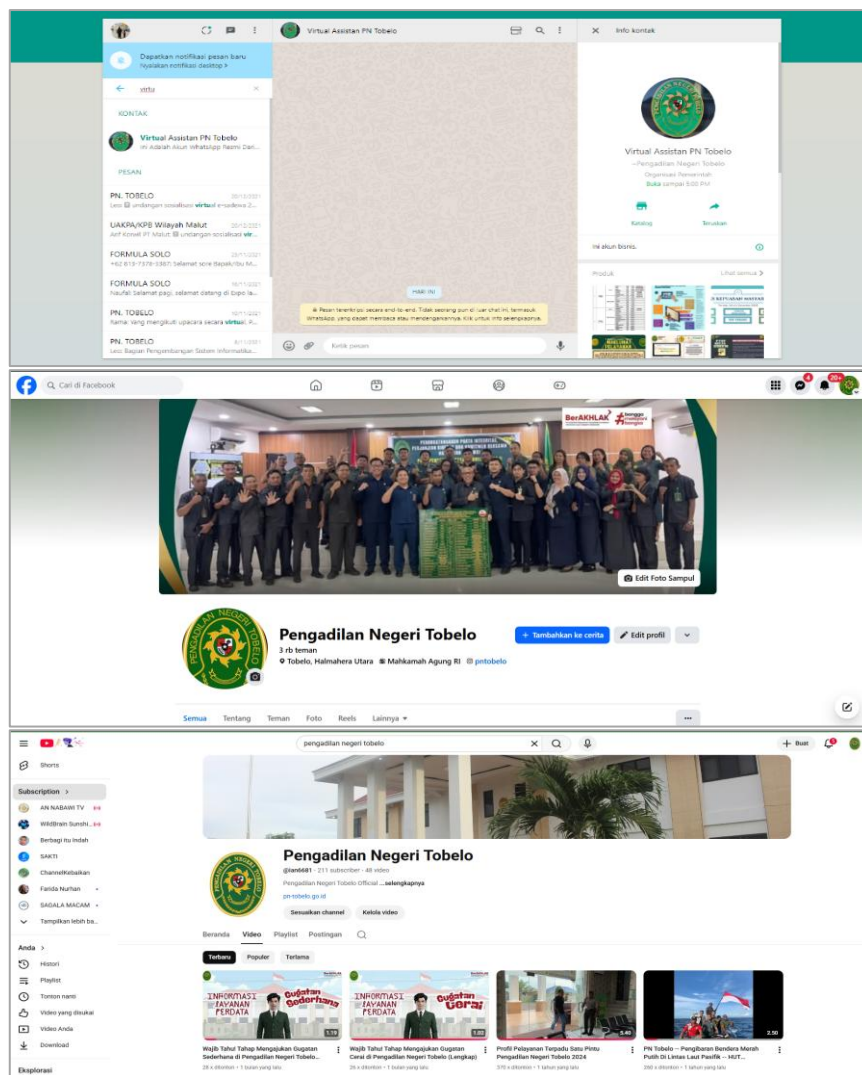
6) Website Pengadilan Negeri Tobelo;



Gambar 5.32. Website Pengadilan

7) Pemanfaatan Media Sosial dalam memberikan informasi.





Gambar 5.33. Media Sosial

8) Kaca Mata Baca

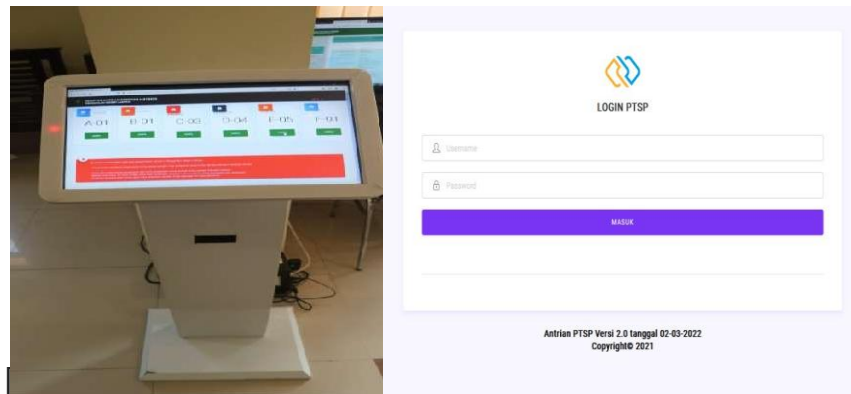


Gambar 5.34. Kaca Mata Baca

5. Pengadilan Negeri Labuha

Dalam memberikan Pelayanan Publik yang maksimal kepada Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Labuha Kelas II juga melakukan beberapa inovasi-inovasi sebagai wujud pengabdianya, beberapa Inovasi yang telah dilakukan antara lain:

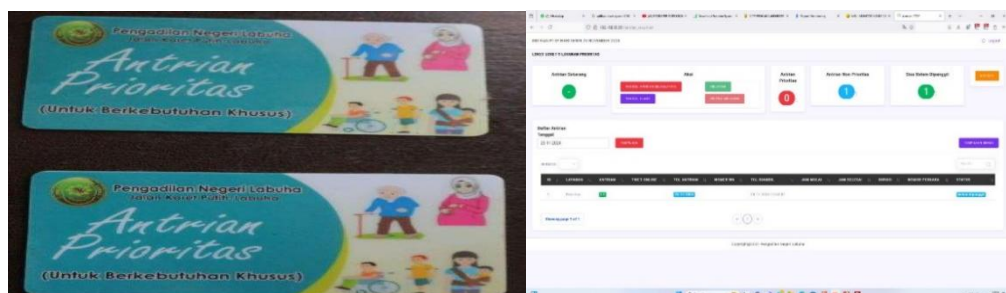
1) Antrian PTSP



Gambar 5.35. Antrian PTSP

Alur pelaksanaan Aplikasi antrian e-PTSP yaitu Pengunjung mengambil memilih tujuan pelayanan dengan cara memilih layanan di layar komputer, tiket antrian akan tercetak di printer, kemudian pengunjung menunggu sampai tiba giliran layanan yang akan tampil di layar TV dan beserta suara nomor urut antrian yang dipanggil.

2) Antrian Prioritas



Gambar 5.36 Antrian Prioritas

Dalam memberikan keadilan bagi Pengguna pelayanan, maka Pengadilan Negeri Labuha Kelas II mengeluarkan Inovasi sebuah Kartu Antrian Prioritas yang dapat digunakan bagi Kelompok Rentan Seperti Wanita Hamil, Lansia, Ibu Membawa Anak, Dan Penyandang Disabilitas. Pemberian Kartu Prioritas ini akan dilakukan oleh Petugas Keamanan yang ada didepan pintu kepada Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.

3) Monitor Informasi



Gambar 5.37. Monitor Informasi

Layar monitor Informasi berfungsi untuk panggilan antrian PTSP dan panggilan Pemberitahuan Sidang secara audio visual.

4) Mesin EDC



Gambar 5.38. Monitor EDC

Kegunaan dari Mesin EDC (Elektronik Data Capture) adalah sebagai alat penyetoran biaya perkara bagi masyarakat pencari keadilan.

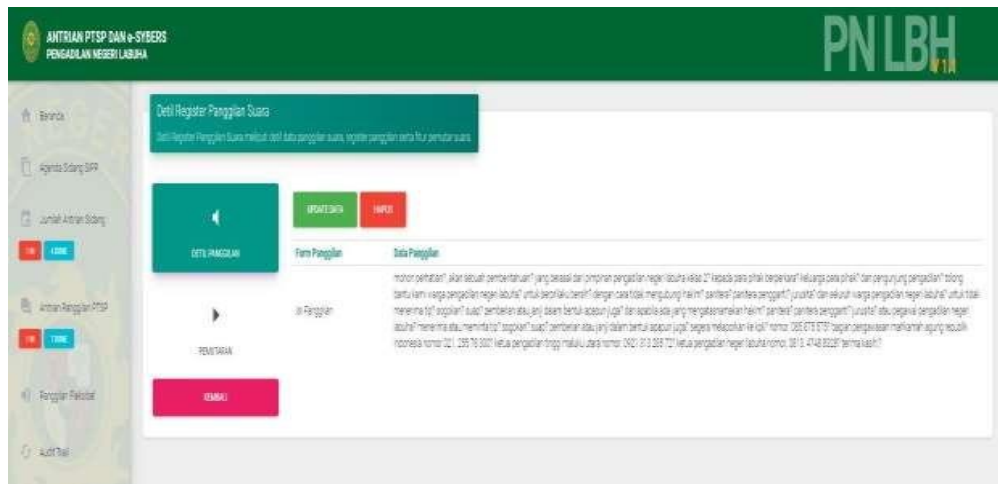
5) Kompensasi Layanan



Gambar 5.39. Kompensasi Layanan

Kompensasi ini diberikan Apabila Pelayanan melewati Standart Operasional Prosedur di Pengadilan Negeri Labuha.

6) e- Visual



Gambar 5.40. e-Visual

Kegunaan dari inovasi ini adalah pemberitahuan menyangkut dengan peringatan perilaku anti gratifikasi secara elektronik sesuai dengan surat edaran dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 17 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang himbauan pembuatan audio peringatan perilaku anti gratifikasi.

7) Jalur Khusus Disabilitas



Gambar 5.41. Jalur dan Fasilitas Disabilitas

Sesuai dengan surat keputusan Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Labuha Kelas II melakukan pembenahan sarana dan prasarana disabilitas. Pembenahan tersebut mulai dengan memeriksa kelengkapan sarana seperti parkir khusus disabilitas, kursi roda, toilet disabilitas sampai kepada pembuatan jalur disabilitas dari area parkir disabilitas sampai kepada area pelayanan, ruang sidang dan toilet.

8) Pelayanan Tamu (Air Minum Pengunjung)



Gambar 5.42. Jalur dan Fasilitas Disabilitas

9) Pelayanan Tamu (Terminal Charger dan Rak Majalah Pengunjung)



Gambar 5.43. Pelayanan Tamu

10) Layanan Pengaduan dan Keluhan (LADUKU)

Kegunaan dari inovasi ini adalah memberikan keleluasan kepada masyarakat pencari keadilan untuk melayangkan pengaduan ataupun keluhan terkait dengan Pelayanan yang diterimanya, selanjutnya pengaduan ataupun keluhan tersebut akan langsung ditindaklanjuti.



Gambar 5.44. Pelayanan Pengaduan

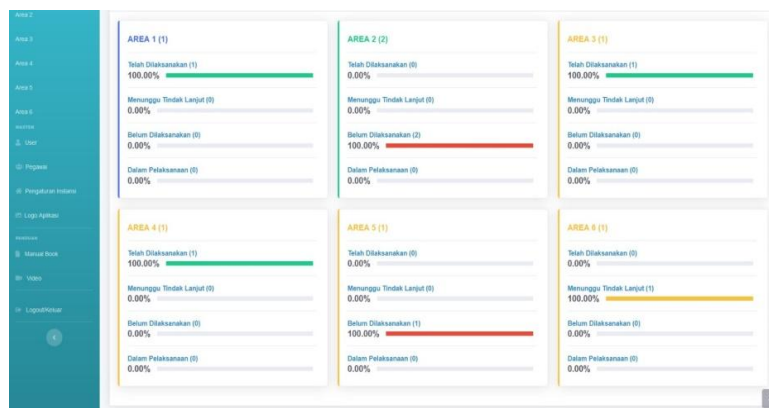
11) Sistem Informasi Monitoring Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (SIMO-AMPUH)



Gambar 5.45. Aplikasi SIMO-AMPUH

Inovasi ini merupakan aplikasi yang berisikan seluruh dokumen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Labuha, yang mana dapat dijadikan rujukan bagi Pimpinan Pengadilan untuk melakukan Monitoring dan evaluasi, sehingga Dokumen Ampuh Pengadilan Negeri Labuha menjadi lengkap dan valid.

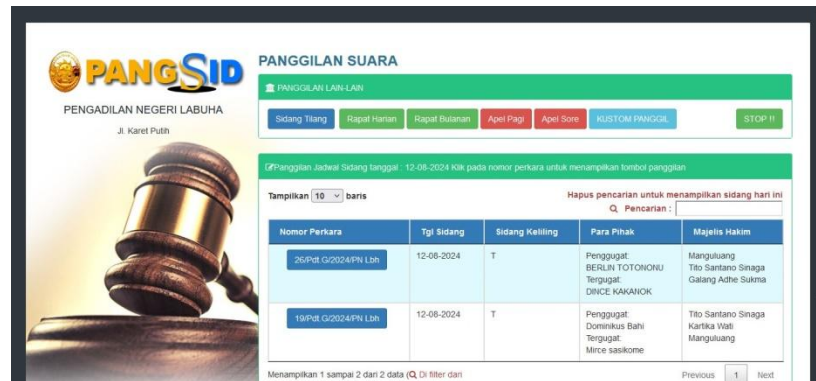
12) Sistem Informasi Monitoring Pembangunan Zona Integritas (SIMO-ZI)



Gambar 5.46. Aplikasi SIMO-ZI

Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pembangunan Zona Integritas (SIMO-ZI) merupakan Aplikasi yang berisikan seluruh dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, yang mana dapat dijadikan rujukan bagi Pimpinan Pengadilan untuk melakukan Monitoring dan evaluasi, sehingga Dokumen Pembangunan ZI Pengadilan Negeri Labuha menjadi lengkap dan valid.

13) Layanan Panggilan Sidang (LA KORO SIDANG)



Gambar 5.47. Aplikasi PangSid

Layanan Panggilan Sidang (LA KORO SIDANG) Merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah koordinasi antara petugas Piket Sidang, Panitera Pengganti dan Majelis Hakim yang akan melakukan persidangan, sehingga jalannya persidangan dapat diatur dengan baik.

14) Layanan Informasi Persidangan (LINDA)



Gambar 5.48. Layanan LINDA

Kegunaan dari inovasi ini adalah memberikan keleluasan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mengetahui informasi persidangan lebih mudah melalui Scan Barcode.

15) Loker Pengunjung



Gambar 5.49. Loker Pengunjung

Kegunaan dari Loker Pengunjung adalah tempat penyimpanan barang-barang pribadi masyarakat pencari keadilan.

16) Pojok Rapi



Gambar 5.50. Pojok Rapi

17) Pintu Khusus Penuntut Umum dan Tahanan



Gambar 5.51. Pintu Khusus Penuntu Umum dan Tahanan

6. Pengadilan Negeri Sanana

Penyelenggaraan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabel yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum guna mendapatkan berbagai informasi yang dicari, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya suatu inovasi mengenai pelayanan publik sebagai solusi dalam penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dan sebagai aplikasi dari Inovasi pelayanan publik antara lain sebagai berikut :

- Menyediakan layanan TV/layar informasi dan papan informasi hakim dan pegawai sebagai sarana informasi penanganan dan penyelesaian perkara yang dapat diakses oleh pencari keadilan maupun kepada masyarakat secara umum;

- Sebagai pelayanan publik Pengadilan Negeri Sanana juga memfasilitasi kebutuhan pelayanan pusat berupa Call Center 0929-2112724 dalam melayani kebutuhan masyarakat.



Gambar 5.52. Fasilitas Informasi Hakim dan Pegawai

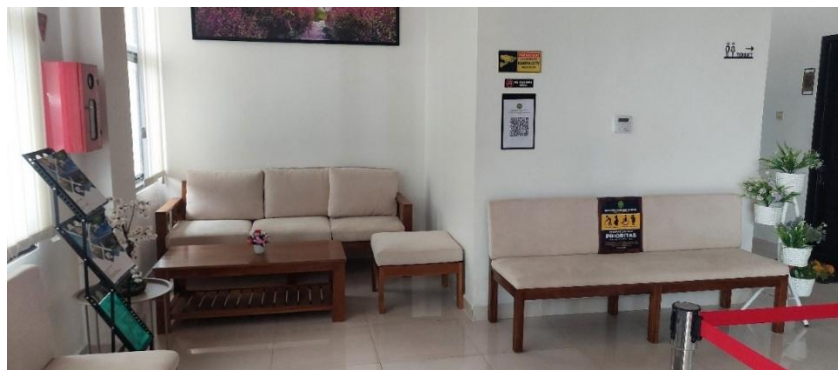
- Menyediakan kursi roda sebagai alat bantu bagi tamu disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Sanana;



Gambar 5.53. Kursi Roda untuk disabilitas pada Pengadilan Negeri Sanana



Gambar 5.54. Guiding blocks sebagai alat bantu penunjuk arah bagi tuna netra



Gambar 5.55. Ruang tamu terbuka dan kursi pengunjung



Gambar 5.56. Fasilitas Genset



Gambar 5.57. Ruang Pengunjung



Gambar 5.58. Fasilitas Taman Bermain Anak untuk sidang anak

- Menyediakan bingkisan sebagai kompensasi atas keterlambatan layanan dan pojok charger untuk layanan charger HP;



Gambar 5.59. Lemari Kompensasi dan charger HP

- Menyediakan Kulkas sebagai tempat penyimpanan minuman dan media baca berupa koran dan majalah di ruang tamu terbuka;

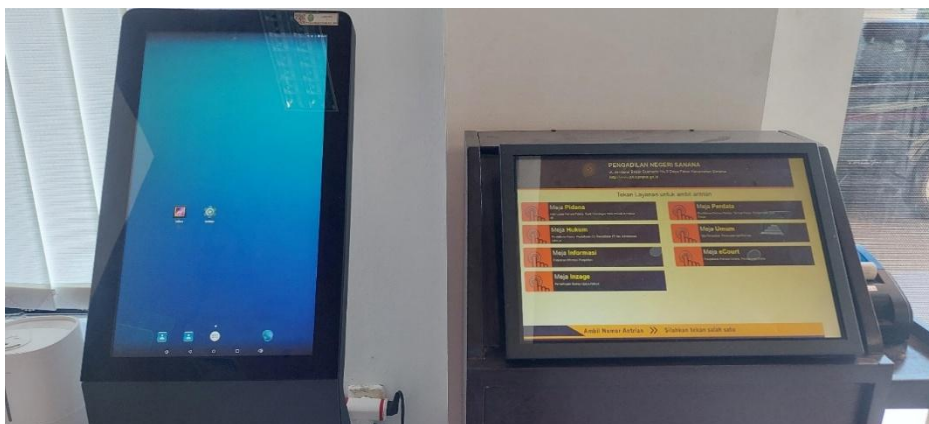


Gambar 5.60. Pojok Baca



Gambar 5.61. Kulkas Untuk Penyediaan Minuman buat pengunjung

- Aplikasi survei kepuasan masyarakat, lewat monitor touch screen dan lewat website Pengadilan Negeri Sanana;



Gambar 5.62. Tab survei untuk pengunjung dan nomor antrian pengunjung

- Menyediakan Barcode survei Pelayan Pengadilan dalam hal pelayanan Informasi kepada masyarakat;

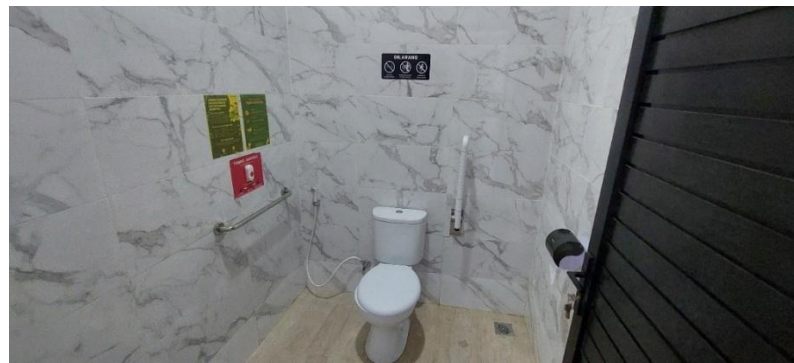


Gambar 5.63. Barcode Survei Pelayanan Pengadilan untuk pengunjung

- Memfasilitasi Alarm Kebakaran Pada kantor Pengadilan Negeri Sanana



Gambar 5.64. Alarm Pemadam Kebakaran



Gambar 5.65. Fasilitas bagi penyandang disabilitas

- Menyediakan Fasilitas Ruang Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;





Gambar 5.66. Fasilitas Kesehatan bagi masyarakat yang sedang sakit

Dengan menerapkan standar pelayanan public yang baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Disamping itu juga Pengadilan Negeri Sanana berinovasi diwilayah bidang teknologi informasi hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan serta mobilitas tinggi dalam mengakses segala informasi yang ada di Pengadilan Negeri Sanana. Tentunya tidak mudah untuk membuat suatu aplikasi berbasis pelayanan public informasi bagi masyarakat terutama bagi pencari keadilan namun Pengadilan Negeri Sanana bertekad untuk mewujudkannya dengan dibuatkan inovasi aplikasi sebagai berikut :

INOVASI PELAYANAN EKSTERNAL PENGADILAN NEGERI SANANA

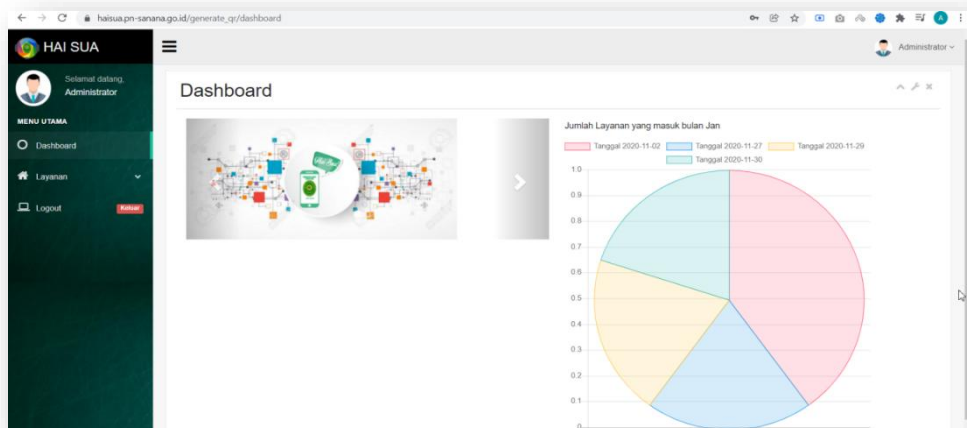
a. “Monalisa” (Monitoring & Analisa Pimpinan)

Virtual assistant pada Pengadilan Negeri Sanana dikemas dengan nama Monalisa (Monitoring & Analisa Pimpinan), Monalisa akan menampilkan berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan diawali tampilan dashboard berupa informasi Capaian EIS, Capaian kinerja penyelesaian perkara serta penyerapan anggaran yang terhubung langsung melalui server lokal dan server cloud. Fitur lainnya yaitu mengirimkan pesan kepada nomor assistant virtual tersebut maka secara otomatis akan dibalas dan menampilkan menu menu untuk pengguna memilih informasi mana yang dibutuhkan, pesan tersebut berjalan pada platform social media whatsapp. Fitur yang ada pada HaiSua adalah sebagai berikut :

- Informasi detail Capaian EIS
- Informasi Capaian kinerja penyelesaian perkara
- Informasi Penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03



Gambar 5.67. Monalisa (Monitoring & Analisa Pimpinan)



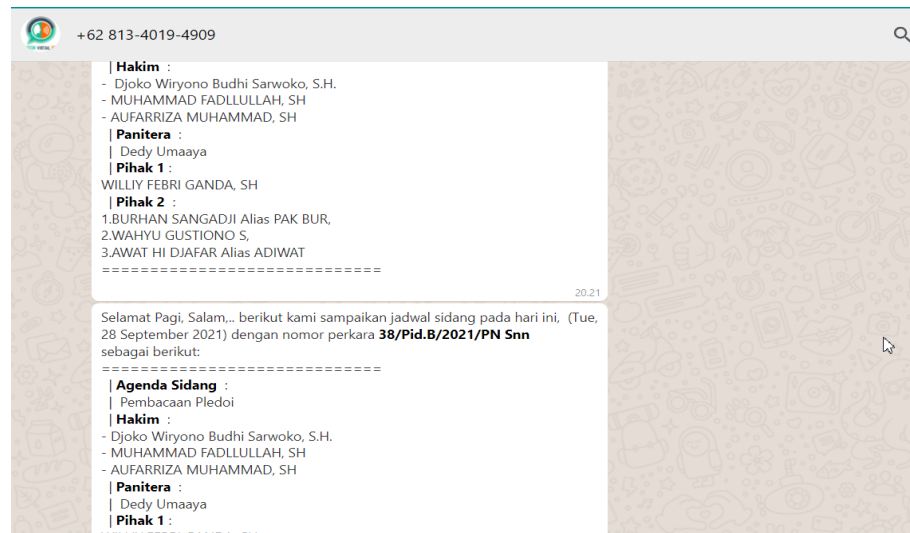
Gambar 5.68. Panel admin Haisua

b. Pengingat Sidang “Notifia”

Notifia merupakan nama system informasi yang akan mengirimkan informasi tentang jadwal sidang dihari tersebut kepada masyarakat yang mendaftarkan nomornya, pihak kejaksaan, hakim dan para pihak yang bersidang, pesan tersebut dikirimkan secara otomatis dan terjadwal oleh server dan dikirimkan melalui whats'app kepada pihak yang bersidang dihari itu.

Adapun fitur pada notifia berisi informasi sebagai berikut:

- Pesan whats'app berisi jadwal sidang, nama pihak yang bersidang, password dan id zoom untuk sidang online.
- Registrasi fitur pengingat sidang
- Kirim ulang jadwal sidang

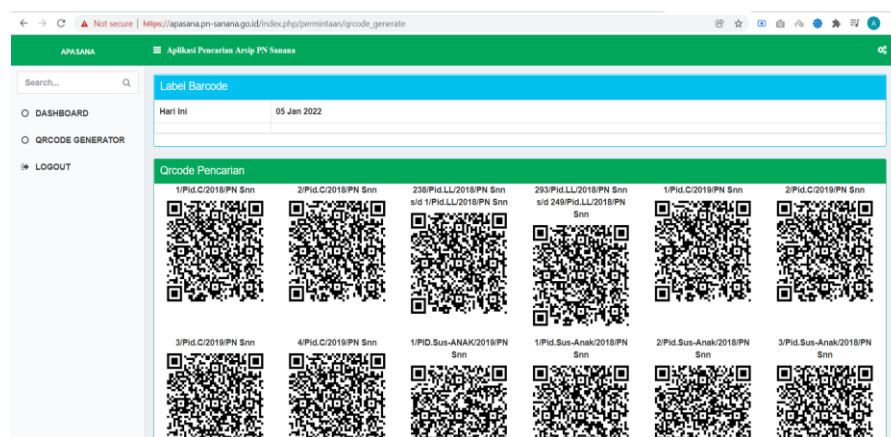


Gambar 5.69. Peningkat sidang Notifia

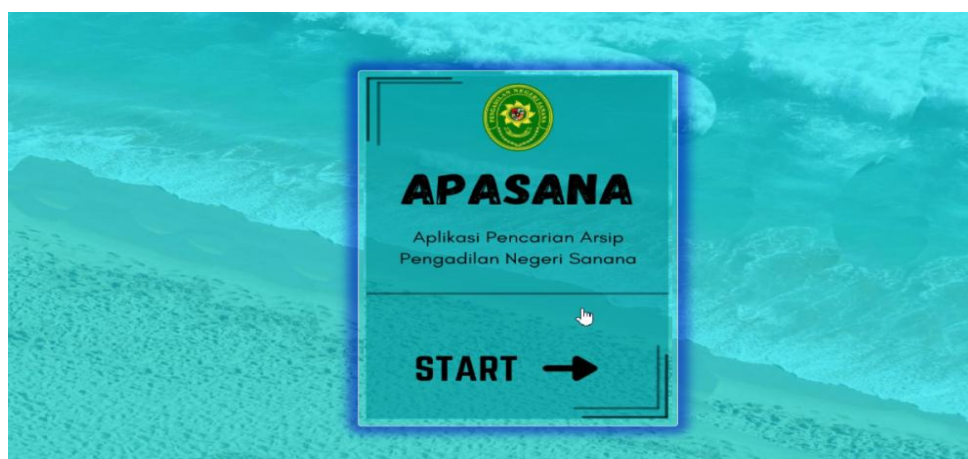
INOVASI PELAYANAN INTERNAL PENGADILAN NEGERI SANANA

a. Aplikasi Pencarian Arsip Pengadilan Negeri Sanana (APASANA)

Apasana merupakan sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk memetakan arsip perkara pada ruang arsip, dengan memetakan nomor rak dan lokasi berkas kemudian dicatat dalam basis data, maka pengguna APASANA dapat menemukan detail arsip yang diinginkan dengan scan QR Code yang telah degenerate atau memasukan pencarian melalui kotak pencarian.



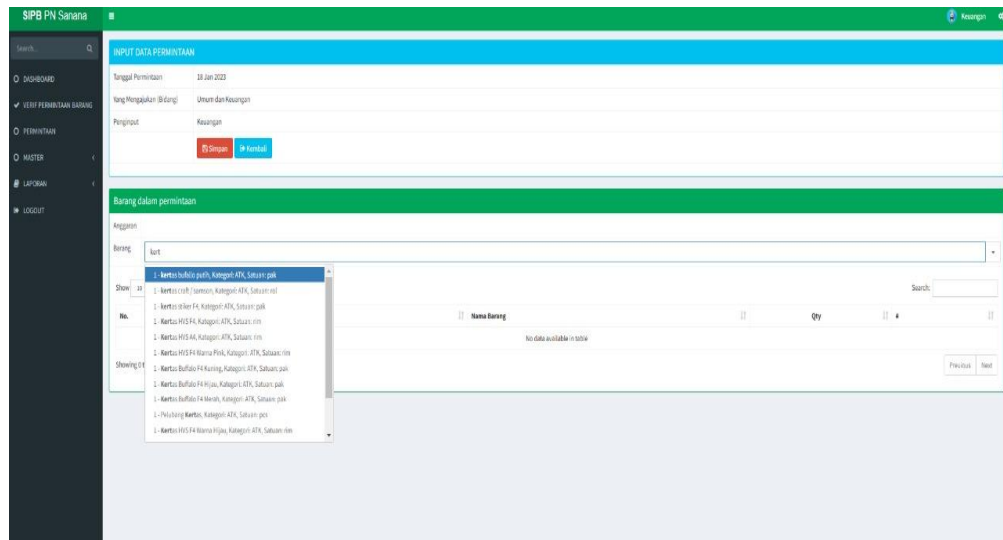
Gambar 5.70. Panel Admin APASANA



Gambar 5.71. Halaman Beranda depan APASANA

b. Sistem Informasi Permintaan Barang (SIPB)

Sistem Informasi Permintaan Barang merupakan sebuah sistem informasi yang menghasilkan output berupa Rekapitulasi Daftar Barang yang akan dibelanjakan, Rekapitulasi Permintaan Barang dari masing-masing Bagian dan Laporan Barang yang telah diterima oleh Bagian yang melakukan permintaan. SIPB digunakan oleh masing-masing bagian untuk melakukan permintaan barang pakai habis dengan menginput barang yang dibutuhkan dan menghasilkan rekapitulasi permintaan barang dari bagian tersebut, yang kemudian diverifikasi oleh user dari Bagian Umum dan Keuangan untuk kemudian barang tersebut dibelanjakan dan menghasilkan laporan barang menunggu pembelanjaan, setelah barang dibelanjakan dan didistribusikan ke bagian-bagian maka bagian yang menerima barang pakai habis tersebut melakukan verifikasi penerimaan sehingga menghasilkan laporan realisasi permintaan barang.



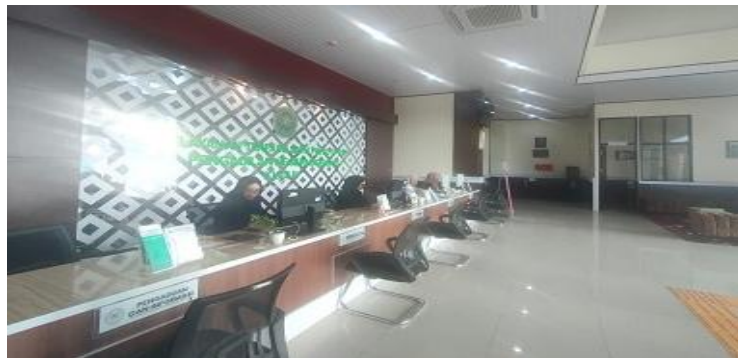
Gambar 5.72. Permintaan Barang per Bagian dengan SIPB

7. Pengadilan Negeri Bobong

Pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bobong bertujuan untuk memuaskan keinginan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KMPAN) Nomor 62 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik setidaknya mengandung sendi-sendi :

- 1) Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- 2) Kejelasan yang mencakup;
- 3) Rincian biaya atau tarif pelayanan publik;
- 4) Prosedur/ tatacara umum, baik teknis maupun administrasi
- 5) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

- 6) Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;
- 7) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas;
- 8) Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 9) Dokumentasi PTSP, Ruang Tumbu Terbuka, Toilet Difabel



Gambar 5.73. Ruang PTSP Pengadilan Negeri Bobong

10) Ruang Tamu Terbuka



Gambar 5.74. Ruang Tamu Terbuka Pengadilan Negeri Bobong

11) Toilet Disabilitas



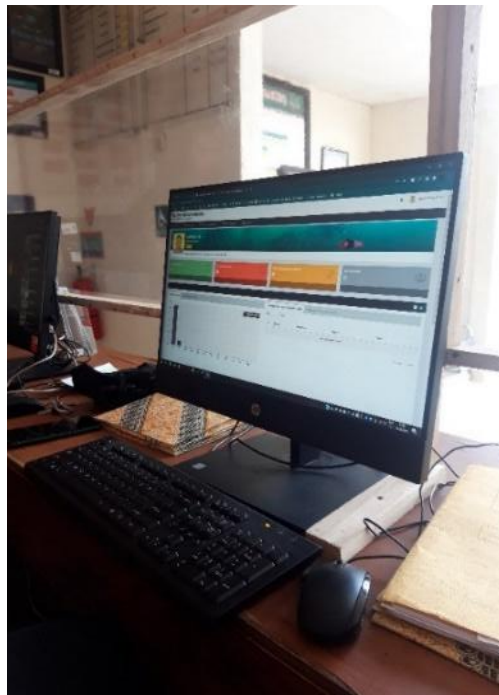
Gambar 5.75. Toilet Disabilitas

Aplikasi dari Inovasi pelayanan publik antara lain sebagai berikut :

- 1) Komputer Layanan sebagai sarana informasi penanganan dan penyelesaian perkara yang dapat diakses oleh pencari keadilan maupun kepada masyarakat secara umum;
- 2) Menyediakan kursi roda sebagai alat bantu bagi tamu disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Bobong;
- 3) Menyedia Kursi Pengunjung Difabilitas untuk masyarakat pencari keadilan;
- 4) Menyediakan Toilet Pengunjung Difabilitas untuk masyarakat pencari keadilan;
- 5) Menyediakan Informasi Maklumat Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- 6) Menyediakan bingkisan sebagai kompensasi atas keterlambatan layanan;
- 7) Menyedian Nomor Antrian pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan;

- 8) Menyediakan QR Code pamflet-pamflet/ brosur pelayanan dalam hal pelayanan Informasi kepada masyarakat;
- 9) Menyediakan CCTV untuk mengontrl kegiatan pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik yang baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.



Gambar 5.76. Komputer Pelayanan



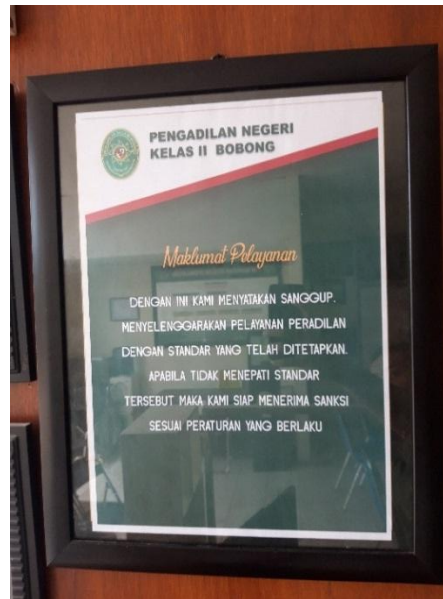
Gambar 5.77. Kursi Roda



Gambar 5.78. Kursi ruang tunggu khusus Difabel



Gambar 5.79. Toilet Difabel



Gambar 5.80. Maklumat Pelayanan



Gambar 5.81. Bingkisan kompensasi atas keterlambatan layanan



Gambar 5.82. Bingkisan kompensasi atas keterlambatan layanan



Gambar 5.83. CCTV



Gambar 5.84. Waktu Pelayanan

BAB VI. PENGAWASAN

A. INTERNAL

Kegiatan Pengawasan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 33/KPT/W28-U/OT1.2/II/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas Khusus pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Pelaksanaan Pengawasan masing-masing bidang dimaksud telah dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari beberapa eviden kegiatan, yakni:

1. Dokumen Rapat Berjenjang yang berisikan undangan, daftar hadir, notulen rapat dan dokumentasi rapat;
2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Hakim Pengawas Bidang;
3. Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLHP) dari panitera muda/ Kepala Sub Bagian;
4. Dokumentasi/foto kegiatan.

Pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dilaksanakan oleh Hakim Pengawasan Bidang yang ditunjuk untuk melakukan Pengawasan terhadap:

1. Kepaniteraan :
 - a. Kepaniteraan Perdata
 - b. Kepaniteraan Pidana
 - c. Kepaniteraan Tipikor
 - d. Kepaniteraan Hukum

2. Kesekretariatan :

- a. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- b. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
- d. Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan
- e. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- f. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Dari hasil temuan Pengawasan tersebut diatas sebagian besarnya telah ditindak lanjuti sepanjang temuan dalam kendali internal bagian, sedangkan temuan-temuan yang bersifat fisik sarana dan kekurangan SDM adalah diluar kendali bagian, sehingga tidak dapat ditindak lanjuti dalam waktu cepat dan tepat.

Untuk Pengawasan pada Pengadilan Negeri dalam Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara terdapat 6 (enam) Pengadilan Negeri pada tahun 2025 yang telah dilaksanakan. Pengawasan dilaksanakan pada semester I tahun 2025 oleh Hakim Pengawas Daerah yang dilaksanakan secara langsung sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 35/KPT.W28-U/OT1.2/I/2025 tanggal 3 Januari 2024 kemudian direvisi dengan dikeluarkan Surat Keputusan Nomor: 135/KPT.W28-U/OT1.2/I/2025 tanggal 17 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Daerah Untuk Melaksanakan Pengawasan di Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi maluku Utara, yaitu masing-masing pada :

- 1) Pengadilan Negeri Ternate, dengan Surat Tugas Nomor: 726/KPT.W28-U/ST.KP7.1/V/2024 tertanggal 5 Mei 2025 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan 8 Mei 2025. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah dikirim ke Badan

Pengawas Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: 1168/KPT.W28-U/HK1.2.3/VII/2025, tanggal 27 Juli 2025;

- 2) Pengadilan Negeri Soasio, dengan Surat Tugas Nomor : 809 /KPT.W28-U/ST.KP7.1/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah dikirim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: 1168/KPT.W28-U/HK1.2.3/VII/2025, tanggal 27 Juli 2025;
- 3) Pengadilan Negeri Tobelo, dengan Surat Tugas Nomor : 810 /KPT.W28-U/ST.KP7.1/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah dikirim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: 1168/KPT.W28-U/HK1.2.3/VII/2025, tanggal 27 Juli 2025;
- 4) Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Tugas Nomor : 897 /KPT.W28-U/ST.KP7.1/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah dikirim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: 1168/KPT.W28-U/HK1.2.3/VII/2025, tanggal 27 Juli 2025;
- 5) Pengadilan Negeri Sanana berdasarkan Surat Tugas Nomor : 901 /KPT.W28-U/ST.KP7.1/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah

dikirim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: 1168/KPT.W28-U/HK1.2.3/VII/2025, tanggal 27 Juli 2025;

- 6) Pengadilan Negeri Bobong berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor : 902/KPT.W28-U/ST.KP7.1/V/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah dikirim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: 1168/KPT.W28-U/HK1.2.3/VII/2025, tanggal 27 Juli 2025.

Tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah diselesaikan oleh seluruh Pengadilan Negeri dalam Wilayah Maluku Utara berdasarkan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), adapun terkait dengan Pelaksanaan Assesment Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan Reguler sehingga dapat dikatakan bahwa Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah sesuai dengan petunjuk dan pedoman pengawasan berdasarkan ketentuan Buku IV Edisi Tahun 2007 Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan (KIMWASMAT) terhadap putusan Pengadilan telah dilaksanakan secara keseluruhan oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, adapun sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bersandar pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri masing-masing yaitu:

1. Pengadilan Negeri Ternate telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan Kimwasmak dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 2764/KPN.W28-U2/SK.OT.2/XI/2025, tanggal 5 November 2025;
2. Pengadilan Negeri Soasio telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmak dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor. 717/KPN.W28-U1/SK.OT1.6/VII/2025, Tanggal 24 Juli 2025;
3. Pengadilan Negeri Tobelo telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmak dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 873/KPN.W28-U4/SK/PW1/VIII/2025, Tanggal 1 Agustus 2025;
4. Pengadilan Negeri Labuha telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmak dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 117/KPN.W28-U3/HK1.2.5/VII/2025, Tanggal 7 Juli 2025;
5. Pengadilan Negeri Sanana telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmak dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 482/KPN.W28-U5/SK/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025;
6. Pengadilan Negeri Bobong telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmak dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor: 128/KPN.W28-U6/PW1.2/II/2025 Tanggal 2 Januari 2025.

Terhadap Pengadilan Negeri yang tidak terdapat Jabatan Wakil Ketua, maka kordinator Kimwas dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Labuha, Pengadilan Negeri Soasio, Pengadilan Negeri Sanana dan Pengadilan Negeri Bobong, jika terdapat temuan, maka membuat Kertas Kerja Pengawasan yang memuat kriteria, sebab, akibat

dan rekomendasi, dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang proposional dengan bidang tugas yang ada pada Satuan Kerja, Kekurangan SDM tiap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat dijabarkan pada beban pekerjaan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Ternate, jumlah hakim 9 (sembilan) orang hakim karier dan 5 (lima) orang hakim Ad Hoc, dengan volume perkara sebanyak 585 perkara, dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 5 (lima) bidang kepaniteraan dan 3 (tiga) bidang kesekretariatan ditambah 1 (satu) bidang wasmat.
2. Pengadilan Negeri Soasio, jumlah hakim 7 (tujuh) orang, volume perkara sebanyak 335 perkara dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 (tiga) bidang kepaniteraan, 3 (tiga) bidang kesekretariatan dan 1 (satu) bidang wasmat.
3. Pengadilan Negeri Tobelo, jumlah hakim 8 (delapan) orang, volume perkara sebanyak 441 perkara, dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 (tiga) bidang kepaniteraan, 3 (tiga) bidang kesekretariatan dan 1 (satu) bidang wasmat.
4. Pengadilan Negeri Labuha, jumlah hakim 7 (tujuh) orang, volume perkara sebanyak 133 perkara dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 (tiga) bidang kepaniteraan, 3 (tiga) bidang kesekretariatan dan 1 (satu) bidang wasmat.

5. Pengadilan Negeri Sanana, jumlah hakim 5 (lima) orang, dengan volume perkara sebanyak 204 perkara dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 (tiga) bidang kepaniteraan, 3 (tiga) bidang kesekretariatan dan 1 (satu) bidang wasmat.
6. Pengadilan Negeri Bobong, jumlah hakim 5 (lima) orang, dengan volume perkara sebanyak 24 perkara dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 (tiga) bidang kepaniteraan, 3 (tiga) bidang kesekretariatan dan 1(satu) bidang wasmat.

B. EVALUASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan pola Evaluasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan melihat Kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi. Namun dalam hal pengawasan rutin bulanan, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengembangkan model evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 33/KPT/W28-U/OT1.2/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas Khusus pada pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Untuk evaluasi Kinerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dilakukan secara berjenjang, mulai dari unit terkecil yaitu para kasubag dan Panmud beserta staf yang didampingi oleh masing-masing hakim pengawas bidang, kemudian dengan kabag dan para kasubag, dan selanjutnya dengan Panitera dan sekretaris kemudian akhirnya dievaluasi bersama pimpinan pengadilan yang pelaksanaan papatnya dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Dalam Rapat Evaluasi Kinerja tersebut disamping membahas hasil rapat berjenjang dan laporan dari masing-masing sub bagian juga membahas hasil dari monitoring dan evaluasi hakim tinggi pengawas bidang.

Berdasarkan hasil temuan baik pada Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Bidang maupun Pengawas Daerah telah dilaksanakan evaluasi dan tindak lanjut, disamping itu juga pada Rapat Evaluasi Bulanan tersebut, juga dilakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona integritas dan Evaluasi terhadap sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

BAB VII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, dengan pengukuran Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yaitu Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dengan Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan dan Target sesuai pagu anggaran peningkatan manajemen peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, maka pada Bab ini Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri di bawahnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Keadaan perkara tersebut, berdasarkan rencana kinerja tahun 2025, dengan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target 100% dan program kegiatan dengan target perkara berdasarkan realisasi dan capaian tahun 2025, perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025, ada 136 perkara dan yang sudah putus ada 125 perkara, sedangkan yang sisanya 11 perkara baru masuk di akhir bulan Desember 2025, sehingga belum bisa diselesaikan dalam tahun 2025. Dengan demikian realisasi dan capaian tahun 2025 ini yaitu 91,91% masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2. Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Pada dasarnya penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara sangat baik, dapat

dilihat dari capaian sasaran kerja dengan indikator kinerja masing-masing pengadilan tingkat pertama, adalah :

- 1) Pengadilan Negeri Ternate: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 585 perkara dan jumlah perkara putus 544 perkara maka capaian kinerja adalah 93%.
- 2) Pengadilan Negeri Soasio: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 335 perkara dan jumlah perkara putus 309 perkara maka capaian kinerja adalah 92%.
- 3) Pengadilan Negeri Tobelo: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 419 perkara dan jumlah perkara putus 402 perkara maka capaian kinerja adalah 96%.
- 4) Pengadilan Negeri Labuha: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 136 perkara dan jumlah perkara putus 127 perkara maka capaian kinerja adalah 93%.
- 5) Pengadilan Negeri Sanana: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 204 perkara dan jumlah perkara putus 197 perkara maka capaian kinerja adalah 97%.
- 6) Pengadilan Negeri Bobong: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 24 perkara dan jumlah perkara putus 22 perkara maka capaian kinerja adalah 92%.

B. REKOMENDASI

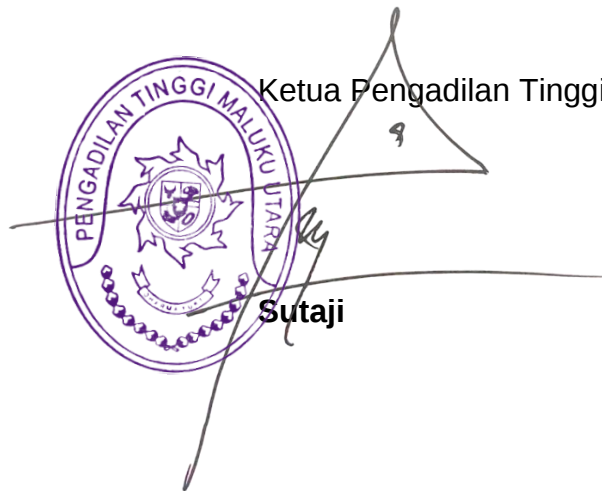
Bahwa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsi peradilan baik pada Tingkat Banding maupun pada Tingkat Pertama di Tahun 2025 adalah kekurangan alat pengolah data, seperti laptop/PC, printer,

scanner dan server sehingga implementasi pelaksanaan administrasi dan pelayanan publik belum berjalan maksimal.

Oleh karena itu, melalui laporan ini kami rekomendasikan kepada pimpinan Eselon I Mahkamah Agung Cq. Biro Perencanaan dan Organisasi, kiranya usulan Rencana Kegiatan Anggaran/Kementerian Lembaga (RKA/KL) Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya dapat dipertimbangkan dan disetujui, karena usulan kami sesuai kebutuhan riil dengan skala prioritas.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan tahunan 2025 ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja manajemen peradilan pada masa yang akan datang.

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



Sutaji